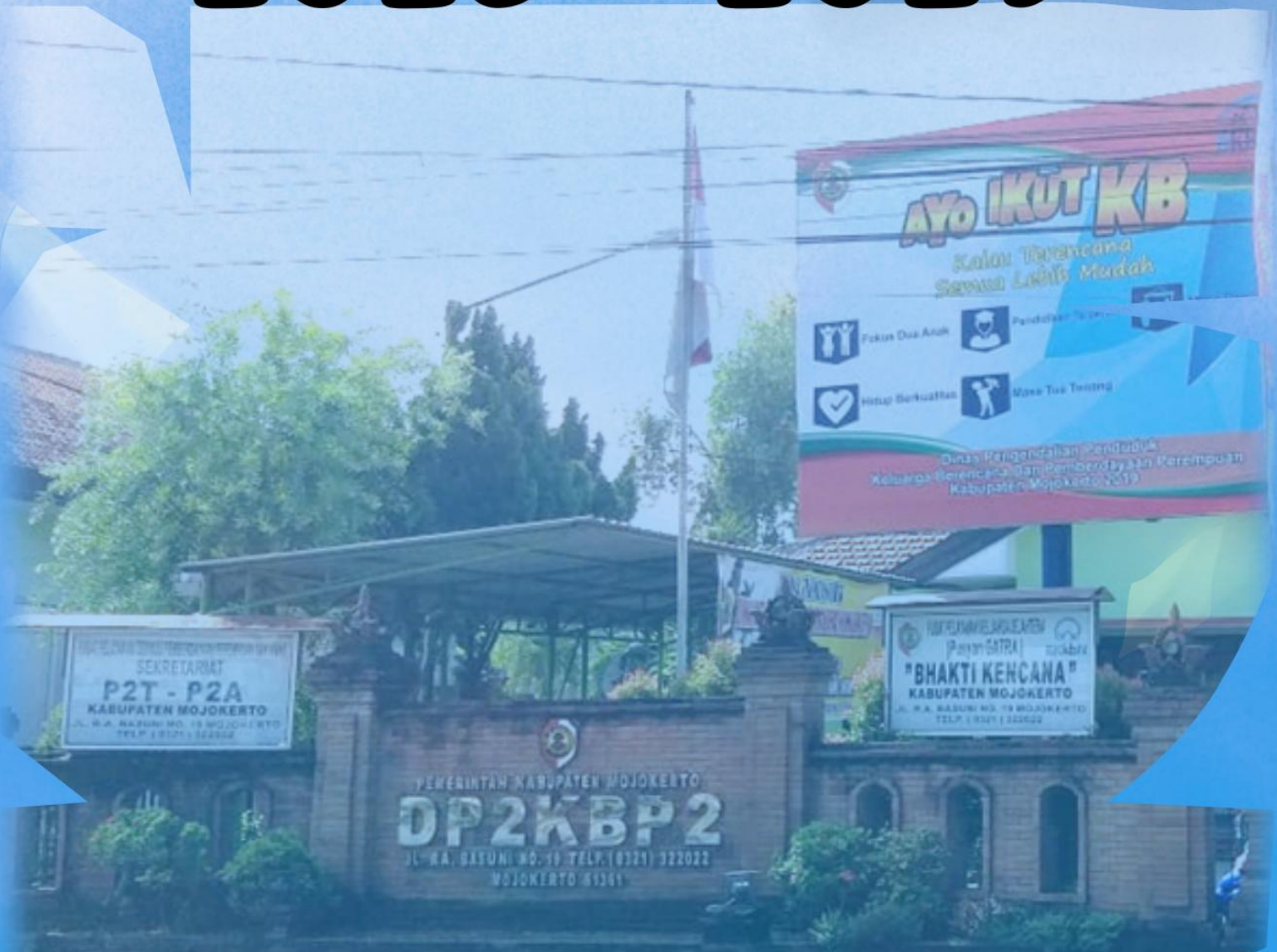




**Mojokerto**  
Full of Majapahit Greatness

# RENSTRA

## Rencana Strategis 2025 - 2029





PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

Jalan : R. A. Basuni Nomor 19 Mojokerto, Jawa Timur 61361  
Telepon (0321) 322022, Faksimile (0321) 322022

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
NOMOR 188/4146/416-109/2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2025 – 2029  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN KABUPATEN MOJOKERTO**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN, KABUPATEN MOJOKERTO,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan dan Perikanan ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya ;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto 2025-2029 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto.
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dengan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dengan format dokumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mojokerto  
Pada tanggal, 16 September 2025  
KEPALA DINAS P2KBP2  
KABUPATEN MOJOKERTO



Dr. Bambang Wahyuadi, M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710201989031009

# DAFTAR ISI

|                                                                                                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                                       | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                                           | <b>iv</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                                                                        | <b>v</b>   |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>                                                                     |            |
| 1.1 Latar Belakang.....                                                                          | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum.....                                                                          | 4          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....                                                                      | 7          |
| 1.4 Sistematika Penulisan.....                                                                   | 8          |
| <br><b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b>             |            |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah .....                                            | 11         |
| 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....                                                            | 21         |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                                                     | 24         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah .....                          | 44         |
| <br><b>BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>                                  |            |
| 3.1. Tujuan Renstra PD.....                                                                      | 52         |
| 3.2. Sasaran Renstra PD .....                                                                    |            |
| <br><b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....</b> |            |
|                                                                                                  | <b>63</b>  |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                       | <b>241</b> |

## Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## DAFTAR TABEL

|                                                                                        |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Sumber daya manusia Dinas P2KBP2 .....                                       | 18  |
| Tabel 2.2 Sumber daya Sarana dan Prasarana Dinas P2KBP2 .....                          | 20  |
| Tabel 2.1.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                        | 25  |
| Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Perangkat Daerah .....                     | 27  |
| Tabel 2.1.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP2KBP2 .....                   | 31  |
| Tabel 3.3 Teknik Perumuskan dan Tujuan Sasaran Renstra Perangkat Daerah .....          | 33  |
| Tabel 3.4 Penahapan Renstra Perangkat Daerah .....                                     | 54  |
| Tabel 3.3.1 Tujuan Sasaran, Strategi dan kebijakan DP2KBP2 .....                       | 56  |
| Tabel 3.5 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra .....                                | 61  |
| Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program /Kegiatan/sub Kegiatan Renstra .....               | 64  |
| Tabel 4.3 Rencana Program /Kegiatan/sub Kegiatan dan Pendanaan .....                   | 167 |
| Tabel 4.4 Daftar sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah ..... | 229 |
| Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah .....                               | 232 |
| Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci .....                                                | 235 |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## KATA PENGANTAR

Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan secara ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang sering kali saling berkaitan satu sama lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia diantaranya kurang berdayanya kaum perempuan, pemilihan alat kontrasepsi yang kurang rasional, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, tingginya perkawinan diusia muda dan lemahnya ketahanan keluarga.

Dalam upaya mengurangi persoalan-persoalan diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis tahun 2025 – 2029 yang akan memberikan arah perencanaan pembangunan 5 tahun kedepan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan tetap berpedoman pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya semoga RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, 16 September 2025

KEPALA DP2KBP2  
KABUPATEN MOJOKERTO



Dr. Bambang Wahyuadi, M.H  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710201989031009

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 dilakukan perubahan juga terhadap rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

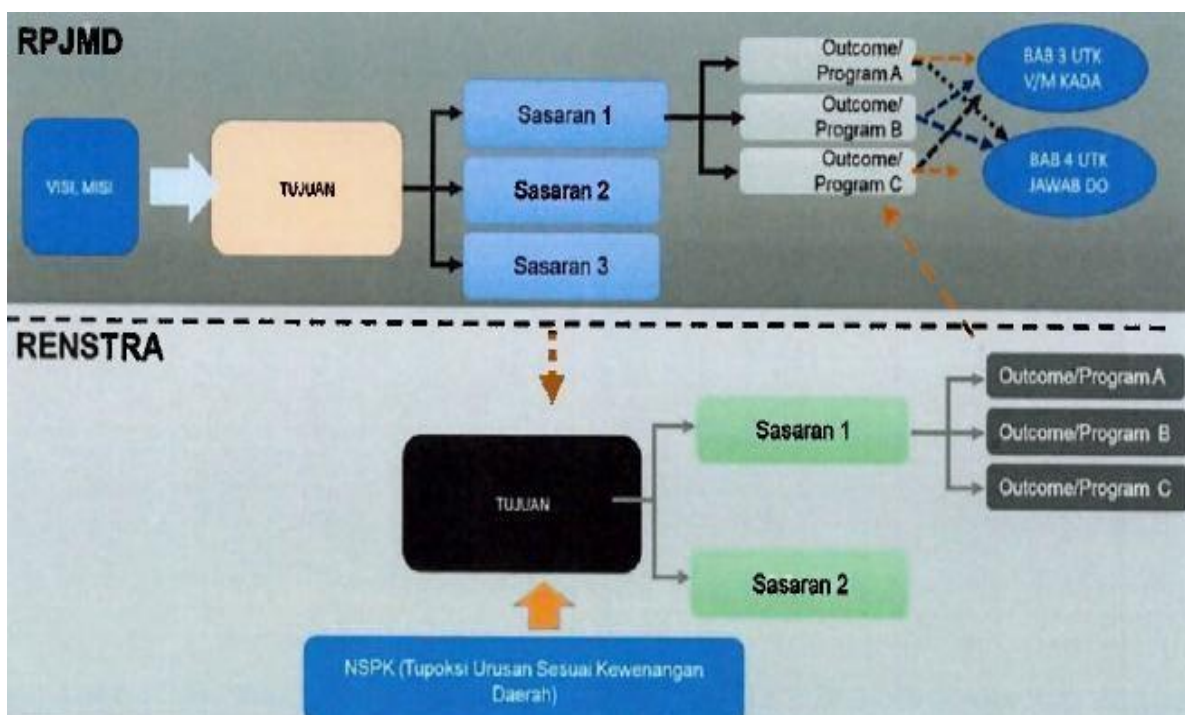
Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsiperangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga,

Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah /Provinsi dan keterkaitan antara RPJMD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

**Gambar 1.1**  
**Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra PD**



**Gambar 1.2**

**Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**



Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## 1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Ranwal Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025 - 2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia:
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Pendudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
13. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
14. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Keluarga Berencana yang Responsif Gender;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender;
26. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendayagunaan Tenaga Penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 – 2023;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaga Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas peraturan daerah No.9 tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2045);
33. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
34. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto;
35. Surat Keputusan Kepala DP2KBP2 Nomor 188.45/7938/416-108/2024 Tentang Tim Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Periode 2025 – 2029;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan dan penetapan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 2025 – 2029 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2025 – 2029;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan antara lain :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 adalah :

### **Bab I PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Berisi tentang Latar Belakang penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029.

#### **2. Dasar Hukum Penyusunan**

Landasan hukum yang relevan dan signifikan Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029.

3. Maksud dan tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan Renstra PD Tahun 2025 – 2029.

4. Sistematika Penulisan

## **Bab II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

- a. Tugas Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)
- d. Kelompok sasaran layanan Perangkat Daerah
- e. Mitra PD dalam pemberian pelayanan

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

## **Bab III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN**

1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029
2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025 – 2029

## **Bab IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA MENYELENGARAAN BIDANG URUSAN**

1. Uraian Program
2. Uraian Kegiatan
3. Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif
4. Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD
5. Target kinerja penyelenggaraan urusan Pemerintahan daerah Tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

## **Bab V PENUTUP**

Bab ini memuat diantaranya Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 GAMBARAN PELAYANAN DP2KBP2**

##### **a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**

Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 85 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah terdiri atas :

#### **KEPALA DINAS**

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

#### **SEKRETARIAT**

- (1). Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang – bidang dan memberikan pelayanan administrasi serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.
- (2). Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan Koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran ;
  - b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
  - c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan tata laksana dan hubungan masyarakat ;
  - d. Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan peraturan perundang – undangan dan penataan organisasi ;
  - e. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset ;
  - f. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang - bidang dan UPTD di lingkungan Dinas ;
  - g. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- Sekretariat membawahi :

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian ;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor ;
- d. Menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian ;
- e. Melakukan pengelolaan dan pengamanan aset ;
- f. Menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang – bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian :
- g. Melakukan evaluasi penyusunan laporan ; dan
- h. Melakukan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretariat.

## **BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK**

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pengendalian Penduduk, Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk serta data dan analisa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang PengendalianPenduduk, mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga ;
- c. Pelaksnaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
- d. Pelaksanaan pepaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangkapengendalian kwanntitas penduduk;
- e. Pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
- f. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
- g. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk;
- h. Pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- j. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan Kepala Dinas.

#### **BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA**

- (1) Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam melaksanakan sebagian tugas dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan meliputi pendayagunaan penyuluhan keluarga berenana/ petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta advokasi komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan, dan peningkatan kesertaan keluarga berencana ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga berencana (KB);
  - b. Pelaksanaan norma, standart, prosedur dan kriteria bidang Keluarga Berecana (KB) ;
  - c. Pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan ditingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana (KB) ;

- d. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) ;
- e. Pelaksanaan penerimaan penyimpanan, pengendalian dan pendistribusian obat kontrasepsi di daerah ;
- f. Pelaksanaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
- g. Pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-Keluarga Berencana (KB) di daerah ;
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang Keluarga Berencana (KB) ;
- i. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang Keluarga Berencana (KB) ;
- j. Pelaksanaan koordinasi di bidang Keluarga Berencana (KB) ;
- k. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan ; dan
- l. Pelaksanaan tugas – tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ;

## **BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA**

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi ketahanan keluarga remaja dan konseling remaja, ketahanan keluarga balita dan lanjut usia serta kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - b. Pelaksanaan norma standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah di bidang keluarga balita, pembinaan ketahanan remaja, serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;
  - d. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
  - e. Pelaksanaan pemantuan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - f. Pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;

- g. Pelaksanaan koordinasi di bidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

## **BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER**

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, mempunyai fungsi :
  - a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan serta pengarusutamaan gender;
  - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
  - c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan gender;
  - d. Perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender ;
  - e. Perumusan pelambagaan pengarusutamaan gender ;
  - f. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan ;
  - g. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender ;
  - h. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan; dan
  - i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

## **BIDANG PERLINDUNGAN ANAK**

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

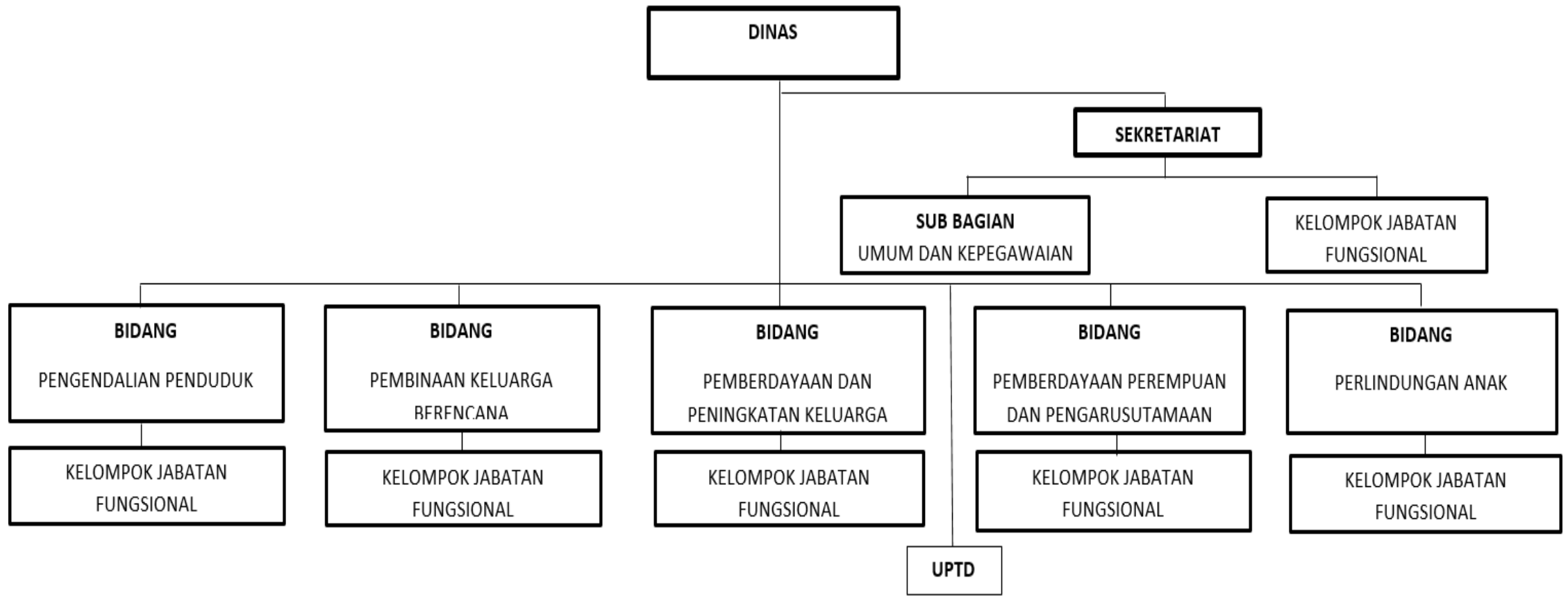
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak Mempunyai fungsi :

- a. Perumusan bahan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak ;
- c. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perlindungan anak ;
- d. Perumusan kelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha ;
- e. Perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan perlindungan anak ;
- f. Pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak ;
- g. Pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (e-gov) ;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas ;

#### **KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan, keahlian, keterampilan dan kebutuhan ;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (3) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibentuk sub koordinator ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional yang ada di DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto sebagai berikut:
  1. Jabatan Fungsional Analis kebijakan
  2. Jabatan Fungsional Penata kependudukan dan keluarga berencana
  3. Jabatan Fungsional Perencana
  4. Jabatan Fungsional Penata keuangan pusat dan daerah

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



**BUPATI MOJOKERTO,**  
  
**ttd.**  
  
**IKFINA FAHMAWATI**

## b. Sumber Daya Dinas P2KBP2

Sumber daya pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto (Kondisi Per Desember Tahun 2024)

| NO | URAIAN                                                  | JUMLAH    |           | JUMLAH<br>SELURUHNYA |
|----|---------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------------------|
|    |                                                         | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |                      |
|    | 30 Orang terdiri dari                                   |           |           |                      |
|    | Es. II : 1, Es. : III 5, Es. IV : 1, JFT : 11, JFU : 12 |           |           |                      |
| 1  | Jumlah Pegawai PNS                                      | 13        | 17        | 30                   |
| 2  | Tingkat Pendidikan PNS                                  |           |           |                      |
|    | a. SD                                                   |           |           |                      |
|    | b. SLTP                                                 |           |           |                      |
|    | c. SLTA                                                 | 3         | 2         | 5                    |
|    | d. Diploma - 2 (D-2)                                    |           |           |                      |
|    | e. Diploma - 3 (D-3)                                    |           |           |                      |
|    | f. Sarjana Strata 1 (S-1)                               | 4         | 10        | 14                   |
|    | g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)                         | 5         | 5         | 10                   |
|    | h. Doktor (S-3)                                         | 1         |           | 1                    |
| 3  | Golongan Kepangkatan PNS                                | 13        | 17        | 30                   |
|    | a. I/a                                                  |           |           |                      |
|    | I/b                                                     |           |           |                      |
|    | I/c                                                     |           |           |                      |
|    | I/d                                                     |           |           |                      |
|    | b. II/a                                                 |           |           |                      |
|    | II/b                                                    |           |           |                      |
|    | II/c                                                    |           |           |                      |
|    | II/d                                                    | 3         | 1         | 4                    |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|          |                                  |           |           |           |
|----------|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
|          | c. III/a                         |           | 5         | 5         |
|          | III/b                            | 1         | 1         | 2         |
|          | III/c                            | 1         | 1         | 2         |
|          | III/d                            | 3         | 4         | 7         |
|          | d. IV/a                          | 3         | 5         | 8         |
|          | IV/b                             | 2         |           | 2         |
|          | IV/c                             |           |           |           |
|          | IV/d                             |           |           |           |
| <b>4</b> | <b>PNS menurut Agama</b>         | <b>13</b> | <b>17</b> | <b>30</b> |
|          | a. Islam                         | 13        | 17        | 30        |
|          | b. Protestan                     |           |           |           |
| <b>5</b> | <b>PNS Menurut Golongan Umur</b> | <b>12</b> | <b>17</b> | <b>30</b> |
|          | a. < 30 Tahun                    |           | 2         | 2         |
|          | b. 30 - 39 Tahun                 |           | 3         | 3         |
|          | c. 40 - 49 Tahun                 | 4         | 2         | 6         |
|          | d. 50 - 55 Tahun                 | 5         | 7         | 12        |
|          | e. > 55 Tahun                    | 4         | 3         | 7         |
| <b>6</b> | <b>Tipe Pegawai</b>              | <b>13</b> | <b>17</b> | <b>30</b> |
|          | a. Pejabat Struktural            | 4         | 3         | 7         |
|          | b. Jabatan Fungsional Tertentu   | 4         | 7         | 11        |
|          | c. Fungsional Umum               | 5         | 7         | 12        |

Berdasarkan data tersebut diatas, Formasi Jabatan Pejabat baik eselon II, III, dan IV Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sudah terpenuhi.

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

| Tabel 2.2                                                              |                      |                 |        |             |           |             |           |             |                  |        |             |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------|--------|-------------|
| Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pengendalian Penduduk |                      |                 |        |             |           |             |           |             |                  |        |             |
| Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto      |                      |                 |        |             |           |             |           |             |                  |        |             |
| (Kondisi per Januari 2024)                                             |                      |                 |        |             |           |             |           |             |                  |        |             |
| No                                                                     | Kode Bid./Barang     | Keadaan Awal    |        |             | Mutasi    |             |           |             | Keadaan Akhir    |        |             |
|                                                                        |                      | Januari Th 2023 |        |             | Berkurang |             | Bertambah |             | Januari Th. 2024 |        |             |
|                                                                        |                      | Jmh             | Satuan | Nilai (Rp.) | Jmh       | Nilai (Rp.) | Jmh       | Nilai (Rp.) | Jmh              | Satuan | Nilai (Rp.) |
| 1                                                                      | 2                    | 3               | 4      | 5           | 6         | 7           | 8         | 9           | 10               | 11     | 12          |
| 1                                                                      | Mobil Toyota Inova   | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | buah   | -           |
| 2                                                                      | Mobil Minibus        | -               | -      | -           | -         | -           | -         | -           | -                | -      | -           |
| 3                                                                      | Mobil Toyota Hiace   | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | -                | buah   | -           |
| 4                                                                      | Mobil Toyota Avanza  | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | buah   | -           |
| 5                                                                      | Mobil Suzuki APV     | -               | -      | -           | -         | -           | -         | -           | -                | -      | -           |
| 6                                                                      | Mobil Daihatsu Luxio | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | buah   | -           |
| 7                                                                      | Mobil Isuzu D-Max    | -               | -      | -           | -         | -           | -         | -           | -                | -      | -           |
| 8                                                                      | Mobil Nissan Navara  | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | buah   | -           |
| 9                                                                      | Mobil Pck Up Box     | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | buah   | -           |
| 10                                                                     | AC                   | 13              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 13               | Buah   | -           |
| 11                                                                     | Brankas              | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 12                                                                     | Filing Kabinet       | 8               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 8                | Buah   | -           |
| 13                                                                     | Almari Kaca          | 21              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 21               | Buah   | -           |
| 14                                                                     | Meja Tamu            | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |
| 15                                                                     | Meja Kerja           | 8               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 8                | Buah   | -           |
| 16                                                                     | Meja Rapat           | 15              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 15               | Buah   | -           |
| 17                                                                     | Meja Telpon          | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 18                                                                     | Kursi Lipat          | 54              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 54               | Buah   | -           |
| 19                                                                     | Almari Kayu          | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |
| 20                                                                     | Kursi Putar          | 10              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 10               | Buah   | -           |
| 21                                                                     | Kursi Busa           | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 22                                                                     | Kursi Kayu           | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 23                                                                     | Mesin Ketik          | -               | -      | -           | -         | -           | -         | -           | -                | -      | -           |
| 24                                                                     | Almari Besi          | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 25                                                                     | Komputer (PC)        | 9               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 9                | Buah   | -           |
| 26                                                                     | Kipas Angin          | 6               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 6                | Buah   | -           |
| 27                                                                     | PA                   | 15              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 15               | Buah   | -           |
| 28                                                                     | Scanner              | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |
| 29                                                                     | Kamera Digital       | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 30                                                                     | Meja Komputer        | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 31                                                                     | LCD Projector        | 23              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 23               | Buah   | -           |
| 32                                                                     | Laptop               | 72              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 72               | Buah   | -           |
| 33                                                                     | Printer              | 32              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 32               | Buah   | -           |
| 34                                                                     | Faximile             | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 35                                                                     | Vacuum Cleaner       | 1               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 1                | Buah   | -           |
| 36                                                                     | Lemari ES            | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |

| No | Kode Bid./Barang         | Keadaan Awal    |        |             | Mutasi    |             |           |             | Keadaan Akhir    |        |             |
|----|--------------------------|-----------------|--------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------------|--------|-------------|
|    |                          | Januari Th 2023 |        |             | Berkurang |             | Bertambah |             | Januari Th. 2024 |        |             |
|    |                          | Jmh             | Satuan | Nilai (Rp.) | Jmh       | Nilai (Rp.) | Jmh       | Nilai (Rp.) | Jmh              | Satuan | Nilai (Rp.) |
| 1  | 2                        | 3               | 4      | 5           | 6         | 7           | 8         | 9           | 10               | 11     | 12          |
| 37 | TV                       | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |
| 38 | Sepeda Motor Suzuki      | 153             | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 153              | Buah   | -           |
| 39 | Sepeda Motor Honda Vario | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |
| 40 | Sepeda Motor Yamaha Mio  | 40              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 40               | Buah   | -           |
| 41 | Sepeda Motor Yamaha BSWT | 10              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 10               | Buah   | -           |
| 42 | Handycam                 | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |
| 43 | Smart Phone              | 57              | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 57               | Buah   | -           |
| 44 | Wifi                     | 4               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 4                | Buah   | -           |
| 45 | Jaringan Telephone       | 2               | Buah   | -           | -         | -           | -         | -           | 2                | Buah   | -           |

sumber data, DP2KBP2 tahun 2025.

Adapun barang yang ada di atas semua dalam kondisi masih layak pakai atau dalam keadaan baik

### 2.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Renstra Periode 2021-2026, DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto melaksanakan reviu Renstra pada akhir tahun 2023 yang mengakibatkan adanya perubahan pada sasaran strategis beserta indikator kinerja sasarnya.

#### A. Renstra Induk

Capaian Kinerja sasaran strategis dengan 4 (indikator) indikator kinerja sasaran pada DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dari tahun 2021 sampai dengan 2023 rata-rata dapat tercapai. Ada perbedaan sasaran strategis di tahun 2021 pada DP2KBP2, Capaian kinerja indikator sasaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1). Sasaran Strategis 1. : “Meningkatnya ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak” dengan indikator :
  - a. Presentasepenurunankenakalan remaja
  - b. Presentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan
- 2). Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan” dengan indikator :
  - a. Presentasekeluarga sejahtera

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

- 3). Sasaran Strategis 3 : “Meningkatnya Kepesertaan Gender” dengan indikator :
  - a. Indeks Pembangunan Gender
- 4). Sasaran Strategis 4 : “Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana” dengan indikator :
  - a. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB Aktif
- 5). Sasaran Strategis 5 : “Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana” dengan indikator :
  - a. Prevalensi Peserta KB Aktif
  - b. Presentase Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana yang Aktif
  - c. Presentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan
- 6). Sasaran Strategis 6 : “Meningkatnya Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga” dengan indikator :
  - a. Presentase Kelompok Ketahanan Keluarga, Kesejahteraan Keluarga, Serta Perlindungan Perempuan dan Anak yang Aktif
  - b. Presentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
  - c. Presentase Lintas Sektor yang Melaksanakan PPRG dan PUHA
- 7). Sasaran Strategis 7 : “Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan” dengan indikator :
  - a. Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah
  - b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - c. Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

Sedangkangkan untuk tahun 2022 – 2023 Capaian kinerja indikator sasaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1). Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana” dengan indikator :
  - a. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
  - b. Kabupaten Layak Anak (KLA)
  - c. Prevalensi KB Aktif
  - d. Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan

## Keluarga

- e. Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan
  - f. Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana
  - g. Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif
  - h. Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender
  - i. Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan
  - j. Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa
  - k. Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak
  - l. Persentase Kecamatan Layak Anak
  - m. Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak
  - n. Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan
- 2). Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel” dengan indikator :
- a. Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target
  - b. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
  - c. Indeks Profesionalitas ASN
  - d. Nilai SAKIP Perangkat Daerah
  - e. Nilai RB Perangkat Daerah

## B. Reviu Renstra

Pada Reviu Renstra, capaian Kinerja sasaran strategis dengan 8 (tiga) indikator kinerja sasaran pada DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto pada tahun 2024 rata-rata dapat tercapai. Capaian kinerja indikator sasaran DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

- 1). Sasaran Strategis 1 : “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan

anak serta keluarga berencana” dengan indikator :

- a. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
- b. Kabupaten Layak Anak (KLA)
- c. Prevalensi KB Aktif
- d. Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

2). Sasaran Strategis 2 : “Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dengan indikator :

- a. Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
- b. Indeks Profesionalitas ASN
- c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

3). Sasaran Strategis 3 : “Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pengembangan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah” dengan indikator :

- a. Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan  
Selengkapnya pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan beserta rincian alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto, baik berdasarkan Renstra Induk maupun Reviu Renstra adalah sebagaimana terinci dalam Tabel 2.3 dan Tabel 2.4 berikut:

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**Tabel 2.3 (Tabel T-C.23 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)**  
**Pencapaian Kinerja Layanan DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024**

| No                                                                            | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah               | Target NSPK | Target IKK | SPM | Target Indikator Lainnya | Realisasi 2020 | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke- |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun Ke- |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-----|--------------------------|----------------|-------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|
|                                                                               |                                                                          |             |            |     |                          |                | 2021                                      | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                        | 2022 | 2023 | 2024 | 2021                         | 2022 | 2023 | 2024 |
| RENSTRA INDUK                                                                 |                                                                          |             |            |     |                          |                |                                           |      |      |      |                             |      |      |      |                              |      |      |      |
| Sasaran : Meningkatnya ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak |                                                                          |             |            |     |                          |                |                                           |      |      |      |                             |      |      |      |                              |      |      |      |
| 1                                                                             | Presentase penurunan kenakalan remaja                                    | n/a         | n/a        | n/a | n/a                      | n/a            | 13,27%                                    | n/a  | n/a  | n/a  | 13,27%                      | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                         | n/a  | n/a  | n/a  |
| 2                                                                             | Presentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan | n/a         | n/a        | n/a | n/a                      | n/a            | 100%                                      | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                        | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                         | n/a  | n/a  | n/a  |
| Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan                         |                                                                          |             |            |     |                          |                |                                           |      |      |      |                             |      |      |      |                              |      |      |      |
| 3                                                                             | Presentase keluarga sejahtera                                            | n/a         | n/a        | n/a | n/a                      | n/a            | 18,60%                                    | n/a  | n/a  | n/a  | 18,60%                      | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                         | n/a  | n/a  | n/a  |
| Sasaran : Meningkatnya kesetaraan gender                                      |                                                                          |             |            |     |                          |                |                                           |      |      |      |                             |      |      |      |                              |      |      |      |
| 4                                                                             | Indeks Pembangunan Gender                                                | n/a         | n/a        | n/a | n/a                      | n/a            | 91,10%                                    | n/a  | n/a  | n/a  | 91,10%                      | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                         | n/a  | n/a  | n/a  |
| Sasaran : Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana                         |                                                                          |             |            |     |                          |                |                                           |      |      |      |                             |      |      |      |                              |      |      |      |
| 5                                                                             | Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif          | n/a         | n/a        | n/a | n/a                      | n/a            | 80,67%                                    | n/a  | n/a  | n/a  | 80,67%                      | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                         | n/a  | n/a  | n/a  |
| Sasaran : Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana                         |                                                                          |             |            |     |                          |                |                                           |      |      |      |                             |      |      |      |                              |      |      |      |
| 6                                                                             | Prevalensi Peserta KB Aktif                                              | n/a         | n/a        | n/a | n/a                      | n/a            | 80,67%                                    | n/a  | n/a  | n/a  | 80,67%                      | n/a  | n/a  | n/a  | 100%                         | n/a  | n/a  | n/a  |

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                             |                                                                                                                 |     |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |      |     |     |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|-----------|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| 7                                                                           | Presentase Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana yang Aktif                                                   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 62,23%    | n/a | n/a | n/a | 62,23%    | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |
| 8                                                                           | Presentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan                                        | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100%      | n/a | n/a | n/a | 100%      | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |
| <b>Sasaran : Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga</b> |                                                                                                                 |     |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |      |     |     |     |
| 9                                                                           | Presentase kelompok ketahanan keluarga, kesejahteraan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak yang aktif | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 73,27%    | n/a | n/a | n/a | 73,27%    | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |
| 10                                                                          | Presentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif                                    | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 97,75%    | n/a | n/a | n/a | 97,75%    | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |
| 11                                                                          | Presentase lintas sektor yang melaksanakan PPRG dan PUHA                                                        | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 21,88%    | n/a | n/a | n/a | 21,88%    | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |
| <b>Sasaran : Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan</b>                     |                                                                                                                 |     |     |     |     |     |           |     |     |     |           |     |     |     |      |     |     |     |
| 12                                                                          | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                                                      | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 72,50%    | n/a | n/a | n/a | 72,50%    | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |
| 13                                                                          | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                                                    | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 83,19 (A) | n/a | n/a | n/a | 83,19 (A) | n/a | n/a | n/a | 100% | n/a | n/a | n/a |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                  |                                                                              |     |     |     |     |     |        |           |           |     |        |           |            |     |      |      |        |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----------|-----------|-----|--------|-----------|------------|-----|------|------|--------|-----|
| 14                                                                                               | Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah                    | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 80,00% | n/a       | n/a       | n/a | 80,00% | n/a       | n/a        | n/a | 100% | n/a  | n/a    | n/a |
| <b>Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana</b> |                                                                              |     |     |     |     |     |        |           |           |     |        |           |            |     |      |      |        |     |
| 15                                                                                               | Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)                                    | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | APE Madya | APE Madya | n/a | n/a    | APE Madya | APE Nindya | n/a | n/a  | 100% | 100%   | n/a |
| 16                                                                                               | Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)                                       | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | KLA Madya | KLA Madya | n/a | n/a    | KLA Madya | KLA Madya  | n/a | n/a  | 100% | 100%   | n/a |
| 17                                                                                               | Prevalensi KB Aktif                                                          | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | 80,56%    | 80,80%    | n/a | n/a    | 80,73%    | 80,23%     | n/a | n/a  | 100% | 99,29% | n/a |
| 18                                                                                               | Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | 72,96%    | 72,00%    | n/a | n/a    | 72,96%    | 72%        | n/a | n/a  | 100% | 100%   | n/a |
| 19                                                                                               | Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan    | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | 100%      | 100%      | n/a | n/a    | 100%      | 100%       | n/a | n/a  | 100% | 100%   | n/a |
| 20                                                                                               | Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana                 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | 80,56%    | 80,80%    | n/a | n/a    | 80,73%    | 80,23%     | n/a | n/a  | 100% | 99,29% | n/a |
| 21                                                                                               | Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a    | 97,81%    | 95,49%    | n/a | n/a    | 97,81%    | 96,96%     | n/a | n/a  | 100% | 100%   | n/a |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                   |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |        |        |     |     |        |       |     |     |      |      |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--------|-----|-----|--------|-------|-----|-----|------|------|-----|
| 22                                                                                                | Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender                                         | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 80,36% | 66,67% | n/a | n/a | 80,36% | 73,68 | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| 23                                                                                                | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan                         | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 100%   | 100%   | n/a | n/a | 100%   | 100%  | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| 24                                                                                                | Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 38,89% | 100%   | n/a | n/a | 100%   | 100%  | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| 25                                                                                                | Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak                                  | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 91,67% | 100%   | n/a | n/a | 100%   | 100%  | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| 26                                                                                                | Persentase Kecamatan Layak Anak                                                             | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 33,33% | 100%   | n/a | n/a | 100%   | 100%  | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| 27                                                                                                | Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak                                                        | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 8,55%  | 72,37% | n/a | n/a | 82,23% | 100%  | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| 28                                                                                                | Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan      | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 40,74% | 100%   | n/a | n/a | 100%   | 100%  | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |
| <b>Sasaran : Meningkatkan Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b> |                                                                                             |     |     |     |     |     |     |        |        |     |     |        |       |     |     |      |      |     |
| 29                                                                                                | Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target                   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 90%    | 80%    | n/a | n/a | 90%    | 90%   | n/a | n/a | 100% | 100% | n/a |

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                        |                                                                             |     |     |     |     |     |     |           |                |            |     |           |                |            |     |        |      |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|----------------|------------|-----|-----------|----------------|------------|-----|--------|------|--------|
| 30                                                                                                     | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah                              | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 85%       | 84,67%         | n/a        | n/a | 84,67%    | 95,93%         | n/a        | n/a | 99,61% | 100% | n/a    |
| 31                                                                                                     | Indeks Profesionlitas ASN                                                   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 65,39     | 58,43 (Rendah) | n/a        | n/a | 58,44     | 86,15 (Tinggi) | n/a        | n/a | 89,38% | 100% | n/a    |
| 32                                                                                                     | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                                | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 83,78 (A) | 83,87 (A)      | n/a        | n/a | 83,87 (A) | 84,42 (A)      | n/a        | n/a | 100%   | 100% | n/a    |
| 33                                                                                                     | Nilai RB Perangkat Daerah                                                   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 51        | 82,62          | n/a        | n/a | 82,62     | 82,62          | n/a        | n/a | 100%   | 100% | n/a    |
| <b>Sasaran : Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah</b> |                                                                             |     |     |     |     |     |     |           |                |            |     |           |                |            |     |        |      |        |
| 34                                                                                                     | Jumlah Inovasi yang Terintegrasi dan Tersosialisasi Serta Berkelanjutan     | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 Inovasi | 1 Inovasi      | n/a        | n/a | 1 Inovasi | 1 Inovasi      | n/a        | n/a | 50%    | 100% | n/a    |
| <b>REVIU RENSTRA</b>                                                                                   |                                                                             |     |     |     |     |     |     |           |                |            |     |           |                |            |     |        |      |        |
| <b>Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana</b>       |                                                                             |     |     |     |     |     |     |           |                |            |     |           |                |            |     |        |      |        |
| 35                                                                                                     | Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)                                   | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a       | n/a            | APE Nindya | n/a | n/a       | n/a            | APE Nindya | n/a | n/a    | n/a  | 100%   |
| 36                                                                                                     | Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)                                      | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a       | n/a            | KLA Nindya | n/a | n/a       | n/a            | KLA Nindya | n/a | n/a    | n/a  | 100%   |
| 37                                                                                                     | Prevalensi KB Aktif                                                         | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a       | n/a            | 80,58%     | n/a | n/a       | n/a            | 80,06%     | n/a | n/a    | n/a  | 99,35% |
| 38                                                                                                     | Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a       | n/a            | 72,98%     | n/a | n/a       | n/a            | 73,30%     | n/a | n/a    | n/a  | 100%   |
| <b>Sasaran : Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel</b>      |                                                                             |     |     |     |     |     |     |           |                |            |     |           |                |            |     |        |      |        |

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                        |                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|-------------------|-----|-----|-----|------|
| 39                                                                                                     | Nilai SAKIP                                                                 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 84,50<br>(A)      | n/a | n/a | n/a | 84,55(A)          | n/a | n/a | n/a | 100% |
| 40                                                                                                     | Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah                              | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 96,50%            | n/a | n/a | n/a | 96,22%            | n/a | n/a | n/a | 100% |
| 41                                                                                                     | IP ASN Perangkat Daerah                                                     | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 86,20<br>(Tinggi) | n/a | n/a | n/a | 85,45<br>(Tinggi) | n/a | n/a | n/a | 100% |
| <b>Sasaran : Optimalnya Kualitas Pelayanan Melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah</b> |                                                                             |     |     |     |     |     |     |     |     |                   |     |     |     |                   |     |     |     |      |
| 42                                                                                                     | Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 1<br>Inovasi      | n/a | n/a | n/a | 1<br>Inovasi      | n/a | n/a | n/a | 100% |

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto bukan merupakan perangkat daerah pengampu SPM.

Catatan :  
 1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Berdasarkan tabel 2.3, secara mendetail dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

Dari tabel di atas jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 13 (tiga belas) sasaran dan 42 (empat puluh) indikator kinerja dengan kategori sasaran berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran Program Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun dari tahun 2021 - 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

#### A. RENSTRA INDUK

Pada Renstra Induk DP2KBP2 2021-2026, sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

Sasaran kinerja Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023

1. Meningkatnya ketahanan dan kualitas perlindungan perempuan dan anak dengan tolak ukur berupa 2 (dua) indikator, yaitu **Presentase penurunan kenakalan remaja, dan Presentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan**. Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 13,27%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 13,27% .
2. Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perempuan dengan tolak ukur serupa 1 (satu) indikator yaitu **Presentase keluarga sejahtera**, Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100% .
3. Meningkatnya kesetaraan gender dengan tolak ukur berupa 1 (satu) indikator yaitu **Indeks Pembangunan Gender**, Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,10%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 91,10%.
4. Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana dengan tolak ukur berupa 1 (satu) indikator yaitu **Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi**

- peserta KB aktif**, Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,67%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,670%.
5. Meningkatnya kepesertaan Keluarga Berencana dengan tolak ukur berupa 3 (tiga) indikator yaitu **Prevalensi Peserta KB Aktif**, Secara kinerja, pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,67%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,670%, **Presentase Penyuluh dan Petugas Keluarga Berencana yang Aktif**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 62,23%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 62,23 %, dan **Presentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang Dilaporkan** Secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %.
  6. Meningkatnya ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga dengan tolak ukur berupa 3 (tiga) indikator yaitu **Presentase kelompok ketahanan keluarga**, kesejahteraan keluarga serta perlindungan perempuan dan anak yang aktif, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 73,27%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 73,27 %, **Presentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,75%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 97,75 %, dan **Presentase lintas sektor yang melaksanakan PPRG dan PUHA**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 21,88%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 21,88 %.
  7. Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan dengan tolak ukur berupa 3 (tiga) indikator yaitu **Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah**, secara kinerja

pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,50%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 72,50 %, **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,19 (A) dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 83,19 (A), dan **Presentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,00 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,00 %.

8. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana, dengan tolak ukur berupa 14 (empat belas) indikator yang dilaksanakan di tahun 2022 dan 2023 yaitu **Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 dan tahun 2023 mengalami kenaikan yang terjadi di tahun 2023 sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu APE Madya dengan nilai realisasi terhadap target kinerja tahun 2022 APE Madya dan di tahun 2023 nilai APE naik menjadi APE Nindya, **Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)** secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 dan tahun 2023 penilaian KLA tidak ada kenaikan dari target yang ditetapkan yaitu KLA Madya dengan nilai realisasi terhadap target kinerja KLA Madya atau sesuai target, **Prevalensi KB Aktif**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi tahun 2022 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,56 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,80 %, sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan dari target 80,73 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,23 %, terealisasi sebesar 99,27 % dikarenakan Jumlah PA (Peserta Aktif) lebih rendah dari Tahun 2023 (menopause, meninggal, pindah domisili, cerai) dan Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) lebih banyak dari Tahun 2023, **Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis

DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,96 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 72,96 %, sedangkan tahun 2023 secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 72,00 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 72,00 %, **Persentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang di Laporkan**, target tahun 2022 dan tahun 2023 sama 100 %, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 dan 2023 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, **Persentase PUS yang Mendapatkan Pelayanan Keluarga Berencana**, tahun 2022 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,56 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,80 %, sedangkan di tahun 2023 mengalami penurunan dari target 80,73 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,23 %, terealisasi sebesar 99,27 % dikarenakan Jumlah PA (Peserta Aktif) lebih rendah dari Tahun 2023 (menopause, meninggal, pindah domisili, cerai) dan Jumlah PUS (Pasangan Usia Subur) lebih banyak dari Tahun 2023, Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,81 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 97,81 %, Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,36 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,36 %, **Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,81 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 97,81 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 95,49 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 96,96 %,

**Persentase Kelembagaan Daerah yang Responsif Gender**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 80,36 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 80,36 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 66,67 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 73,68 %, **Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapat Layanan Bantuan**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, **Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 38,89 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, **Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 91,67 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, **Persentase Kecamatan Layak Anak**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 33,33 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, **Persentase Desa/Kelurahan Layak Anak**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang

ditetapkan yaitu sebesar 8,55 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 82,23 % dari target 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, **Persentase Korban Anak dan ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum) yang Mendapatkan Layanan**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 40,74 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 100 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100 %.

9. Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan tolak ukur berupa 4 (empat) indikator yang di laksanakan di tahun 2022 dan 2023 yaitu **Persentase Indikator Program Perangkat Daerah yang Tercapai Sesuai Target**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 90 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 90 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 80 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 90%. **Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 99,61% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 85 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 84,67 %, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 84,67 % dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 95,93%, dalam hal ini realisasi kinerja tahun 2023 mengalami kenaikan di banding tahun 2022 yang capaian realisasinya tidak sampai 100 % di karenakan bulan salur kegiatan DAK non fisik masuk di triwulan II tepatnya di bulan April 2023 sehingga berpengaruh terhadap realisasi kinerja dan realisasi anggaran DP2KBP2, **Indeks Profesionalitas ASN**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 89,38% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 65,39 dengan persentase realisasi terhadap target

kinerja sebesar 64,43, sedangkan di tahun 2023 realisasi tercapai 100 % dari target 58,44 dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 86,15, dalam hal ini realisasi kinerja tahun 2022 tidak memenuhi target di karenakan ada beberapa pegawai yang belum mengikuti pelatihan (pelatihan fungsional, sosialisasi dll) dan workshop), **Nilai SAKIP Perangkat Daerah**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 83,78 (A) dengan nilai realisasi terhadap target kinerja sebesar 83,87 (A), sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 83,87 (A) dengan nilai terhadap target kinerja sebesar 84,42 (A), **Nilai RB Perangkat Daerah**, secara kinerja pencapaian sasaran strategis DP2KBP2 tahun 2022 terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 51 dengan nilai realisasi terhadap target kinerja sebesar 82,62, sedangkan di tahun 2023 realisasi tetap sama, tercapai 100 % dari target 82,62 dengan nilai terhadap target kinerja sebesar 82,62.

## **B. REVIU RENSTRA**

Pada Renstra Induk DP2KBP2 2021-2026, sasaran strategis pada tahun 2024 yang hendak dicapai yaitu “Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana” diperoleh melalui pencapaian Indikator Kinerja Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE), Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA), Prevalensi KB Aktif, serta Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Adapun realisasi sasaran strategis pada tahun 2024 sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%, dengan persentase realisasi terhadap target kinerja sebesar 100% meskipun ada satu indikator yang tidak bisa mencapai target yang telah ditetapkan telah terjadi penurunan sedikit yaitu 99,35% . Pada 4 indikator yang sudah ditetapkan, untuk realisasi kinerjanya pada tahun 2024 sebagian indikator di pakai di tahun 2022 dan 2023 rata – rata capaian kinerja 100%. Kendati demikian, walaupun terdapat persamaan indikator, apabila hendak dibandingkan realisasi dan capaiannya tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Dari 4 indikator realisasi capaian tiap – tiap indikator telah mencapai 100%.

Secara mendetail, dapat dijelaskan pencapaian tiap indikator kinerja sebagai berikut:

**1. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)**

Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Ninya dan tingkat capaian sebesar 100%.

Perhitungan Evaluasi Anugerah Ekapraya (APE) dengan nilai APE Nindya diperoleh dari 3 komponen kunci :

**a) Pelembagaan PUG** terdiri dari :

- a. Regulasi/Kebijakan tentang Penyelenggaraan PUG, di buktikan dengan SK Fokal Point, **Perda Nomor 1 Tahun 2021** tentang Pengarusutamaan Gender (PUG), **Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020** tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah.
- b. Kebijakan, di buktikan dengan RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.
- c. Kelembagaan, telah terbentuk **UPTD PPA** dengan Peraturan Bupati No. 57 Tahun 2023
- d. Kelompok Pokja PUG, **Tim driver PUG, Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG**
- e. **Sumber Daya Manusia yang terlatih PUG** (SDM Perencana, SDM Teknis, SDM Pemantau, Evaluasi dan Pelaporan, SDM APIP, SDM Bidang Hukum, SDM Aparat Penegak Hukum dan **Internalisasi PUG** serta Fasilitas yang memadai
- f. Sistem Data Terpilah Gender data diperoleh dari tiap Perangkat Daerah berupa **Satu Data Palapa** (Data Statistik yang terpilah dan Profil Gender)

**b) Penyelenggaraan PUG** terdiri dari :

- a. Perencanaan dibuktikan dengan dokumen ARG (penyusunan GAP, GBS, TOR) tiap Perangkat Daerah, adanya modul dan panduan untuk menyusun dokumen ARG, Dokumen ARG 25 % dari anggaran tahun n – 1
- b. Penganggaran PUG dibuktikan dengan issue Gender dalam penganggaran PUG dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial (Pendidikan, Kesehatan,

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim), Ekonomi dan Bidang Lainnya mulai pada RPJMD, Renstra, Renja, KUA – PPAS, RKA Perangkat Daerah.

- c. Pelaksanaan dibuktikan dengan Partisipasi Masyarakat, Dunia Usaha, Media dan Akademisi Jejaring sebagai kontrol, pengawas, mitra kerja pelayanan pelaksanaan PUG (Puspa, CSR, LSM, Akademisi) di libatkan dalam pelaksanaan Pengarus utamaan Gender serta ketersediaan sarana dan prasarana yang responsive Gender dan juga pelaksanaan (advokasi dan sosialisasi, bimtek, pembinaan, pendampingan, pengawasan dan Evaluasi) Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA)
- d. Pemantauan, melibatkan seluruh Perangkat Daerah dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang Responsif Gender
- e. Evaluasi dilakukan oleh Kepala Daerah dalam bentuk Evaluasi Dokumen ARG Perangkat Daerah, Desk PPRG.
- f. Pengawasan dilakukan oleh Inspektorat Kab. Mojokerto berupa Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLLHP) terhadap Dokumen Anggaran Responsif Gender.
- g. Pelaporan berupa Lakip, LKPJ, LPPD dan Laporan Pelaksanaan PUG yang disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui DP3AK Prov. Jatim.

**c) Inovasi PUG meliputi:**

Berupa duplikasi/replikasi kearifan Lokal atau Modifikasi merupakan bentuk kebaruan (ide/gagasan baru) terintegrasi dengan layanan sistem lain, berkelanjutan, yang dicapai dengan cara kreatif, memiliki dampak dan direplikasi sebagai best practice. (Inovasi Kasat Mata, Inovasi labujari, Inovasi Darisasoo, Inovasi Mensasoo.

**2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)**

Kabupaten Layak Anak (KLA), tahun 2024 terealisasi dengan Nilai APE Nindya dan tingkat capaian sebesar 100%.

Perhitungan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan nilai KLA Nindya diperoleh berdasarkan 5 klaster :

1. Hak Sipil dan Kebebasan, di buktikan dengan pembuatan akte seluruh anak di Kabupaten Mojokerto (dispenduk capil), Forum anak desa, kecamatan,

kabupaten (DP2KBP2), Tersedianya pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), Pengawasan penggunaan internet bagi anak (pengawasan tim cyber dari Polres/kominfo), KIE bagi anak disabilitas (Dinsos), penyediaan KIA (dispenduk capil).

2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, dibuktikan dengan pengasuhan alternatif (lingkungan keluarga dan yayasan untuk anak terlantar), Pemenuhan tumbuh kembang ABH (Anak Berhadapan Dengan Hukum), Pelatihan pola asuh anak, dukungan akreditasi LKSA (Lembaga Lkesejahteraan Sosial Anak) Villa durian do'a, Pendidikan pra nikah dilakukan Kemenak dan DP2KBP2.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, adanya puskesmas ramah anak, ruang laktasi di semua fasilitas umum, fasilitasi sarpras posyandu, teredianya air bersih, ruang terbuka hijau, Perventif AKI dan Anak (Dinas Kesehatan)
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Ruang dan Kegiatan Budaya, di buktikan dengan wajib belajar 9 tahun, Pendidikan inklusi, Pusat kreatifitas anak, Sarpras ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Mewujudkan Sekolah Ramah Anak (SK Sekolah Ramah Anak), Beasiswa, Memfasilitasi SKB, Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah tanpa kekerasan
5. Perlindungan Khusus, adanya fasilitasi P2TP2A, program pencegahan tindak kekerasan yang di lakukan oleh DP2KBP2 dan Dinas Sosial, Perlindungan dan mitigasi bencana bagi anak (Dinsos dan BPBD), akses kartu penyandang disabilitas (dari dinsos).

### 3. Prevalensi KB Aktif

Prevalensi KB Aktif, tahun 2024 terealisasi sebesar 80,06 % dan tingkat capaian sebesar 99,70%.

Perhitungan Prevalensi KB Aktif sebesar 80,06 % diperoleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Peserta Aktif (PA)}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$$

**PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF  
DI KABUPATEN MOJOKERTO BULAN DESEMBER 2024**

| NO | KECAMATAN     | PPM     | PUS     | ALAT KONTRASEPSI |        |     |       |        |        |        | JUMLAH  | % THDP PPM | MKJP   | %MKJP | PREV. |
|----|---------------|---------|---------|------------------|--------|-----|-------|--------|--------|--------|---------|------------|--------|-------|-------|
|    |               | 2024    |         | IUD              | MOW    | MOP | KD    | IMP    | STK    | PIL    |         |            |        |       |       |
| 1  | JATIREJO      | 4.232   | 7.233   | 782              | 616    | 2   | 165   | 649    | 2.947  | 762    | 5.923   | 139,96     | 2.049  | 34,59 | 81,89 |
| 2  | GONDANG       | 5.050   | 10.137  | 1.734            | 735    | 30  | 8     | 1.951  | 2.796  | 956    | 8.210   | 162,57     | 4.450  | 54,20 | 80,99 |
| 3  | PACET         | 6.924   | 13.343  | 2.066            | 653    | 12  | 14    | 2.241  | 4.528  | 1.277  | 10.791  | 155,85     | 4.972  | 46,08 | 80,87 |
| 4  | TRAWAS        | 3.191   | 6.154   | 429              | 407    | 3   | 34    | 667    | 2.751  | 602    | 4.893   | 153,34     | 1.506  | 30,78 | 79,51 |
| 5  | NGORO         | 9.451   | 17.074  | 1.528            | 1.121  | 11  | 363   | 1.352  | 6.545  | 2.868  | 13.788  | 145,89     | 4.012  | 29,10 | 80,75 |
| 6  | PUNGGING      | 8.496   | 14.112  | 1.119            | 398    | 8   | 132   | 540    | 7.620  | 1.081  | 10.898  | 128,27     | 2.065  | 18,95 | 77,23 |
| 7  | KUTOREJO      | 6.769   | 13.921  | 528              | 382    | 5   | 205   | 1.121  | 5.422  | 4.090  | 11.753  | 173,63     | 2.036  | 17,32 | 84,43 |
| 8  | MOJOSARI      | 8.583   | 12.696  | 2.753            | 1.150  | 15  | 471   | 1.289  | 3.157  | 1.251  | 10.086  | 117,51     | 5.207  | 51,63 | 79,44 |
| 9  | DLANGGU       | 6.657   | 12.491  | 1.590            | 1.063  | 48  | 64    | 1.576  | 4.712  | 1.015  | 10.068  | 151,24     | 4.277  | 42,48 | 80,60 |
| 10 | BANGSAL       | 5.572   | 9.717   | 642              | 441    | 6   | 481   | 735    | 4.392  | 1.171  | 7.868   | 141,21     | 1.824  | 23,18 | 80,97 |
| 11 | PURI          | 8.452   | 15.800  | 1.308            | 740    | 17  | 761   | 2.012  | 5.128  | 2.790  | 12.756  | 150,92     | 4.077  | 31,96 | 80,73 |
| 12 | TROWULAN      | 8.691   | 12.717  | 600              | 580    | 11  | 89    | 744    | 5.324  | 1.583  | 8.931   | 102,76     | 1.935  | 21,67 | 70,23 |
| 13 | SOOKO         | 8.362   | 14.806  | 1.981            | 846    | 4   | 378   | 900    | 6.445  | 1.321  | 11.875  | 142,01     | 3.731  | 31,42 | 80,20 |
| 14 | GEDEG         | 8.551   | 16.670  | 1.953            | 926    | 22  | 638   | 1.781  | 5.777  | 2.424  | 13.581  | 158,09     | 4.682  | 34,64 | 81,09 |
| 15 | KEMLAGI       | 6.358   | 11.703  | 1.021            | 910    | 60  | 242   | 1.383  | 5.024  | 849    | 9.489   | 149,25     | 3.374  | 35,56 | 81,08 |
| 16 | JETIS         | 10.447  | 19.340  | 1.049            | 660    | 61  | 623   | 1.121  | 9.404  | 2.321  | 15.239  | 145,87     | 2.891  | 18,97 | 78,80 |
| 17 | DAWARBLANDONG | 5.296   | 8.880   | 347              | 361    | 8   | 113   | 829    | 4.717  | 1.110  | 7.485   | 141,33     | 1.545  | 20,64 | 84,29 |
| 18 | MOJOANYAR     | 4.629   | 8.890   | 962              | 490    | 10  | 119   | 820    | 3.635  | 1.075  | 7.111   | 153,62     | 2.282  | 32,09 | 79,99 |
|    | KABUPATEN     | 125.711 | 225.684 | 22.392           | 12.479 | 333 | 4.897 | 21.711 | 90.324 | 28.546 | 180.682 | 143,73     | 56.915 | 31,50 | 80,06 |

**Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)**

#### 4. Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga terealisasi sebesar 73,30 %.

Perhitungan Persentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga sebesar 73,30 % di peroleh dari :

$$\frac{\text{Jumlah Keluarga yang ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}}{\text{Jumlah sasaran kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga}} \times 100\%$$

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

**PROSENTASE KELOMPOK KETAHANAN KELUARGA  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA YANG AKTIF  
DI KABUPATEN MOJOKERTO**

| KECAMATAN     | JUMLAH SASARAN |               |              |              |            | REKAP<br>JUMLAH<br>SASARAN | JUMLAH YANG IKUT KEGIATAN |               |              |              |            | REKAP<br>JUMLAH<br>YANG<br>IKUT<br>KEGIATAN | PROSENTASE   |
|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------------------------|---------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|---------------------------------------------|--------------|
|               | BKB            | BKR           | BKL          | PIK R        | UPPKA      |                            | BKB                       | BKR           | BKL          | PIK R        | UPPKA      |                                             |              |
| JATIREJO      | 3.342          | 329           | 539          | 125          | 20         | 4.355                      | 2.562                     | 236           | 437          | 234          | 20         | 3.489                                       | 80,11        |
| GONDANG       | 3.176          | 417           | 396          | 275          | 20         | 4.284                      | 2.430                     | 385           | 344          | 50           | 20         | 3.229                                       | 75,37        |
| PACET         | 4.442          | 5.884         | 487          | 125          | 34         | 10.972                     | 3.389                     | 4.698         | 473          | 161          | 34         | 8.755                                       | 79,79        |
| TRAWAS        | 1.935          | 282           | 159          | 150          | 37         | 2.563                      | 1.500                     | 125           | 79           | 110          | 34         | 1.848                                       | 72,10        |
| NGORO         | 6.074          | 6.338         | 178          | 125          | 10         | 12.725                     | 4.676                     | 4.322         | 164          | 105          | 10         | 9.277                                       | 72,90        |
| PUNGGING      | 4.928          | 1.852         | 1.073        | 125          | 55         | 8.033                      | 3.780                     | 520           | 491          | 39           | 51         | 4.881                                       | 60,76        |
| KUTOREJO      | 4.511          | 2.441         | 821          | 125          | 55         | 7.953                      | 3.478                     | 843           | 573          | 91           | 52         | 5.037                                       | 63,33        |
| MOJOSARI      | 4.237          | 1.322         | 1.121        | 150          | 25         | 6.855                      | 3.257                     | 779           | 561          | 91           | 23         | 4.711                                       | 68,72        |
| DLANGGU       | 4.035          | 1.521         | 570          | 100          | 40         | 6.266                      | 3.097                     | 1.009         | 413          | 152          | 40         | 4.711                                       | 75,18        |
| BANGSAL       | 3.339          | 318           | 370          | 150          | 21         | 4.198                      | 2.535                     | 247           | 267          | 120          | 21         | 3.190                                       | 75,99        |
| PURI          | 5.165          | 667           | 540          | 150          | 17         | 6.539                      | 3.956                     | 535           | 456          | 75           | 17         | 5.039                                       | 77,06        |
| TROWULAN      | 5.098          | 651           | 570          | 325          | 14         | 6.658                      | 3.911                     | 422           | 543          | 260          | 14         | 5.150                                       | 77,35        |
| SOOKO         | 5.225          | 370           | 615          | 125          | 22         | 6.357                      | 3.983                     | 322           | 509          | 104          | 19         | 4.937                                       | 77,66        |
| GEDEG         | 3.492          | 2.431         | 1.019        | 150          | 89         | 7.181                      | 2.700                     | 534           | 513          | 69           | 77         | 3.893                                       | 54,21        |
| KEMLAGI       | 4.171          | 108           | 152          | 150          | 21         | 4.602                      | 3.199                     | 91            | 110          | 69           | 21         | 3.490                                       | 75,84        |
| JETIS         | 5.209          | 129           | 67           | 100          | 19         | 5.524                      | 4.026                     | 126           | 55           | 80           | 14         | 4.301                                       | 77,86        |
| DAWARBLANDONG | 3.353          | 646           | 807          | 500          | 385        | 5.691                      | 2.573                     | 585           | 791          | 700          | 380        | 5.029                                       | 88,37        |
| MOJOANYAR     | 3.721          | 395           | 435          | 175          | 55         | 4.781                      | 2.855                     | 324           | 361          | 130          | 49         | 3.719                                       | 77,79        |
| <b>JUMLAH</b> | <b>75.453</b>  | <b>26.101</b> | <b>9.919</b> | <b>3.125</b> | <b>939</b> | <b>115.537</b>             | <b>57.906</b>             | <b>16.103</b> | <b>7.140</b> | <b>2.640</b> | <b>896</b> | <b>84.686</b>                               | <b>73,30</b> |

*Sumber Data : Aplikasi SIGA (Sistem Informasi Keluarga)*

Selanjutnya, pencapaian kinerja layanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto didukung dengan alokasi Anggaran yang tepat agar layanan dapat berjalan dengan optimal. Berikut kami sajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan untuk mendukung kinerja pelayanan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2024.

Tabel 2.4 (Tabel T-C.24 dalam Lampiran Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan DP2KBP2 Tahun 2020 sd 2024

| URAIAN                      | Anggaran Pada Tahun Ke- |                |                |                |                | Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- |                |                |                |                | Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- |        |        |        |        | Rata-Rata Pertumbuhan |           |
|-----------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|-----------|
|                             | 2020                    | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                              | 2021           | 2022           | 2023           | 2024           | 2020                                          | 2021   | 2022   | 2023   | 2024   | Anggaran              | Realisasi |
| BELANJA                     | 13.254.889.370          | 18.066.786.019 | 20.080.700.356 | 20.795.893.333 | 20.431.065.412 | 10.655.621.696                    | 14.340.049.075 | 17.001.692.415 | 19.925.934.064 | 19.657.817.756 | 80,39%                                        | 79,37% | 84,67% | 95,82% | 96,22% | 13,18%                | 15,55%    |
| BELANJA OPERASI             | 12.377.789.370          | 16.910.077.219 | 18.775.042.356 | 19.085.809.068 | 19.195.685.012 | 9.851.804.096                     | 13.387.623.475 | 15.869.593.800 | 18.318.607.064 | 18.440.338.756 | 79,59%                                        | 79,17% | 84,52% | 95,98% | 96,07% | 13,28%                | 15,80%    |
| Belanja Pegawai             | 7.357.884.000           | 6.366.359.990  | 6.038.640.300  | 6.238.659.000  | 5.365.720.000  | 5.675.288.500,00                  | 4.402.916.452  | 5.461.451.493  | 5.643.383.621  | 4.823.207.321  | 77,13%                                        | 69,16% | 90,44% | 90,46% | 89,89% | -8,18%                | -1,11%    |
| Belanja Barang dan Jasa     | 5.019.905.370           | 10.254.840.829 | 12.736.402.056 | 12.847.150.068 | 13.829.965.012 | 4.176.515.596,00                  | 8.699.070.623  | 10.408.142.307 | 12.675.223.443 | 13.617.131.435 | 83,20%                                        | 84,83% | 81,72% | 98,66% | 98,46% | 35,41%                | 34,74%    |
| Belanja Hibah               |                         | 288.876.400    | -              | -              |                |                                   | 285.636.400    | -              | -              | -              |                                               | 98,88% |        |        |        |                       |           |
| BELANJA MODAL               | 877.100.000             | 1.156.708.800  | 1.305.658.000  | 1.710.084.265  | 1.235.380.400  | 803.817.600                       | 952.425.600    | 1.132.098.615  | 1.607.327.000  | 1.217.479.000  | 91,64%                                        | 82,34% | 86,71% | 93,99% | 98,55% | 13,43%                | 13,38%    |
| Belanja Peralatan dan Mesin | 877.100.000             | 1.156.708.800  | 85.813.000     | 310.784.000    | 1.235.380.400  | 803.817.600                       | 952.425.600    | 82.738.065     | 280.493.000    | 1.217.479.000  | 91,64%                                        | 82,34% | 96,42% | 90,25% | 98,55% | 130,25%               | 124,67%   |
| Belanja Gedung dan Bangunan | -                       | -              | 1.219.845.000  | 1.398.115.265  | -              |                                   | -              | 1.049.360.550  | 1.326.834.000  | -              |                                               |        | 86,02% | 94,90% |        | 8,49%                 | 13,22%    |
| Belanja Aset Lainnya        | -                       | -              | -              | 1.185.000      | -              | -                                 | -              | -              | -              | -              |                                               |        |        |        |        |                       |           |

Anggaran DP2KBP2 dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan dari DAK Fisik dan Non Fisik. Pada rekening belanja rata – rata pertumbuhan untuk anggaran sebesar 13,18 % dan rata – rata pertumbuhan realisasi sebesar 15,55 % sesuai anggaran kas yang sudah di tentukan, sedangkan untuk belanja modal rata – rata pertumbuhan anggaran sebesar 13,43 % dan rata – rata realisasi 13,38 %, dalam hal ini DP2KBP2 telah optimal dalam penyerapan anggaran.

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

## **2.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Guna meningkatkan kualitas layanan Program Bangga Kencana dan Layanan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak yang merupakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, bekerja sama dengan Perangkat Daerah Terkait yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bekerja sama dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kepolisian, Pengadilan Agama, Kemenag, Pengadilan Negeri, Kejaksaan Negeri, Sekolah – Sekolah, DPMD, BPBD, Bappeda, Dinkominfo dan Dispenduk Capil.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerja sama dengan Bappeda, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Daerah, Faskes – Faskes, Dinas Pendidikan, Dispari, Disperindag, Diskominfo dan DPMD.

## **2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Memberikan Pelayanan**

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai mitra yang membantu dalam mengemban tugas dan fungsinya guna meningkatkan kualitas pelayanan yang optimal yaitu :

1. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ber mitra dengan Forum Puspa, Forum Anak, Aisiyah, Bina Anisa, LPKS Villa Durian, Fatayat, Muslimat, Akademisi dan P2A GKJW.
2. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ber mitra dengan IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Tim Pendamping Keluarga terdiri dari Kader, Bidan, Media komunikasi (Maja Fm, Wika FM) dan unsur PKK.

## **2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan tidak ada dukungan dari BUMD.

## **2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah**

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan mempunyai kerjasama dengan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Propinsi di buktikan dengan adanya Perjanjian Kinerja anta kedua belah pihak.

# **3. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

## **d. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kabupaten Mojokerto, analisis terhadap isu-isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Ketepatan dalam pembentukan prioritas pembangunan akan mempermudah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program secara keseluruhan.

Langkah awal dalam isu-isu strategis adalah dengan merumuskan, mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

**1. Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas**

Upaya-upaya yang dilakukan untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga kecil berkualitas yang bercirikan kemandirian dan kesejahteraan masih rendah sehingga hak asasi dan martabat manusia khususnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi masih jauh dari harapan

**2. Kurangnya pelayanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera**

Masih banyaknya perkawinan pertama wanita berusia dibawah 21 tahun hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang akan melahirkan anak yang akan dilahirkan untuk itu perlu adanya peningkatan akses informasi, peningkatan akses pelayanan PIK Remaja, peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi remaja dan pemenuhan hak-hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

**3. Masih tingginya keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim**

Melihat masih banyaknya keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang papan dan kesehatan maka perlu kiranya ada gerakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan ibu-ibu yang berasal dari keluarga miskin maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

**4. Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga**

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan terhadap kemampuan fisik material spiritual guna hidup mandiri hal tersebut

disebabkan karena kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya masih rendah, untuk itu perlu dorongan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu mulai janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera

#### **5. Masih tingginya Unmeet need**

Berdasarkan pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember Tahun 2024 adalah 180.682 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Jetis 15.239 akseptor atau 145,87% dari PPM (Perkiraan Permintaan Masyarakat), dan terendah Kecamatan Trawas 4.893 akseptor atau 153,34 % dari PPM. Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 56.915 akseptor dan PA-Pria sejumlah 333 Akseptor. Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi sebesar 80,06 % dari PUS sejumlah 225.684 Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Dawarblandong yaitu 84,29 % dan yang terendah Kecamatan Trowulan sebesar 70,23 %. Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 90.324 akseptor dan terendah MOP yaitu 333 akseptor.

#### **6. Cakupan PIK-REMAJA cukup tinggi**

Cakupan PIK-Remaja baik PIK-R jalur pendidikan, maupun jalur masyarakat diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan konsisten dengan harapan terbentuknya generasi berencana (Genre)

#### **7. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat.**

Selama ini pemahaman masyarakat tentang gender masih kurang adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial peran gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu seperti peran pencari nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin sedangkan perempuan lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran gender sendiri adalah peran yang dilakukan perempuan dan laki-laki sesuai dengan status lingkungan, budaya dan struktur masyarakat. Peran tersebut diajarkan kepada setiap anggota masyarakat, komunitas dan kelompok sosial tertentu yang dipersiapkan sebagai peran perempuan dan laki-laki.

#### **8. Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.**

Masih banyaknya terjadi pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap anak faktor penyebab pelanggaran seksual anak tidak diketahui secara me yakinkan. Pengalaman pelecehan seksual sebagai seorang anak yang sebelumnya dianggap sebagai faktor risiko yang amat kuat, tetapi penelitian

tidak menunjukkan hubungan kausal (hubungan sebab akibat), karena sebagian besar anak-anak dilecehkan secara seksual tidak tumbuh menjadi seorang pelaku pada saat telah dewasa, juga tidak ada mayoritas pelaku dewasa yang dilaporkan mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak.

**9. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.**

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan wanita dalam pembangunan masih kurang karena masih menganggap peran laki-laki lebih penting atau lebih dominan dalam sektor pembangunan.

**10. Kurangnya kualitas data yang tepat dan akurat.**

terlalu banyak data yang terkumpul dapat menyebabkan sedikit waktu untuk mengerjakan dan akhirnya mengambil “jalan pintas” untuk menyelesaikan laporan.

**a. Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode *Focussed Group Discussion* (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. *Unmed Need* masih Tinggi.
2. KB MKJP Masih Rendah
3. Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto.
4. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
5. Banyaknya Kasus Pernikahan Anak.
6. Meningkatnya pelecehan seksual dan tindak kekerasan (KDRT) pada anak.
7. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, ekonomi dan pembangunan.
8. Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi, untuk mencapai kesetaraan gender, maka harus ada komitmen yang tinggi dari seluruh OPD.
9. Banyaknya Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak.
10. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
11. Meningkatkan usia perkawinan ideal.
12. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
13. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS).
14. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
15. Meningkatnya kualitas advokasi dan KIE KB lewat media.
16. Bertambahnya kualitas data yang cepat, tepat dan akurat.

Tabel 3.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

| POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD                                                                   | PERMASALAHAN PD                                                                                                                                          | ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD                       | ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD                                     |                                                                                         |                                                         | ISU STRATEGIS PD                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                             |                                                                                                                                                          |                                                  | GLOBAL                                                                            | NASIONAL                                                                                | REGIONAL                                                |                                           |
| (1)                                                                                                         | (2)                                                                                                                                                      | (3)                                              | (4)                                                                               | (5)                                                                                     | (6)                                                     | (7)                                       |
| Belum optimalnya Angka Penurunan Total Fertility Rate (TFR)                                                 | Belum optimalnya Pelayanan KB hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 21 tahun                   | Banyaknya PUS yang tidak ikut ber KB             | Kesenjangan antara laki-laki dan perempuan masih sangat lebar                     | Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi sehingga banyak pernikahan di bawah umur | Masih tingginya laju pertumbuhan penduduk kab mojokerto | Unmed Need masih Tinggi                   |
| Masih Rendahnya Persentase perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB | Masih tingginya Presentasi KB Baru yang unmet need                                                                                                       | Alasan Kesehatan yaitu efek samping kegagalan KB | Pemahaman Masyarakat mengenai Wanita yang Tidak Boleh Mengenyam Pendidikan Tinggi | Kehamilan 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, terlalu Dekat, Terlalu Banyak)          | Ledakan Kelahiran pasca pandemi                         | KB MKJP Masih rendah                      |
|                                                                                                             | Belum optimalnya penggunaan MKJP KB Pria di Kabupaten Mojokerto                                                                                          | Menikah Usia Muda                                | Masih adanya pemahaman wanita tidak bisa mengerjakan tugas laki – laki            | Rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas | Maraknya Pernikahan di Bawah Umum                       | Tingginya Stunting di Kabupaten Mojokerto |
|                                                                                                             | Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas                                                            | Melahirkan Usia Muda                             | Salah perempuan jika terjadi pelecehan seksual                                    | Minim Pengetahuan dan Edukasi Tumbuh Kembang Anak                                       | Masih tingginya kehamilan usia muda (di bawah 20 tahun) | Banyaknya Kasus Perempuan dan Anak        |
|                                                                                                             | Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan anak |                                                  | Perempuan tidak boleh bekerja setelah menikah                                     |                                                                                         |                                                         | Banyaknya Kasus Pernikahan Anak           |
|                                                                                                             | Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal                                                                                     |                                                  |                                                                                   |                                                                                         |                                                         |                                           |
|                                                                                                             | Tingginya kasus perkawinan anak                                                                                                                          |                                                  |                                                                                   |                                                                                         |                                                         |                                           |

|  |                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | Kurangnya pemahaman Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Benerncana dan pemberdayaan Perempuan Belum optimalnya Angka Penurunan Total Fertility Rate (TFR) dan Masih Rendahnya Persentase perangkat Daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui Kampung KB, merupakan tugas dari Dinas Pengendalian penduduk, keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan untuk mengoptimalkan kinerja nya dengan mengadakan kerjasama/MOU dengan Perangkat Daerah terkait dan mitra Perangkat Daerah terkait.

Yang lebih di optimalkan lagi adalah Permasalahan Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana antara lain :

1. Belum optimalnya Pelayanan KB hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 21 tahun, dalam hal ini Dinas pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan telah melakukan sosialisasi lewat media sosial, leaflet, gerak mupen ke tempat – tempat keramaian seperti pasar – pasar tradisional, kunjungan ke rumah – rumah yang di lakukan PLKB dan kader PPKBD dan Sub PPKBD yang merupakan kepanjangan tangan dari PLKB.

2. Belum optimalnya penggunaan MKJP KB Pria di Kabupaten Mojokerto

Tahun 2024 kontrasepsi jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang terdiri dari 4 jenis kontrasepsi (IUD, MOW, MOP, IMPLAN) sebanyak 56.915 Peserta KB Aktif, MOP (KB Pria) sebanyak 333 Peserta KB Aktif, Dari 180.682 Peserta KB Aktif yang memakai kontrasepsi, pemakaian kontrasepsi di dominasi oleh pemakain kontrasepsi jangka pendek seperti Kondom, Suntik dan Pil sebanyak 123.767 Peserta KB Aktif, untuk mengoptimalkan penggunaan MKJP KB Pria Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan telah melakukan sosialisasi lewat media sosial, leaflet – leaflet dll.

3. Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Di upayakan lewat di bentuknya Kampung Keluarga Berkualitas, adalah kampung yang mandiri, tentram, dan bahagia. Dalam konsep lama disebut Kampung Keluarga Berencana dengan wilayah setingkat desa/kelurahan yang memiliki kriteria tertentu dan terdapat keterpaduan Program Bangga Kencana. Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB) adalah satuan wilayah setingkat kelurahan dimana terdapat integrasi dan konvergensi penyelenggaraan pemberdayaan dan penguatan institusi keluarga dalam seluruh dimensinya guna

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keluarga dan masyarakat.

Secara umum tujuan dibentuknya Kampung Keluarga Berkualitas adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui pemberdayaan masyarakat dalam Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai adalah :

- a. Meningkatkan peran Pemerintah, Pemerintah Daerah, Lembaga Non Pemerintah, dan Swasta dalam memfasilitasi, pendampingan dan pembinaan masyarakat untuk melaksanakan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga ( BANGGA KENCANA ) serta pembangunan sektor terkait.
  - b. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang berhubungan dengan pembangunan berwawasan kependudukan
  - c. Meningkatkan jumlah peserta KB aktif dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
  - d. Meningkatkan ketahanan keluarga melalui program 8 fungsi keluarga (Keagamaan, Sosial Budaya, Cinta Kasih, Perlindungan, Reproduksi, Sosialisasi dan Pendidikan, Ekonomi, dan Pembinaan Lingkungan)
  - e. Meningkatkan pemberdayaan keluarga melalui Kelompok UPPKA
  - f. Menurunkan angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
  - g. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
  - h. Meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk usia sekolah
  - i. Menurunkan angka perkawinan di bawah umur
4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama kasus kekerasan anak.

Angka Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak di Kabupaten Mojokerto dinilai masih memprihatinkan. Yang lebih memilukan, data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku kekerasan justru berasal dari lingkaran terdekat korban, yaitu orang tua kandung atau anggota keluarga lainnya. Dari bulan januari sd bulan juli Tahun 2025 sebanyak 31 kasus perempuan dan anak yang melapor ke UPTD PPA (kasus perempuan 12 orang dan kasus anak 19 anak). Upaya Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak dengan bermitra dan memfasilitasi organisasi/lembaga yang bergerak dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan kesejahteraan keluarga di Kabupaten Mojokerto.

5. Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal Gugus tugas adalah Tim yang bertugas memberikan layanan pendampingan

pada perempuan dan anak yang mengalami kekerasan tingkat desa. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan telah melakukan pembinaan, pelatihan paralegal (orang yang mendapat pelatihan dan tidak berprofesi sebagai advokat, tetapi mendampingi Penerima Bantuan Hukum di pengadilan), monitoring dan evaluasi melalui lomba gugus tugas PPA desa namun masih sedikit gugus tugas PPA desa/kelurahan yang aktif. Untuk itu DP2KBP2 akan berkolaborasi dengan muslimat dan fatayat yang tersebar di seluruh desa dalam mengaktifkan dan melakukan pendampingan jika terjadi kasus di desa tersebut.

6. Tingginya kasus perkawinan anak

Berdasarkan data Tahun 2025 bulan juni kasus perkawinan anak di bawah umur (umur di bawah 19 tahun untuk laki – laki dan perempuan) sebanyak 133 anak dalam hal ini perlu adanya penanganan yang lebih serius, untuk mengurangi jumlah perkawinan di bawah umur DP2KBP2 telah melakukan pencegahan melalui sosialisasi ke sekolah – sekolah, pondok pesantren, PKK dan bekerjasama dengan pengadilan agama untuk melakukan asesmen calon pengantin di bawah umur untuk mendapatkan rekomendasi nikah bagi calon pengantin yang memenuhi syarat (usia di bawah 19 tahun mapan secara ekonomi, secara psikologis, psikis, fisik)

7. Kurangkanya pemahaman Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait

Kurangnya pemahaman PPRG di karenakan kekurangan SDM yang faham pada gender, berkaitan dengan terjadinya mutasi (yang sudah pernah mengikuti pelatihan), untuk menanggulangi DP2KBP2. Telah melakukan sosialisasi, pelatihan, desk ARG (Anggaran Responsif Gender), monitoring dan evaluasi, di harapkan masing – masing Perangkat Daerah melakukan sosialisasi, platihan secara mandiri

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

##### **1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Adapun Tujuan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah Kinerja yang ingin di wujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang di terbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Dalam hal ini DP2KBP2 untuk mendukung Misi Nomor 2 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan tujuan MISI 2 yaitu Mewujudkan SDM yang Tangguh, Cerdas, Terampil, Produktif dan Berkarakter Melalui Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan Serta Menjadi Ketentraman Masyarakat dengan indikator tujuan Perangkat Daerah Terwujudnya Keluarga Berkualitas dan Meningkatnya Pembangunan Gender.

##### **2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Adapun Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ialah dengan 5 sasaran Perangkat Daerah yaitu 1. Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana dengan indikator Prosentase Kepesertaan KB (MCPR), 2. Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto dengan indikator Prosentase Balita Stunting di Kabupaten Mojokerto, 3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan indikator Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan, 4. Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indikator Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terselesaikan, dan 5. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan gender dengan indikator Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang terselesaikan dan Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG.

##### **3. Strategi PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029**

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta

indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.3 sebagaimana berikut ini dan strategi yang diterapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu Tabel 3.3.1.

Tabel 3.3 Teknik Perumuskan dan Tujuan Sasaran Renstra PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN      | TUJUAN                                | SASARAN                                                                  | INDIKATOR                                                        | TARGET TAHUN |        |        |        |        |        | KET. |
|------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
|                                          |                                       |                                                                          |                                                                  | 2025         | 2026   | 2027   | 2028   | 2029   | 2030   |      |
| (1)                                      | (2)                                   | (3)                                                                      | (4)                                                              | (5)          | (6)    | (7)    | (8)    | (9)    | (10)   | (11) |
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender |                                       |                                                                          | Indek Pembangunan Gender (IPG)                                   | 91,94        | 92,04  | 92,14  | 92,24  | 92,34  | 92,44  |      |
|                                          | Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas |                                                                          | I Bangga                                                         | 65,11        | 65,12  | 65,13  | 65,14  | 65,15  | 65,16  |      |
|                                          |                                       | Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana                              | Prosentase Kepesertaan KB                                        | 80,07%       | 80,08% | 80,09% | 80,10% | 80,11% | 80,12% |      |
|                                          |                                       | Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto                         | Prosentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi           | 88,15%       | 89,00% | 89,10% | 89,20% | 89,30% | 89,40% |      |
|                                          | Meningkatnya Pembangunan Gender       |                                                                          | Indeks Pembangunan Gender (IPG)                                  | 91,94        | 92,04  | 92,14  | 92,24  | 92,34  | 92,44  |      |
|                                          |                                       | Meningkatnya Perlindungan Perempuan                                      | Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan | 90%          | 91%    | 92%    | 93%    | 94%    | 95%    |      |
|                                          |                                       | Meningkatnya Perlindungan Anak                                           | Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan      | 90%          | 91%    | 92%    | 93%    | 94%    | 95%    |      |
|                                          |                                       | Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG           | 11,78%       | 11,79% | 11,80% | 11,81% | 11,82% | 11,83% |      |

Tabel 3.3.1 Sasaran Penunjang PD

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN                                                                         | INDIKATOR                    | TARGET TAHUN |           |           |           |           |           | KET. |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|                                     |        |                                                                                 |                              | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |      |
| (1)                                 | (2)    | (3)                                                                             | (4)                          | (5)          | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       | (10)      | (11) |
|                                     |        | Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 84,60 (A)    | 84,61 (A) | 84,62 (A) | 84,63 (A) | 84,64 (A) | 84,65 (A) |      |

Teknik Perumuskan dan Tujuan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan perempuan, mendukung sasaran RPJMD Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender dengan indicator Indeks Pembangunan Gender (IPG), ada dua Tujuan karena kami ada dua urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,

Tujuan dari urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas dengan indicator I Bangga, dengan dua sasaran Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana dengan tiga indicator Prosentase Kepesertaan KB, Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja (indicator tambahan bukan menjadi indicator kinerja utama PD), Indeks Lansia Berdaya (indicator tambahan bukan menjadi indicator kinerja utama PD) dan Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto dengan indicator Prosentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi.

Tujuan yang ke dua urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Meningkatnya Pembangunan Gender dengan indicator Indeks Pembangunan Gender (IPG), dengan tiga sasaran Meningkatnya Perlindungan Perempuan dengan indicator Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terselesaikan, Meningkatnya Perlindungan Anak dengan indicator Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan, Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender dengan indicator Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG.

Dengan dua sasaran penunjang Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu Nilai Sakip Perangkat Daerah pada tahun 2024 mendapatkan nilai 84,55 di harapkan di tahun berikutnya nilai Sakip bisa naik menjadi lebih baik lagi lima tahun ke depan.

Tabel 3.4 Penahapan Renstra PD

| TAHAP I<br>(2026)<br>(1)                                                                                                                | TAHAP II<br>(2027)<br>(2)                                                                                                               | TAHAP III<br>(2028)<br>(3)                                                                                                              | TAHAP IV<br>(2029)<br>(4)                                                                                                               | TAHAP V<br>(2030)<br>(5)                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program gercep stunting melalui edukasi pada keluarga resiko stunting                                                                   | Program gercep stunting melalui edukasi dan demonstrasi pembuatan menu gizi seimbang DASHAT di posyandu                                 | Program gercep stunting melalui edukasi pada keluarga remaja (kelompok BKR) di 18 Kecamatan                                             | Program gercep stunting melalui pembentukan dan edukasi pada kelompok PIK R jalur masyarakat di 18 kecamatan                            | Program gercep stunting melalui edukasi dan demonstrasi pembuatan menu gizi seimbang DASHAT di posyandu                                 |
| Program gercep stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga beresiko stunting di 18 Kecamatan pada remaja (ke sekolah - sekolah ) | Program gercep stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga beresiko stunting di 18 Kecamatan pada remaja (ke sekolah - sekolah ) | Program gercep stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga beresiko stunting di 18 Kecamatan pada remaja (ke sekolah - sekolah ) | Program gercep stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga beresiko stunting di 18 Kecamatan pada remaja (ke sekolah - sekolah ) | Program gercep stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga beresiko stunting di 18 Kecamatan pada remaja (ke sekolah - sekolah ) |
| Rembuk stunting di 18 Kecamatan                                                                                                         | Rembuk stunting di 18 Kecamatan                                                                                                         | Rembuk stunting di 18 Kecamatan                                                                                                         | Rembuk stunting di 18 Kecamatan                                                                                                         | Rembuk stunting di 18 Kecamatan                                                                                                         |
| Pelatihan wirausaha bagi perempuan ojek online, perempuan                                                                               | Evaluasi hasil pelatihan wirausaha bagi perempuan ojek online,                                                                          | Penguatan psikologis perempuan ojek online, perempuan kepala                                                                            | Evaluasi dan pengembangan usaha bagi perempuan ojek                                                                                     | Penguatan psikologis perempuan ojek online, perempuan kepala                                                                            |

|                                                                            |                                                                                      |                                                                     |                                                                                                                           |                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| kepala keluarga, dan perempuan penyintas (korban) kekerasan untuk 40 orang | perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas (korban) kekerasan untuk 40 orang | keluarga, dan perempuan penyintas (korban) kekerasan untuk 40 orang | online, perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas (korban) kekerasan yang telah dilatih wirausaha untuk 40 orang | keluarga, perempuan penyintas (korban) kekerasan untuk 500 orang |
| Penguatan fisik perempuan ojek online                                      | Penguatan fisik perempuan ojek online                                                | Penguatan fisik perempuan ojek online                               | Penguatan fisik perempuan ojek online                                                                                     | Penguatan fisik perempuan ojek online                            |

Penahapan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang merupakan program pripritas Bupati terpilih masa jabatan 2025 – 2030 yaitu Program grecep stunting melalui edukasi dan pendampingan keluarga resiko stunting di 18 Kecamatan dan rembuk stunting di 18 Kecamatan.

- ✓ Hasil yang diharapkan Gercep Stunting Kabupaten sebagai berikut :
  - a) Untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pembangunan keluarga.
  - b) Meningkatkan partisipasi keluarga dalam poktan BKB,BKR,BKL, PIK R dan UPPKA.
  - c) Meningkatkan partisipasi keluarga remaja dalam kelompok kegiatan Pembangunan Keluarga.
  - d) Meningkatkan pengetahuan kader dan masyarakat mengenai Pembangunan Keluarga.
  - e) Meningkatkan cakupan pelaporan kelompok kegiatan setiap bulan masyarakat tentang pembangunan keluarga.
  
- ✓ Hasil yang diharapkan Rembuk Stunting Kabupaten sebagai berikut :
  - a) Menyampaikan Desa-Desa Lokasi Prioritas Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi Di Kabupaten Mojokerto sampai dengan Lokus Tahun 2030 Sesuai Hasil Analisis Situasi.
  - b) Penurunan Stunting Terintegrasi sampai dengan Tahun 2030.
  - c) Komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Opd Dan Stakeholder Terkait Untuk Program / Kegiatan Penurunan Stunting Yang Akan Dimuat Dalam Rancangan RKPD/ Rencana Kerja sampai dengan Tahun 2030.
  - d) Komitmen Pemerintah Desa Lokasi Prioritas Yang Akan Meningkatkan Alokasi Kebutuhan Pendanaan Program/ Kegiatan Terkait Dengan Percepatan Penurunan Stunting Dalam Rancangan Apbdes Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2030.
  - e) Membangun Komitmen Publik Dalam Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting Secara Terintegrasi Di Kabupaten Mojokerto.
  - f) Evaluasi Kinerja TPPS desa untuk percepatan Penurunan Stunting.
  
- ✓ Hasil yang di harapkan untuk fasilitasi Usaha perempuan Kabupaten Mojokerto, pada Bupati terpilih masa jabatan 2025 – 2030, di harapkan, perempuan yang mendapatkan fasilitasi mampu untuk mandiri dan mengembangkan potensi diri sesuai yang di milikinya.

**Tabel 3.3.1 Tujuan Sasaran Strategi dan Kebijakan PD**

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DP2KBP2 KABUPATEN MOJOKERTO**

| <b>VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR</b>                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MISI 2 : MEWUJUDKAN SDM YANG TANGGUH, CERDAS, TERAMPIL, PRODUKTIF DAN BERKARAKTER MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT</b> |                                                  |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                |
| <b>TUJUAN</b>                                                                                                                                                                       | <b>SASARAN</b>                                   | <b>STRATEGI</b>                                                                                                                                     | <b>ARAH KEBIJAKAN</b>                                                                                                                                                          |
| Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas                                                                                                                                               | Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana      | Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB                                                               | 1 Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)                      |
|                                                                                                                                                                                     |                                                  | Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal                                                                                        | 2 Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan                                                        |
|                                                                                                                                                                                     |                                                  | Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga                                                     | 3 Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                     | Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto | Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) | 4 Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan pertisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga |
|                                                                                                                                                                                     |                                                  |                                                                                                                                                     | 5 Pemanfaatan Teknologi Informasi                                                                                                                                              |

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                 |                                     |                                                                                                                                                           |   |                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Pembangunan Gender | Meningkatnya Perlindungan Perempuan | Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan validasi di bidang PUG dan PUHA                                                                               | 1 | Meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak |
|                                 |                                     | Meningkatkan pembinaan peningkatan penguatan ekonomi, politik, hukum dan sosial perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan | 2 | Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi, politik, hukum dan sosial terhadap perempuan                                                                                   |
|                                 |                                     | Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada perempuan                                                                                        | 3 | Perempuan yang membutuhkan perlindungan yang memperoleh layanan sesuai dengan standar                                                                                                                                                   |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                           |   | UPTD PPA yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kekerasan pada perempuan yang membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan standar.                                                                                               |
|                                 |                                     | Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada perempuan                                                                 | 4 | Lembaga penyedia layanan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar                                                                                                |
|                                 | Meningkatnya Perlindungan Anak      | Meningkatnya kabupaten yang mampu memenuhi hak anak                                                                                                       | 1 | Adanya Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak                                                                                                                                                                                         |
|                                 |                                     | Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak                                                                                             | 2 | Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar                                                                                                                                                 |
|                                 |                                     |                                                                                                                                                           |   | UPTD PPA yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.                                                                                                      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |                                                     |                                                                                      |   |                                                                                                                           |
|--|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                     | Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak | 3 | Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar |
|  | Meningkatnya Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender | Meningkatkan pembinaan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender                         | 1 | Melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)                        |
|  |                                                     |                                                                                      | 2 | Pemanfaatan Teknologi Informasi                                                                                           |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Dari data di atas, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, mengacu pada visi bupati dan wakil **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU”, ADIL DAN MAKMUR’** dengan Misi 2 **“MEWUJUDKAN SDM YANG TANGGUH, CERDAS, TERAMPIL, PRODUKTIF DAN BERKARAKTER MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SERTA MENJAGA KETENTRAMAN MASYARAKAT”,**

**TUJUAN :**

1. Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas, indikator i Bangsa
2. Meningkatnya Pembangunan Gender. Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG).

**SASARAN :**

1. Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana, indikator Prosentase Kepesertaan KB (MCPR), Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja, Indeks Lansia Berdaya.
2. Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto, indikator Prosentase Balita Stunting di Kabupaten Mojokerto.
3. Meningkatnya Perlindungan Perempuan indikator Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan.
4. Meningkatnya Perlindungan Anak indikator Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan.
5. Meningkatnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, indikator Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG.

**STAREGI yang di lakukan DP2KBP2 :**

Sasaran yang pertama :

1. Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB, arah kebijakan yang di lakukan Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)
2. Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal, arah kebijakan yang di lakukan Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan.
3. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga, arah kebijakan yang di lakukan Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga.

Sasaran yang ke dua :

1. Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA), arah kebijakan yang di lakukan Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga

## dan Pemanfaatan Teknologi Informasi

### Sasaran yang ke tiga :

1. Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan validasi di bidang PUG dan PUHA, arah kebijakan yang di lakukan Meningkatkan kesejahteraan, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
2. Meningkatkan pembinaan peningkatan penguatan ekonomi, politik, hukum dan sosial perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan, arah kebijakan yang di lakukan Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi, politik, hukum dan sosial terhadap perempuan.
3. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada perempuan, arah kebijakan yang di lakukan, Perempuan yang membutuhkan perlindungan yang memperoleh layanan sesuai dengan standar dan UPTD PPA yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kekerasan pada perempuan yang membutuhkan perlindungan yang sesuai dengan standar.
4. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada perempuan arah kebijakan yang di lakukan, Lembaga penyedia layanan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

### Sasaran yang ke empat :

1. Meningkatnya kabupaten yang mampu memenuhi hak anak, arah kebijakan yang di lakukan, Adanya Kabupaten Layak Anak dan Desa Layak Anak.
2. Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak, arah kebijakan yang di lakukan, Anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai dengan standar dan UPTD PPA yang menindaklanjuti seluruh (100%) pengaduan kasus anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang sesuai dengan standar.
3. Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada anak, arah kebijakan yang di lakukan, Lembaga penyedia layanan perlindungan khusus kepada anak yang mampu memberikan layanan komprehensif sesuai dengan standar.

### Sasaran yang ke lima :

1. Meningkatkan pembinaan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, arah kebijakan yang di lakukan, Melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender).

**Tabel 3.5 Teknik Perumusan Arah Kebijakan Renstra PD**

| NO  | OPERASIONALISASI<br>NSPK                                                                                                                                             | ARAH KEBIJAKAN RPJMD                                                                                                                                                                                                                                               | ARAH KEBIJAKAN<br>RENSTRA PD                                                                                                                                                                                                                          | KET. |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) | (2)                                                                                                                                                                  | (3)                                                                                                                                                                                                                                                                | (4)                                                                                                                                                                                                                                                   | (5)  |
| 1   | Perumusan kebijakan<br>dibidang pengendalian<br>penduduk dan keluarga<br>berencana serta bidang<br>pemberdayaan perempuan<br>dan perlindungan anak                   | Pemerataan dan peningkatan<br>kompetensi tenaga kesehatan                                                                                                                                                                                                          | Meningkatkan penggunaan<br>alat kontrasepsi yang<br>rasional, efisien dan efektif,<br>menurunkan angka unmed<br>need (ingin adan ditunda<br>dan tidak ingin anak lagi)                                                                                |      |
| 2   | Pelaksanaan kebijakan<br>dibidang pengendalian<br>penduduk dan keluarga<br>berencana serta bidang<br>pemberdayaan perempuan<br>dan perlindungan anak                 | Percepatan penuntasan<br>stunting dan pencegahan<br>stunting                                                                                                                                                                                                       | Mengembangkan kemitraan<br>dengan organisasi<br>kepemudaan, sekolah<br>Toga/Toma dalam<br>sosialisasi pendewasaan<br>usia perkawinan                                                                                                                  |      |
| 3   | Pelaksanaan evaluasi dan<br>pelaporan dibidang<br>pengendalian penduduk<br>dan keluarga berencana<br>serta bidang<br>pemberdayaan perempuan<br>dan perlindungan anak | Pemenuhan hak dan<br>perlindungan anak,<br>perempuan, pemuda,<br>penyandang disabilitas,<br>dan lansia melalui<br>pengasuhan dan perawatan,<br>pembentukan resiliensi, dan<br>perlindungan dari<br>kekerasan, termasuk<br>perkawinan anak dan<br>perdagangan orang | Melakukan sosialisasi,<br>pelatihan dan sarasehan<br>terkait manajemen keluarga                                                                                                                                                                       |      |
| 4   | Pelaksanaan administrasi<br>dibidang pengendalian<br>penduduk dan keluarga<br>berencana serta bidang<br>pemberdayaan perempuan<br>dan perlindungan anak              | Penguatan pengarusutamaan<br>gender dan inklusi social<br>dalam Pembangunan                                                                                                                                                                                        | Meningkatkan kualitas<br>kelompok Ketahanan<br>Keluarga (BKB, BKL, BKR,<br>PIK-R, UPPKS) dan<br>meningkatkan partisipasi<br>masyarakat untuk mengikuti<br>kelompok kegiatan<br>Ketahanan Keluarga                                                     |      |
| 5   | Pengumpulan, pengolahan<br>dan pemanfaatan data di<br>lini lapangan (data<br>program bangga kencana)                                                                 | Pemberdayaan perempuan,<br>pemuda, penyandang<br>disabilitas, dan lansia, melalui<br>penguatan kapasitas,<br>kemandirian, kemampuan<br>dalam pengambilan<br>keputusan, serta peningkatan<br>partisipasi di berbagai bidang<br>Pembangunan                          | Pemanfaatan Teknologi<br>Informasi                                                                                                                                                                                                                    |      |
| 6   | Mengkoordinasikan<br>penyelenggaraan kegiatan<br>pemerintahan yang<br>dilakukan oleh perangkat<br>daerah di tingkat<br>kecamatan                                     | Peningkatan ketahanan<br>keluarga pendukung berbasis<br>kearifan lokal                                                                                                                                                                                             | Meningkatkan kesejahteraan<br>dan perlindungan<br>perempuan dan anak serta<br>penghapusan bentuk<br>pekerjaan terburuk bagi<br>anak dan menghilangkan<br>berbagai tindak kekerasan,<br>eksploitasi dan<br>diskriminasi terhadap<br>perempuan dan anak |      |
| 7   | Penyelenggaraan riset dan<br>inovasi untuk kepentingan<br>penyelenggaraan<br>pemerintahan daerah                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Melakukan sosialisasi,<br>pelatihan terkait industri<br>rumahan dan pencegahan<br>terjadinya kesenjangan<br>ekonomi terhadap<br>perempuan                                                                                                             |      |

|    |                                                                                                         |  |                                                                           |  |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------|--|
| 8  | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Perlindungan Anak                                 |  | Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender) |  |
| 9  | Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan                            |  |                                                                           |  |
| 10 | Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati                                      |  |                                                                           |  |
| 11 | Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender |  |                                                                           |  |

Arah kebijakan renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah rangkaian kerja yang merupakan NSPK sesuai tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan resntra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan, arah kebijakan renstra DP2KBP2 periode Tahun 2025 – 2029 adalah :

1. Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin adan ditunda dan tidak ingin anak lagi)
2. Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan.
3. Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga.
4. Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga.
5. Pemanfaatan Teknologi Informasi.
6. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan menghilangkan berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
7. Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan.
8. Melakukan pelatihan terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender).

## **BAB IV**

### **PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2025 – 2029 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP2.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan mengacu pada nomenklatur yang di atur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutahirannya, dapat di lihat pada tabel – tabel berikut ini :

**Tabel 4.2 Teknis Merumuskan Program/Kegiatan/sub Kegiatan Renstra PD**

| <b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>      | <b>TUJUAN</b>                                | <b>SASARAN</b>                                          | <b>OUTCOME</b> | <b>OUTPUT</b> | <b>INDIKATOR</b>                                                                       | <b>PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN</b> | <b>KET.</b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|
| <b>(1)</b>                                      | <b>(2)</b>                                   | <b>(3)</b>                                              | <b>(4)</b>     | <b>(5)</b>    | <b>(6)</b>                                                                             | <b>(7)</b>                           | <b>(8)</b>  |
| <b>Meningkatnya Kualitas Pembangunan Gender</b> |                                              |                                                         |                |               | <b>Indek Pembangunan Gender (IPG)</b>                                                  |                                      |             |
|                                                 | <b>Terwujudnya Keluarga yang Berkualitas</b> |                                                         |                |               | <b>I Bangga</b>                                                                        |                                      |             |
|                                                 |                                              | <b>Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana</b>      |                |               | <b>Prosentase Kepesertaan KB</b>                                                       |                                      |             |
|                                                 |                                              | <b>Menurunnya Kasus Stunting di Kabupaten Mojokerto</b> |                |               | <b>Prosentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi</b>                          |                                      |             |
|                                                 |                                              |                                                         |                |               | <b>Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)</b>                                | <b>Program Pengendalian Penduduk</b> |             |
|                                                 |                                              |                                                         |                |               | <b>Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR (15-19)</b> |                                      |             |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana</b>                         | <b>Jumlah Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana</b>                           | <b>Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk</b> |  |
|  |  |  |  | Tersusunnya Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                        | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                        | Sub kegiatan Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                         |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                         | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                           | Sub kegiatan Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                                      |  |
|  |  |  |  | Tersusunnya Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota    | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                     |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | Sub Kegiatan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan               | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan               | Sub Kegiatan Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan            | Sub Kegiatan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan    |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                                                                          | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                                                              | Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                           |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                    | Sub Kegiatan Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal                                                                       | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal                                                                         | Sub Kegiatan Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal                                                          |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                             | Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                 | Sub Kegiatan Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan                                                                               | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan                                                                               | Sub Kegiatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal                                                                        |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                               | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                               | Sub Kegiatan Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                        |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana                     |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto</b>                                                                           | <b>Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto</b>                                                                            | <b>Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                                                      | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                                                            | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                               |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                                                  | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan                                                                                     | Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                     |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                           | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                   | Sub Kegiatan Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan      |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                     | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga                                     | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga        |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan                                                  | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan                                                        | Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                         |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                 | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                                                                                                  |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                             | Sub Kegiatan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                       | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                 | Sub Kegiatan Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                    |  |
|  |  |  |  | Dibentuknya Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | Sub Kegiatan Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk                                                                                                                                               | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk                                                                                                                                          | Sub Kegiatan Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota                                                      |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Perumusan Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan                                                                                                                           | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan                                                                                                                               | Sub Kegiatan Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB                                                                                        |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                            | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana                            | Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana                                                   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                     | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | Sub Kegiatan Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                               |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB) | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga                             | Sub Kegiatan Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                      |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                | <b>Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern contraceptive (mCPR)</b>                                      | <b>Program Keluarga Berencana</b>                                                                                                       |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                | <b>Prevalensi Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (Unmed Need)</b>                                             |                                                                                                                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)</b>                                                                                       | <b>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)</b>                       | <b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                     |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        | Sub Kegiatan Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                             |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                              | Sub Kegiatan Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana                                                                                                            |  |
|  |  |  |  | Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana                                                                                                  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Sub Kegiatan Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                     |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal            | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan  | Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                | Sub Kegiatan Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                    |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)</b>                                                                                          | <b>Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)</b>                                                                                              | <b>Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal</b> |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                                                                                            | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia                                                                                                                                                                                                          | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                          | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                                                                   | Sub Kegiatan Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                           | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                               | Sub Kegiatan Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Sub Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  | <b>Tersedianya Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP</b>                                                                                      | <b>Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP</b>                                                                                        | <b>Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>                   |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Sub Kegiatan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  |
|  |  |  |  | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                           | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                        | Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                         |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                      | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                                    | Sub Kegiatan Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                         |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                 | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                 | Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                 |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                       | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                                        | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                          |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                         | Sub Kegiatan Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | Sub Kegiatan Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                    | Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                               | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                     | Sub Kegiatan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                               |  |
|  |  |  |  | Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                              | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria                                                                                  | Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                            |  |
|  |  |  |  | Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                            | Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                             | Sub Kegiatan Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitas dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                             | JumlahPengeloladanPetugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat danObat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB            | Sub Kegiatan Peningkatan Kompetensi Pengelola danPetugas LogistikAlat danObat Kontrasepsi sertaSaranaPenunjang Pelayanan KB                                                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                       | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                  | Sub Kegiatan Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                     |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana</b> | <b>Jumlah stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalamPelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB</b> |  |
|  |  |  |  | TerlaksananyaPenguatanPeranSerta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                 | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB  | Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                            |  |
|  |  |  |  | TerintegrasinyaPembangunanLintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                 | Sub Kegiatan Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                  | Sub Kegiatan Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                               |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting(DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                     | Jumlah DASHAT di Kampung KB                                                                                                                                        | Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas |  |
|  |  |  |  | Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Sub Kegiatan Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas         |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                             | <b>Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga</b>                                                                                     | <b>Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)</b>                                     |  |
|  |  |  |  | <b>Terbentuknya Kelompok Bangga Kencana yang Efektif</b>                                                                                                    | <b>Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif</b>                                                                                                                 | <b>Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b> |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrangTuaHebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                  | Sub Kegiatan Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                               |  |
|  |  |  |  | Terlaksananyaaktifitas lansiasesuai tujuhdimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif                                                              | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia                                                                                                                       | Sub Kegiatan Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                              | Sub Kegiatan Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |  |
|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                   | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                          | Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                       | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) yang tersedia                                                   | Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))         |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                           | Sub Kegiatan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)                                     | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)                                         | Sub Kegiatan Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                          |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                     | Sub Kegiatan Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                             |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                       | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                             | Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga                                                                                                            |  |
|  |  |  |  | Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                         | Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                              |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                                 | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                                       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                                                                              |  |
|  |  |  |  | Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | Sub Kegiatan Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Kegiatan Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</b>                                                                         |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Sub Kegiatan Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                            | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                              | Sub Kegiatan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                            |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Sub Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                          | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                      | Sub Kegiatan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                          | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                                   | Sub Kegiatan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                                                      |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/CalonPUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan            | Sub Kegiatan Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) |  |
|  |  |  |  | <b>Terbentuknya Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif</b>                                                                                           | <b>Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif</b>                                                                                                                    | <b>Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)</b>                                                      |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja                                                         | Jumlah Kelompok Kegiatan Remaja yang Mendapatkan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja                                         | Sub Kegiatan Pembinaan Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja                                                          |  |
|  |  |  |  | Tersedianya sarana edukasi PKBR dikelompok kegiatan                                                                                               | Jumlah unit sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan                                                                                                                 | Sub Kegiatan Penyediaan Sarana edukasi PKBR di kelompok kegiatan                                                                                  |  |
|  |  |  |  | Terlaksananyaorientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya | Jumlah Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya yang terlaksana | Sub Kegiatan Orientasi Perencanaan menikah (Penyiapan Kehidupan Berkeluarga) Bagi Remaja untuk SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya |  |
|  |  |  |  | <b>Terbentuknya Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif</b>                                                                                           | <b>Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif</b>                                                                                                                    | <b>Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)</b>                                                      |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |                                                |                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |  |
|--|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                |                                                    |                                                    | Terlaksananya Pembinaan<br>Perencanaan menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja                                                               | Jumlah Kelompok Kegiatan<br>Remaja yang Mendapatkan<br>Pembinaan Perencanaan<br>menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja                                               | Sub Kegiatan Pembinaan<br>Perencanaan menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja                                                             |  |
|  |                                                |                                                    |                                                    | Tersedianya sarana edukasi PKBR<br>dikelompok kegiatan                                                                                                           | Jumlah unit saran aedukasi<br>PKBR di kelompok kegiatan                                                                                                                                   | Sub Kegiatan Penyediaan Saran<br>aedukasi PKBR di kelompok<br>kegiatan                                                                                        |  |
|  |                                                |                                                    |                                                    | Terlaksananyaorientasi<br>Perencanaan menikah (Penyiapan<br>Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja untuk<br>SDM pengelola, pendidik sebaya dan<br>konselor sebaya | Jumlah Kegiatan Orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja<br>untuk SDM pengelola,<br>pendidik<br>sebaya dan konselor sebaya<br>yang terlaksana | Sub Kegiatan Orientasi Perencanaan<br>menikah (Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja untuk<br>SDM pengelola, pendidik sebaya dan<br>konselor sebaya |  |
|  | <b>Meningkatnya<br/>Pembangunan<br/>Gender</b> |                                                    |                                                    |                                                                                                                                                                  | <b>Indeks Pembangunan<br/>Gender (IPG)</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                               |  |
|  |                                                | <b>Meningkatnya<br/>Perlindungan<br/>Perempuan</b> |                                                    |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                               |  |
|  |                                                |                                                    | <b>Meningkatnya<br/>Perlindungan<br/>Perempuan</b> |                                                                                                                                                                  | <b>Prosentase Kasus Kekerasan<br/>Terhadap Perempuan Yang<br/>Terselesaikan</b>                                                                                                           |                                                                                                                                                               |  |
|  |                                                |                                                    | <b>Meningkatnya<br/>Perlindungan<br/>Anak</b>      |                                                                                                                                                                  | <b>Prosentase Kasus Kekerasan<br/>Terhadap Anak Yang<br/>Terselesaikan</b>                                                                                                                |                                                                                                                                                               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |                                                                     |                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                            |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender</b> |                                                                                                                                  | <b>Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG</b>                                                               |                                                                                                            |  |
|  |  |  |                                                                     |                                                                                                                                  | <b>'Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD</b>                                               | <b>Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan</b>                                           |  |
|  |  |  |                                                                     |                                                                                                                                  | <b>Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan</b>                                                                  |                                                                                                            |  |
|  |  |  |                                                                     | <b>Terlaksananya ARG pada Belanja Langsung APBD</b>                                                                              | <b>Prosentase ARG pada Belanja Langsung APBD</b>                                                                            | <b>Kegiatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |                                                                     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                               |  |
|  |  |  |                                                                     | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota         | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                         |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota                                                                                                      | Jumlah kebijakan teknis penyelenggaraanPUGdi tingkatkab/ kota                                                                                                       | Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota                                                               |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota                                                 | Jumlah SDM yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                                   | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan PendampinganPenyelenggaraanPUG kewenangan Kab/Kota                                                   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota                                                                                  | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                                                                                                | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah, desa, lembagamasy, profesi, dunia usaha, dan media                  | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota                                                                                           | Sub Kegiatan Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                               |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan</b> | <b>Jumlah organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah Kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan</b> | <b>Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik,Hukum,Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota</b> |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                | Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                     |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan / profesi / dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/media yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                           |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi                                                                     | Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi                                                          | Sub Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan</b>                                                                                                                                                   | <b>Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan</b>                                                                                                                                      | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</b>              |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan                                                                                | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                          | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas                   | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota          |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                   | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                               | Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota dalam pemenuhan standar layanan                                              | Jumlah LPLPP (Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan) dalam bentuk Pusat Pembelajaran Perempuan (PUTARAN) yang terstandarisasi            | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/ kota dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/ Lestari/ Sehat/ Pintar/ Leadership/ Hukum | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/ Sehat/ Pintar/ Kepemimpinan/ Hukum dan LPLPP tingkat kab/kota | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota          |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota                                           | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota                                                                                     | Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                           | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                         | Sub Kegiatan Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                           |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                         | <b>Prosentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif</b>                                                                    | <b>Program Perlindungan Perempuan</b>                                                                                                                      |  |
|  |  |  |  | Tersedianya lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                | Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                            | Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                             |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan<br><br>PendampinganLayananPerlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                     |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Sub Kegiatan Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah minta kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak</b>                     | <b>Jumlah minta kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak</b>                       | <b>Kegiatan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota</b>           |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi PerempuanKorban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                             | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                                      |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                       | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                         | Sub Kegiatan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                        |  |
|  |  |  |  | <b>Tersediannya lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA</b>                                                                                  | <b>Jumlah lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA</b>                                                                                                     | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>                       |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota       | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota                | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianyakebutuhan spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                              | Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota     |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                        | Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                           | <b>Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berprespektif Gender dan Hak Anak sesuai Standart</b>                                                                  | <b>Program Peningkatan Kualitas Keluarga</b>                                                                                     |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa</b>                                                     | <b>Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa</b>                                                                                 | <b>Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk MewujudkanKesetaraanGender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | Sub Kegiatan Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                          |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sisialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak</b>                     | <b>Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sisialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak</b>             | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                          | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                   |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                    |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                         |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya</b>                                                            | <b>Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya</b>                                                                     | <b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>                                |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | Sub Kegiatan Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                                  | <b>Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan</b>                                                               | <b>Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak</b>                                                                                                             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                  |                                                                                                                   |                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | <b>Tersedianya Data Gender dan Anak yang tersedia</b>                                                            | <b>Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia</b>                                                                  | <b>Kegiatan Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                             |  |
|  |  |  |  | Tersajinya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                             | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                  | Sub Kegiatan Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                     |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                  | <b>Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>                                                                            | <b>Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)</b>                                                                                                     |  |
|  |  |  |  | <b>Terlaksananya PD yang memahami PHA</b>                                                                        | <b>Jumlah PD yang memahami PHA</b>                                                                                | <b>Kegiatan Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                           |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | Sub Kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                  | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                        | Sub Kegiatan Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA</b>                                                                                                               | <b>Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA</b>                                                                                                                                    | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</b>                                               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                 | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                           | Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |  |
|  |  |  |  | Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                 | Sub Kegiatan Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                  |  |
|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek   | Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                            |  |
|  |  |  |  | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan      | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan | Sub Kegiatan Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                          |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                              | <b>Prosentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komperhensif</b>                             | <b>Program Perlindungan Khusus Anak</b>                                                                                                                          |  |
|  |  |  |  |                                                                                                                              | <b>Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)</b>                                                                           |                                                                                                                                                                  |  |
|  |  |  |  | <b>Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak</b>                                        | <b>Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak</b>                                   | <b>Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>                                                      |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu                                                       | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu                                                                                  | Sub Kegiatan Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                                          |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA    | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA           | Sub Kegiatan Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                    |  |
|  |  |  |  | Tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                       | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota                                                               | Sub Kegiatan Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                          |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                    | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                | Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                    |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota | Sub Kegiatan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota       |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal</b>                                    | <b>Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal</b>                                            | <b>Kegiatan Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan KoordinasiTingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                     |                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |  |
|--|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                                                     | Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif                                                       | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                                               | Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                                |  |
|  |  |  |  | <b>Tersedianya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak</b>                 | <b>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak</b>                     | <b>Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b> |  |
|  |  |  |  | Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat kabupaten/kota                  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar | Sub Kegiatan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                                  |  |
|  |  |  |  | Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota          | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                      | Sub Kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                             |  |
|  |  |  |  | Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK                                                                       | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                      | Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |  |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |  |
|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  |  | Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                                  | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                                                                                      | Sub Kegiatan Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                         |  |
|  |  |  |  | Terselenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK                                                                                                    | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus                                                                                                                     | Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                                                          |  |
|  |  |  |  | Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaringantar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaringantar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota |  |

| TUJUAN                                                 | SASARAN                                                                                | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR                           | PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN | KET. |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------------------------|-------------------------------|------|
| <b>Memimngkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Daerah</b> |                                                                                        |         |        | <b>Nilai SAKIP</b>                  |                               |      |
|                                                        | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah</b> |         |        | <b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b> |                               |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                 |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan</b> |                                                                                                           | <b>Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan</b>                                             | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>              |  |
|  |  |                                                                                            |                                                                                                           | <b>Persentase Realisasi Anggaran PD</b>                                                              |                                                                                 |  |
|  |  |                                                                                            | <b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD</b>                            | <b>Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%</b>                                               | <b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b> |  |
|  |  |                                                                                            | Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                | Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                    |  |
|  |  |                                                                                            | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |  |
|  |  |                                                                                            | Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD               |  |
|  |  |                                                                                            | Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD                                 |  |
|  |  |                                                                                            | Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                      |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |  |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  |
|  |  |  | Tersunnya laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                         | Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah                                                                                                                       | Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                     |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD</b>                                                                                                                        | <b>Persentase Hasil Reviu RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti</b>                                                                                                        | <b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                                             |  |
|  |  |  |                                                                                                                                                                             | <b>Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti</b>                                                                                       |                                                                                                    |  |
|  |  |  | Tersedianya orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                      | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                      | Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     |  |
|  |  |  | Tersusunnya Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                         |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD</b>                                                                                                                         | <b>Indeks Profesionalitas ASN PD</b>                                                                                                                                   | <b>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                                          |  |
|  |  |  | Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                       | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                 | Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD</b>                                                                                                                              | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                                                                                                        | <b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                                 |  |
|  |  |  | Tersedianya paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan                                                                                                         | Jumlah paket perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan                                                                                                         | Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |                                                                                             |                                                                                        |                                                                                       |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Tersedianya paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                                     | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                         |  |
|  |  |  | Tersedianya paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan                            | Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                |  |
|  |  |  | Tersedianya dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan           | Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan           | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                 |  |
|  |  |  | Tersedianya paket bahan / material yang disediakan                                          | Jumlah paket bahan / material yang disediakan                                          | Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / Material                                              |  |
|  |  |  | Tersusunnya laporan fasilitasi kunjungan tamu                                               | Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu                                               | Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                                |  |
|  |  |  | Tersusunnya laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD                    | Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                     |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD</b>                      | <b>Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar</b>                        | <b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>                  |  |
|  |  |  | Tersusunnya laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik                  |  |
|  |  |  | Tersusunnya laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan                   | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                    |  |
|  |  |  | <b>Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD</b>                      | <b>Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar</b>              | <b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                              |  |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Tersedianya kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya | Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |
|  |  |  | Tersedianya gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi                             | Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi                             | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                  |  |
|  |  |  | Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi       | Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi       | Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                            |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/sub Kegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN/<br>PROGRAM/OUTCOME/<br>KEGIATAN/ SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                   | INDIKATOR<br>OUTCOME/OUTPUT                              | BASELINE<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | KET.                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |                                                          |                  | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                                                                                                                    |
|                                                                                         |                                                          |                  | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                                                                                                                    |
| (1)                                                                                     | (2)                                                      | (3)              | (4)                             | (5)           | (6)    | (7)           | (8)    | (9)           | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                                                                                                               |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK |                                                          |                  |                                 | 6.677.437.795 |        | 7.544.000.000 |        | 7.686.000.000 |        | 7.849.000.000 |        | 7.998.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 -<br>DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA             |                                                          |                  |                                 | 5.682.005.395 |        | 5.889.000.000 |        | 6.020.000.000 |        | 6.151.000.000 |        | 6.278.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 -<br>DINAS PENGENDALIAN<br>PENDUDUK, KELUARGA<br>BERENCANA DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan<br>Umum dan Kepegawaian serta<br>Perencanaan Keuangan   | Tingkat Kepuasan<br>Pengguna Layanan<br>Keseekretariatan | 86,25            | 86,30                           | 5.682.005.395 | 86,40  | 5.889.000.000 | 86,45  | 6.020.000.000 | 86,50  | 6.151.000.000 | 86,55  | 6.278.000.000 |                                                                                                                    |
|                                                                                         | Persentase Realisasi<br>Anggaran Perangkat Daerah        | 96.50            | 96.60                           | 5.682.005.395 | 96.65  | 5.889.000.000 | 96.70  | 6.020.000.000 | 96.75  | 6.151.000.000 | 96.75  | 6.278.000.000 |                                                                                                                    |
| 2.08.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah   |                                                          |                  |                                 | 7.500.000     |        | 27.000.000    |        | 27.000.000    |        | 27.000.000    |        | 27.000.000    |                                                                                                                    |
| Meningkatnya Kualitas<br>Perencanaan, Pengendalian dan<br>Evaluasi Kinerja PD           | Persentase Kinerja PD yang<br>tercapai Minimal 90%       | 90               | 91                              | 7.500.000     | 92     | 27.000.000    | 93     | 27.000.000    | 94     | 27.000.000    | 95     | 27.000.000    |                                                                                                                    |
| 2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan<br>Dokumen Perencanaan Perangkat<br>Daerah               |                                                          |                  |                                 | 3.750.000     |        | 7.000.000     |        | 7.000.000     |        | 7.000.000     |        | 7.000.000     |                                                                                                                    |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                    |                                                                                                                   |   |   |           |   |           |   |           |   |           |   |           |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|---|-----------|--|
| Tersusunnya Dokumen<br>Perencanaan Perangkat Daerah                                                                | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah                                                                 | 3 | 2 | 3.750.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 | 2 | 7.000.000 |  |
| 2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi<br>dan Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                                              |                                                                                                                   |   |   | -         |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |  |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                        | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD                        | 0 | 1 | -         | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |  |
| 2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi<br>dan Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD                                     |                                                                                                                   |   |   | -         |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |  |
| Tersedianya Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>RKA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan RKA-<br>SKPD | 0 | 1 | -         | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |  |
| 2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi<br>dan Penyusunan DPA-SKPD                                                          | Tersedianya Dokumen DPA-<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen DPA-SKPD                   |   |   | -         |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |  |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                        | Jumlah Dokumen DPA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen DPA-<br>SKPD                        | 0 | 1 | -         | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |  |
| 2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi<br>dan Penyusunan Perubahan DPA-<br>SKPD                                            |                                                                                                                   |   |   | -         |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |  |
| Tersedianya Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Dokumen<br>Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD | 0 | 1 | -         | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |  |
| 2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi<br>dan Penyusunan Laporan Capaian<br>Kinerja dan Ikhtisar Realisasi<br>Kinerja SKPD |                                                                                                                   |   |   | -         |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |   | 3.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                |                |               |                |               |                |               |                |               |                |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0              | 1              | -             | 1              | 3.000.000     | 1              | 3.000.000     | 1              | 3.000.000     | 1              | 3.000.000     |  |
| 2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                | 3.750.000     |                | 5.000.000     |                | 5.000.000     |                | 5.000.000     |                | 5.000.000     |  |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 4              | 5              | 3.750.000     | 5              | 5.000.000     | 5              | 5.000.000     | 5              | 5.000.000     | 5              | 5.000.000     |  |
| 2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                | 5.097.494.000 |                | 5.203.000.000 |                | 5.303.000.000 |                | 5.387.576.610 |                | 5.503.000.000 |  |
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD                                                                                                                               | Persentase Hasil Reviu RKA/DPA-SKPD yang ditindaklanjuti                                                                                                               | 100            | 100            |               | 100            |               | 100            |               | 100            |               | 100            |               |  |
|                                                                                                                                                                             | Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti                                                                                              | 100            | 100            |               | 100            |               | 100            |               | 100            |               | 100            |               |  |
| 2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                |                | 5.097.494.000 |                | 5.200.000.000 |                | 5.300.000.000 |                | 5.384.576.610 |                | 5.500.000.000 |  |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 30             | 33             | 5.097.494.000 | 36             | 5.200.000.000 | 39             | 5.300.000.000 | 42             | 5.384.576.610 | 42             | 5.500.000.000 |  |
| 2.17.01.2.02.02 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                             |                                                                                                                                                                        |                |                |               |                | 3.000.000     |                | 3.000.000     |                | 3.000.000     |                | 3.000.000     |  |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                     | 0              | 0              |               | 1              | 3.000.000     | 1              | 3.000.000     | 1              | 3.000.000     | 1              | 3.000.000     |  |
| 2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                                                                                                    |                                                                                                                                                                        |                |                | -             |                | -             |                | -             |                | -             |                | -             |  |
| Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD                                                                                                                                | Indeks Profesionalitas ASN PD                                                                                                                                          | 86,20 (Tinggi) | 86,30 (Tinggi) |               | 86,35 (Tinggi) |               | 86,40 (Tinggi) |               | 86,45 (Tinggi) |               | 86,50 (Tinggi) |               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                              |                                                                              |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 2.08.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya   |                                                                              |     |     | -           |     | -           |     | -           |     | -           |     | -           |  |
| Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                        | JumlahPaketPakaianDinasbeserta Atribut Kelengkapan                           | 0   | 0   | -           | 0   | -           | 0   | -           | 0   | -           | 0   | -           |  |
| 2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                            |                                                                              |     |     | 316.855.975 |     | 324.000.000 |     | 345.000.000 |     | 366.000.000 |     | 383.000.000 |  |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD                                      | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar                     | 100 | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             |  |
| 2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |                                                                              |     |     | 168.406.150 |     | 130.000.000 |     | 140.000.000 |     | 150.000.000 |     | 160.000.000 |  |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan               | 1   | 2   | 168.406.150 | 2   | 130.000.000 | 2   | 140.000.000 | 2   | 150.000.000 | 2   | 160.000.000 |  |
| 2.17.01.2.06.04 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |                                                                              |     |     | 6.100.000   |     | 10.000.000  |     | 11.000.000  |     | 12.000.000  |     | 13.000.000  |  |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan                           | 240 | 2   | 6.100.000   | 2   | 10.000.000  | 2   | 11.000.000  | 2   | 12.000.000  | 2   | 13.000.000  |  |
| 2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                  |                                                                              |     |     | 14.761.100  |     | 30.000.000  |     | 30.000.000  |     | 30.000.000  |     | 30.000.000  |  |
| Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan                                     | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                    | 4   | 2   | 14.761.100  | 2   | 30.000.000  | 2   | 30.000.000  | 2   | 30.000.000  | 2   | 30.000.000  |  |
| 2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                                                              |     |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |  |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 6   | 5   | 10.000.000  | 5   | 10.000.000  | 5   | 10.000.000  | 5   | 10.000.000  | 5   | 10.000.000  |  |
| 2.08.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material                                |                                                                              |     |     | 67.708.725  |     | 70.000.000  |     | 70.000.000  |     | 70.000.000  |     | 70.000.000  |  |
| Tersedianya Bahan/Material                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                  | 4   | 5   | 67.708.725  | 5   | 70.000.000  | 5   | 70.000.000  | 5   | 70.000.000  | 5   | 70.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                      |                                                                                        |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                         |                                                                                        |     |     | 4.000.000   |     | 4.000.000   |     | 4.000.000   |     | 4.000.000   |     | 4.000.000   |  |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                               | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu                                                | 12  | 5   | 4.000.000   | 5   | 4.000.000   | 5   | 4.000.000   | 5   | 4.000.000   | 5   | 4.000.000   |  |
| 2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |                                                                                        |     |     | 45.880.000  |     | 70.000.000  |     | 80.000.000  |     | 90.000.000  |     | 96.000.000  |  |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                    | 100 | 100 | 45.880.000  | 100 | 70.000.000  | 100 | 80.000.000  | 100 | 90.000.000  | 100 | 96.000.000  |  |
| 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |                                                                                        |     |     | 150.697.920 |     | 195.000.000 |     | 195.000.000 |     | 210.423.390 |     | 195.000.000 |  |
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD                                              | Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar                               | 100 | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             |  |
| 2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |                                                                                        |     |     | 75.000.000  |     | 75.000.000  |     | 75.000.000  |     | 75.000.000  |     | 75.000.000  |  |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                             | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12  | 12  | 75.000.000  | 12  | 75.000.000  | 12  | 75.000.000  | 12  | 75.000.000  | 12  | 75.000.000  |  |
| 2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                            |                                                                                        |     |     | 75.697.920  |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |     | 135.423.390 |     | 120.000.000 |  |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                               | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                   | 12  | 12  | 75.697.920  | 12  | 120.000.000 | 12  | 120.000.000 | 12  | 135.423.390 | 12  | 120.000.000 |  |
| 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                                                                        |     |     | 109.457.500 |     | 140.000.000 |     | 150.000.000 |     | 160.000.000 |     | 170.000.000 |  |
| Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD                      | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar                     | 100 | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                     |                                                                                                        |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                        |       |       | 87.629.200  |       | 90.000.000  |       | 100.000.000 |       | 110.000.000 |       | 120.000.000 |                                                                                                     |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 183   | 12    | 87.629.200  | 12    | 90.000.000  | 12    | 100.000.000 | 12    | 110.000.000 | 12    | 120.000.000 |                                                                                                     |
| 2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                        |       |       | 10.914.150  |       | 20.000.000  |       | 20.000.000  |       | 20.000.000  |       | 20.000.000  |                                                                                                     |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                          | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 2     | 2     | 10.914.150  | 2     | 20.000.000  | 2     | 20.000.000  | 2     | 20.000.000  | 2     | 20.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                              |                                                                                                        |       |       | 10.914.150  |       | 30.000.000  |       | 30.000.000  |       | 30.000.000  |       | 30.000.000  |                                                                                                     |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                                    | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi         | 2     | 2     | 10.914.150  | 2     | 30.000.000  | 2     | 30.000.000  | 2     | 30.000.000  | 2     | 30.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                                                 |                                                                                                        |       |       | 456.143.600 |       | 590.000.000 |       | 600.000.000 |       | 630.000.000 |       | 650.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan                                     | Prosentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Langsung APBD                                  | 11,77 | 11,79 | 128.071.800 | 11,80 | 195.000.000 | 11,81 | 200.000.000 | 11,82 | 215.000.000 | 11,83 | 230.000.000 |                                                                                                     |
|                                                                                                                                     | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan                                                    | 60,88 | 61,88 | 328.071.800 | 62,38 | 395.000.000 | 62,88 | 400.000.000 | 63,39 | 415.000.000 | 63,89 | 420.000.000 |                                                                                                     |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                  |                                                                                                                             |       |       |             |       |             |       |             |       |             |       |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|--|
| 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota                        |                                                                                                                             |       |       | 128.071.800 |       | 195.000.000 |       | 200.000.000 |       | 215.000.000 |       | 230.000.000 |  |
| Tersedianya ARG pada Belanja Langsung APBD                                                                                       | Prosentase ARG pada Belanja Langsung Perangkat Daerah                                                                       | 66,67 | 66,80 |             | 66,90 |             | 70,00 |             | 70,10 |             | 70,20 |             |  |
| 2.08.2.02.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                                |                                                                                                                             |       |       | 18.825.000  |       | 18.825.000  |       | 18.825.000  |       | 18.825.000  |       | 18.825.000  |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | 1     | 1     | 18.825.000  | 1     | 18.825.000  | 1     | 18.825.000  | 1     | 18.825.000  | 1     | 18.825.000  |  |
| 2.08.2.02.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                             |       |       | 39.246.800  |       | 39.246.800  |       | 39.246.800  |       | 39.246.800  |       | 39.246.800  |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota                                               | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                                                        | 0     | 0     | 39.246.800  | 1     | 39.246.800  | 1     | 39.246.800  | 1     | 39.246.800  | 1     | 39.246.800  |  |
| 2.08.2.02.01.05 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG kewenangan kab/ kota                                                  |                                                                                                                             |       |       | -           |       | 16.928.200  |       | 16.928.200  |       | 16.928.200  |       | 16.928.200  |  |
| Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/Kota                                                                    | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat Kab/Kota                                                                    | 0     | 0     | -           | 2     | 16.928.200  | 2     | 16.928.200  | 2     | 16.928.200  | 2     | 16.928.200  |  |
| 2.08.2.02.01.06 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                    |                                                                                                                             |       |       | 50.000.000  |       | 50.000.000  |       | 50.000.000  |       | 50.000.000  |       | 55.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                              |               |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|--|
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) kewenangan kab/ kota                                               | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG                                                                           | 0             | 0             | 50.000.000  | 57            | 50.000.000  | 57            | 50.000.000  | 57            | 50.000.000  | 57            | 55.000.000  |  |
| 2.08.2.02.01.07 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                                              |               |               | -           |               | 20.000.000  |               | 25.000.000  |               | 40.000.000  |               | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota                                                                                | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG                                                                                         | 0             | 0             | -           | 1             | 20.000.000  | 1             | 25.000.000  | 1             | 40.000.000  | 1             | 50.000.000  |  |
| 2.08.2.02.01.08 - Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota                                                                                   |                                                                                                                                                              |               |               | 20.000.000  |               | 50.000.000  |               | 50.000.000  |               | 50.000.000  |               | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat kab/kota bagi perangkat daerah, desa, lembagamasy, profesi, dunia usaha, dan media                | Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota                                                                                    | 0             | 0             | 20.000.000  | 57            | 50.000.000  | 57            | 50.000.000  | 57            | 50.000.000  | 57            | 50.000.000  |  |
| 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                         |                                                                                                                                                              |               |               | 310.961.550 |               | 317.889.750 |               | 322.889.750 |               | 337.889.750 |               | 342.889.750 |  |
| Terdapatnya organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | Jumlah organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | 61 Organisasi | 61 Organisasi |             | 61 Organisasi |             | 61 Organisasi |             | 61 Organisasi |             | 61 Organisasi |             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                          |   |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| 2.08.2.02.02.01 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                          |   |    | 58.294.150 |    | 60.000.000 |    | 60.000.000 |    | 60.000.000 |    | 60.000.000 |  |
| Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                | 1 | 1  | 58.294.150 | 1  | 60.000.000 | 1  | 60.000.000 | 1  | 60.000.000 | 1  | 60.000.000 |  |
| 2.08.2.02.02.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                                                  |                                                                                                                                                                                          |   |    | 5.000.000  |    | 7.889.750  |    | 7.889.750  |    | 7.889.750  |    | 7.889.750  |  |
| Meningkatnya Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota  | 0 | 11 | 5.000.000  | 11 | 7.889.750  | 11 | 7.889.750  | 11 | 7.889.750  | 11 | 7.889.750  |  |
| 2.08.2.02.02.03 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                                                |                                                                                                                                                                                          |   |    | 10.000.000 |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |
| Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yang diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 0 | 0  | 10.000.000 | 3  | 5.000.000  | 3  | 5.000.000  | 3  | 5.000.000  | 3  | 5.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                         |    |    |             |    |             |    |             |    |             |     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|-----|-------------|--|
| 2.08.2.02.02.04 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |    |    | -           |    | 10.000.000  |    | 10.000.000  |    | 10.000.000  |     | 10.000.000  |  |
| Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/media dlm rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/kota | Jumlah pengelola organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/media yang mengikuti peningkatan kapasitas dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi | 0  | 0  | -           | 40 | 10.000.000  | 40 | 10.000.000  | 40 | 10.000.000  | 40  | 10.000.000  |  |
| 2.08.2.02.02.08 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                  |                                                                                                                                                                                                         |    |    | 237.667.400 |    | 235.000.000 |    | 240.000.000 |    | 255.000.000 |     | 260.000.000 |  |
| Terlaksananya Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                      | Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi                                                          | 40 | 80 | 237.667.400 | 80 | 235.000.000 | 80 | 240.000.000 | 80 | 255.000.000 | 540 | 260.000.000 |  |
| 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                         |    |    | 17.110.250  |    | 77.110.250  |    | 77.110.250  |    | 77.110.250  |     | 77.110.250  |  |
| Terlaksananya SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan                                                                                                                                                      | Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan                                                                                                                                             | 21 | 21 |             | 21 |             | 21 |             | 21 |             | 21  |             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                  |   |   |   |     |            |     |            |     |            |     |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|-----|------------|-----|------------|-----|------------|-----|------------|--|
| 2.08.2.02.03.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                  |   |   | - |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |  |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Organisasi Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan         | 3 | 0 | - | 11  | 10.000.000 | 11  | 10.000.000 | 11  | 10.000.000 | 11  | 10.000.000 |  |
| 2.08.2.02.03.02 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                  |   |   | - |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |  |
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 0 | 0 | - | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 | 100 | 10.000.000 |  |
| 2.08.2.02.03.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                  |   |   | - |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |     | 10.000.000 |  |
| Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia             | 0 | 0 | - | 1   | 10.000.000 | 1   | 10.000.000 | 1   | 10.000.000 | 1   | 10.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |   |   |   |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| 2.08.2.02.03.04 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                               |                                                                                                                                                 |   |   | - |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada organisasi/ lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota dalam pemenuhan standar layanan                                             | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia                            | 0 | 0 | - | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 |  |
| 2.08.2.02.03.05 - Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         |                                                                                                                                                 |   |   | - |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |
| Meningkatnya Kapasitas Sumber daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan kab/ kota dalam pengembangan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) Ekonomi/ Lestari/ Sehat/ Pintar/ Leadership/Hukum | Jumlah perempuan SIAP (Suara dan Aksi Perempuan Pelopor) di bidang Ekonomi/ Lestari/ Sehat/Pintar/Kepemimpinan / Hukumpd LPLPP tingkat kab/kota | 0 | 0 | - | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 | 20 | 10.000.000 |  |
| 2.08.2.02.03.06 - Pengembangan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                               |                                                                                                                                                 |   |   | - |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                 |                                                                                      |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terbentuknya Pusat Informasi Sahabat Perempuan (PRISMA) pada lembaga pemerintah dan LPLPP kewenangan kab/kota                                                   | Jumlah Pusat Informasi Sahabat Perempuan (Prisma) yg terbentuk di kab/kota           | 0   | 0   | -           | 1   | 10.000.000  | 1   | 10.000.000  | 1   | 10.000.000  | 1   | 10.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.2.02.03.08 - Penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                           |                                                                                      |     |     | 17.110.250  |     | 17.110.250  |     | 17.110.250  |     | 17.110.250  |     | 17.110.250  |                                                                                                     |
| Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan                                                                                   | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan               | 1   | 1   | 17.110.250  | 1   | 17.110.250  | 1   | 17.110.250  | 1   | 17.110.250  | 1   | 17.110.250  |                                                                                                     |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                        |                                                                                      |     |     | 215.000.000 |     | 370.000.000 |     | 370.000.000 |     | 370.000.000 |     | 370.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| Meningkatnya perlindungan Perempuan                                                                                                                             | Prosentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komperhensif | 100 | 100 | 215.000.000 | 100 | 370.000.000 | 100 | 370.000.000 | 100 | 370.000.000 | 100 | 370.000.000 |                                                                                                     |
| 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                      |     |     | 50.000.000  |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |                                                                                                     |
| Teraksananya lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                       | Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan  | 2   | 2   |             | 2   |             | 2   |             | 2   |             | 2   |             |                                                                                                     |
| 2.08.03.2.01.01 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                      |     |     | -           |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |                                                                                                     |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                |   |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | 1 | 1 | -           | 1  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  |  |
| 2.08.03.2.01.02 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                                                |   |   | -           |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                       | 0 | 0 | -           | 57 | 50.000.000  | 57 | 50.000.000  | 57 | 50.000.000  | 57 | 50.000.000  |  |
| 2.08.03.2.01.04 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                                |   |   | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                       | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                     | 0 | 0 | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  |  |
| 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                |   |   | 115.000.000 |    | 140.000.000 |    | 140.000.000 |    | 140.000.000 |    | 140.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |    |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| Teraksananya mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak                                   | Jumlah mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak                              | 6  | 6 |            | 6 |            | 6 |            | 6 |            | 6 |            |  |
| 2.08.03.2.02.01 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                              |    |   | 63.000.000 |   | 63.000.000 |   | 63.000.000 |   | 63.000.000 |   | 63.000.000 |  |
| Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                         | 12 | 8 | 63.000.000 | 8 | 63.000.000 | 8 | 63.000.000 | 8 | 63.000.000 | 8 | 63.000.000 |  |
| 2.08.03.2.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                              |    |   | -          |   | 27.000.000 |   | 27.000.000 |   | 27.000.000 |   | 27.000.000 |  |
| Tersedianya Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi              | Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0  | 0 | -          | 3 | 27.000.000 | 3 | 27.000.000 | 3 | 27.000.000 | 3 | 27.000.000 |  |
| 2.08.03.2.02.08 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                              |    |   | 52.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |   |   |            |   |             |   |             |   |             |   |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| Terfasilitasinya Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                      | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota                                   | 3 | 3 | 52.000.000 | 3 | 50.000.000  | 3 | 50.000.000  | 3 | 50.000.000  | 3 | 50.000.000  |  |
| 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                             |                                                                                                                                                        |   |   | 50.000.000 |   | 110.000.000 |   | 110.000.000 |   | 110.000.000 |   | 110.000.000 |  |
| Tersedianya lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA                                                                                              | Jumlah lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA                                                                                                      | 3 | 3 |            | 3 |             | 3 |             | 3 |             | 3 |             |  |
| 2.08.03.2.03.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                        |   |   | -          |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |  |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota     | Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | -          | 1 | 20.000.000  | 1 | 20.000.000  | 1 | 20.000.000  | 1 | 20.000.000  |  |
| 2.08.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota   |                                                                                                                                                        |   |   | -          |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                            |   |   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penangananbagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota    | Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penangananbagi PerempuanKorban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas | 0 | 0 | -           | 3 | 20.000.000  | 3 | 20.000.000  | 3 | 20.000.000  | 3 | 20.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.03.2.03.03 - Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                            |   |   |             |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |   | 20.000.000  |                                                                                                     |
| Tersedianyakebutuhan spesifikbagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Spesifik                          | 5 | 0 | -           | 3 | 20.000.000  | 3 | 20.000.000  | 3 | 20.000.000  | 3 | 20.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.03.2.03.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota              |                                                                                                                                                            |   |   | 50.000.000  |   | 50.000.000  |   | 50.000.000  |   | 50.000.000  |   | 50.000.000  |                                                                                                     |
| Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                  | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                    | 1 | 0 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  | 1 | 50.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                   |                                                                                                                                                            |   |   | 108.080.000 |   | 290.000.000 |   | 290.000.000 |   | 290.000.000 |   | 290.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                  |     |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak                    | Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berprespektif Gender dan Hak Anak sesuai Standart                                                                           | 3   | 3   | 108.080.000 | 3   | 290.000.000 | 3   | 290.000.000 | 3   | 290.000.000 | 3   | 290.000.000 |  |
| 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                                  |     |     | 90.000.000  |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |     | 120.000.000 |  |
| Meningkatnya Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa                                                             | Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa                                                                                          | 304 | 304 |             | 304 |             | 304 |             | 304 |             | 304 |             |  |
| 2.08.04.2.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                                                                  |     |     | 50.000.000  |     | 50.000.000  |     | 50.000.000  |     | 50.000.000  |     | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang mendapat Advokasi dan Pendampingan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0   | 0   | 50.000.000  | 57  | 50.000.000  | 57  | 50.000.000  | 57  | 50.000.000  | 57  | 50.000.000  |  |
| 2.08.04.2.01.02 - Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                  |     |     | 10.000.000  |     | 40.000.000  |     | 40.000.000  |     | 40.000.000  |     | 40.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |   |   |            |   |             |   |             |   |             |   |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| Tersedianya Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                               | Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia | 0 | 0 | 10.000.000 | 1 | 40.000.000  | 1 | 40.000.000  | 1 | 40.000.000  | 1 | 40.000.000  |  |
| 2.08.04.2.01.03 - Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                    |                                                                                                                                                |   |   | 30.000.000 |   | 30.000.000  |   | 30.000.000  |   | 30.000.000  |   | 30.000.000  |  |
| Terlaksananya Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                            | 0 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000  | 1 | 30.000.000  | 1 | 30.000.000  | 1 | 30.000.000  |  |
| 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                |   |   | 18.080.000 |   | 120.000.000 |   | 120.000.000 |   | 120.000.000 |   | 120.000.000 |  |
| Tersedianya lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sisialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak                                                    | Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sisialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak                    | 3 | 3 |            | 3 |             | 3 |             | 3 |             | 3 |             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| 2.08.04.2.02.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                 |   |   | 18.080.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Organisasi Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan                                           | 0 | 2 | 18.080.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 | 3 | 50.000.000 |  |
| 2.08.04.2.02.02 - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                 |   |   | -          |   | 40.000.000 |   | 40.000.000 |   | 40.000.000 |   | 40.000.000 |  |
| Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                     | Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | -          | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 |  |
| 2.08.04.2.02.03 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                         |                                                                                                                                                 |   |   | -          |   | 30.000.000 |   | 30.000.000 |   | 30.000.000 |   | 30.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                            | 0 | 0 | -          | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 | 1 | 30.000.000 |                                                                                                     |
| 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                                                           |   |   | -          |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |                                                                                                     |
| Tersedianya Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya                                                                     | Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya                                                                            | 1 | 1 |            | 1 |            | 1 |            | 1 |            | 1 |            |                                                                                                     |
| 2.08.04.2.03.01 - Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                           |   |   | -          |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |                                                                                                     |
| Tersedianya Layanan komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota        | Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia | 0 | 0 | -          | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |                                                                                                     |
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |   |   | 84.040.000 |   | 85.000.000 |   | 86.000.000 |   | 88.000.000 |   | 90.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                            |                                                                                                                   |       |       |            |       |            |       |            |       |            |       |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|--|
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                                              | Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak Dalam Perencanaan, Evaluasi dan / atau Penyusunan Kebijakan              | 96,92 | 97,10 | 84.040.000 | 97,20 | 85.000.000 | 97,30 | 86.000.000 | 97,40 | 88.000.000 | 97,50 | 90.000.000 |  |
| 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                   |       |       | 84.040.000 |       | 85.000.000 |       | 86.000.000 |       | 88.000.000 |       | 90.000.000 |  |
| Tersedianya Data Gender dan Anak                                                                                                           | Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia                                                                         | 57    | 57    |            | 57    |            | 57    |            | 57    |            | 57    |            |  |
| 2.08.05.2.01.01 - Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota                                                             |                                                                                                                   |       |       | 30.000.000 |       | 20.000.000 |       | 20.000.000 |       | 20.000.000 |       | 20.000.000 |  |
| Tersedianya Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                  | 1     | 0     | 30.000.000 | 1     | 20.000.000 | 1     | 20.000.000 | 1     | 20.000.000 | 1     | 20.000.000 |  |
| 2.08.05.2.01.02 - Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                   |       |       | 30.000.000 |       | 20.000.000 |       | 20.000.000 |       | 20.000.000 |       | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota                           | Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota | 0     | 0     | 30.000.000 | 1     | 20.000.000 | 1     | 20.000.000 | 1     | 20.000.000 | 1     | 20.000.000 |  |
| 2.08.05.2.01.03 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                   |       |       | 24.040.000 |       | 45.000.000 |       | 46.000.000 |       | 48.000.000 |       | 50.000.000 |  |
| Tersedianya Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                    | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia                                                  | 1     | 1     | 24.040.000 | 1     | 45.000.000 | 1     | 46.000.000 | 1     | 48.000.000 | 1     | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |       |       |            |       |             |       |             |       |             |       |             |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |       |       | 61.218.800 |       | 105.000.000 |       | 105.000.000 |       | 105.000.000 |       | 105.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                                          | Indeks Pemenuhan Hak Anak (PHA)                                                                                                                                                                            | 66,22 | 66,24 | 61.218.800 | 66,25 | 105.000.000 | 66,26 | 105.000.000 | 66,27 | 105.000.000 | 66,28 | 105.000.000 |                                                                                                     |
| 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                                                                            |       |       | 36.893.800 |       | 45.000.000  |       | 45.000.000  |       | 45.000.000  |       | 45.000.000  |                                                                                                     |
| Tersedianya PD yang memahami PHA                                                                                                                                  | Jumlah PD yang memahami PHA                                                                                                                                                                                | 57    | 57    |            | 57    |             | 57    |             | 57    |             | 57    |             |                                                                                                     |
| 2.08.06.2.01.01 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                            |       |       | -          |       | 10.000.000  |       | 10.000.000  |       | 10.000.000  |       | 10.000.000  |                                                                                                     |
| Terlaksananya Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota  | Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha | 0     | 0     | -          | 27    | 10.000.000  | 27    | 10.000.000  | 27    | 10.000.000  | 27    | 10.000.000  |                                                                                                     |
| 2.08.06.2.01.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                                                                                                                            |       |       | -          |       | 5.000.000   |       | 5.000.000   |       | 5.000.000   |       | 5.000.000   |                                                                                                     |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |    |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                         | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           | 0  | 0  | -          | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  |  |
| 2.08.06.2.01.05 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                                                     |    |    | 36.893.800 |    | 30.000.000 |    | 30.000.000 |    | 30.000.000 |    | 30.000.000 |  |
| Terlaksananya OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota | 1  | 1  | 36.893.800 | 1  | 30.000.000 | 1  | 30.000.000 | 1  | 30.000.000 | 1  | 30.000.000 |  |
| 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                     |    |    | 24.325.000 |    | 60.000.000 |    | 60.000.000 |    | 60.000.000 |    | 60.000.000 |  |
| Tersedianya lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA                                                                                                                      | Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA                                                                                                                    | 27 | 27 |            | 27 |            | 27 |            | 27 |            | 27 |            |  |
| 2.08.06.2.02.01 - Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                             |                                                                                                                                                                                     |    |    | -          |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                 |    |   |   |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Tersedianya Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                   | Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | 96 | 0 | - | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 | 10 | 10.000.000 |  |
| 2.08.06.2.02.02 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                 |    |   | - |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | 0  | 0 | - | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  |  |
| 2.08.06.2.02.03 - Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                 |    |   | - |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |
| Tersedianya Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anakbagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0  | 0 | - | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |   |   |            |    |             |    |             |    |             |    |             |                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 2.08.06.2.02.04 - Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota            |                                                                                                                                  |   |   | -          |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |                                                                              |
| Terlaksananya Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                    | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | 0 | 0 | -          | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   |                                                                              |
| 2.08.06.2.02.05 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                   |                                                                                                                                  |   |   | -          |    | 10.000.000  |    | 10.000.000  |    | 10.000.000  |    | 10.000.000  |                                                                              |
| Tersedianya SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek                   | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek            | 0 | 0 | -          | 50 | 10.000.000  | 50 | 10.000.000  | 50 | 10.000.000  | 50 | 10.000.000  |                                                                              |
| 2.08.06.2.02.09 - Pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                  |   |   | 24.325.000 |    | 20.000.000  |    | 20.000.000  |    | 20.000.000  |    | 20.000.000  |                                                                              |
| Tersedianya lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan                 | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan          | 1 | 1 | 24.325.000 | 1  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  | 1  | 20.000.000  |                                                                              |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                   |                                                                                                                                  |   |   | 70.950.000 |    | 215.000.000 |    | 215.000.000 |    | 215.000.000 |    | 215.000.000 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                       |                                                                                      |       |       |            |       |             |      |             |       |             |       |             |                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------|-------|-------------|------|-------------|-------|-------------|-------|-------------|------------------------|
|                                                                                                                                                                       |                                                                                      |       |       |            |       |             |      |             |       |             |       |             | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak                              | Prosentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus Yang Mendapatkan Layanan Komperhensif | 100   | 100   | 70.950.000 | 100   | 215.000.000 | 100  | 215.000.000 | 100   | 215.000.000 | 100   | 215.000.000 |                        |
|                                                                                                                                                                       | Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)                                               | 79,36 | 79,38 |            | 79,39 |             | 79,4 |             | 79,41 |             | 79,42 |             |                        |
| 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                      |       |       | 25.950.000 |       | 65.950.000  |      | 65.950.000  |       | 65.950.000  |       | 65.950.000  |                        |
| Tersedianya Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak                                                                                   | Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak       | 57    | 57    |            | 57    |             | 57   |             | 57    |             | 57    |             |                        |
| 2.08.07.2.01.03 - Penguatan kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan kabupaten/kota layak Anak, kecamatan layak Anak, desa/kelurahan layak Anak, dan DRPPA |                                                                                      |       |       | -          |       | 10.000.000  |      | 10.000.000  |       | 10.000.000  |       | 10.000.000  |                        |
| Terlaksananya kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terpadu                                                                                                | Jumlah kegiatan pencegahan KtA terpadu                                               | 0     | 0     | -          | 1     | 10.000.000  | 1    | 10.000.000  | 1     | 10.000.000  | 1     | 10.000.000  |                        |
| 2.08.07.2.01.04 - Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                                            |                                                                                      |       |       | -          |       | 20.000.000  |      | 20.000.000  |       | 20.000.000  |       | 20.000.000  |                        |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                         |                                                                                                                              |    |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Terlaksananya advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA                  | Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA           | 15 | 0 | -          | 15 | 20.000.000 | 15 | 20.000.000 | 15 | 20.000.000 | 15 | 20.000.000 |  |
| 2.08.07.2.01.05 - Penyusunan kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                    |                                                                                                                              |    |   | -          |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |
| Tersusunnya kebijakan perlindungan khusus anak kewenangan kab/ kota                                                                     | Jumlah kebijakan perlindungan khusus anak di tingkat kab/ kota                                                               | 0  | 0 | -          | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 |  |
| 2.08.07.2.01.06 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                              |                                                                                                                              |    |   | 13.350.000 |    | 13.350.000 |    | 13.350.000 |    | 13.350.000 |    | 13.350.000 |  |
| Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                  | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                | 1  | 1 | 13.350.000 | 1  | 13.350.000 | 1  | 13.350.000 | 1  | 13.350.000 | 1  | 13.350.000 |  |
| 2.08.07.2.01.07 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                              |    |   | 12.600.000 |    | 12.600.000 |    | 12.600.000 |    | 12.600.000 |    | 12.600.000 |  |
| Tersusunnya pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota       | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota | 8  | 8 | 12.600.000 | 1  | 12.600.000 | 1  | 12.600.000 | 1  | 12.600.000 | 1  | 12.600.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                |                                                                                         |     |     |            |     |             |     |             |     |             |     |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |                                                                                         |     |     | -          |     | 40.000.000  |     | 40.000.000  |     | 40.000.000  |     | 40.000.000  |  |
| Tersedianya Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal                                                                | Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal              | 3   | 3   |            | 3   |             | 3   |             | 3   |             | 3   |             |  |
| 2.08.07.2.02.01 - Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                         |     |     | -          |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |  |
| Tersedianya Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                           | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan                                          | 5   | 0   | -          | 10  | 20.000.000  | 10  | 20.000.000  | 10  | 20.000.000  | 10  | 20.000.000  |  |
| 2.08.07.2.02.07 - Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK                                                                                          |                                                                                         |     |     | -          |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |  |
| Terlaksananya Layanan AMPK yang terintegrasi dan komprehensif                                                                                  | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan                                                    | 5   | 0   | -          | 10  | 20.000.000  | 10  | 20.000.000  | 10  | 20.000.000  | 10  | 20.000.000  |  |
| 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                         |     |     | 45.000.000 |     | 109.050.000 |     | 109.050.000 |     | 109.050.000 |     | 109.050.000 |  |
| Terlaksananya Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak                                                 | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak | 304 | 304 |            | 304 |             | 304 |             | 304 |             | 304 |             |  |
| 2.08.07.2.03.04 - Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan AMPK tingkat Kabupaten/kota                                                            |                                                                                         |     |     | -          |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |     | 10.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                          |                                                                                                                    |   |   |   |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Peningkatan Kapasitas Sarana dan Prasarana Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat kabupaten/kota                                       | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan AMPK di tingkat Provinsi yang memiliki sarana dan prasarana layanan sesuai standar | 0 | 0 | - | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 |  |
| 2.08.07.2.03.05 - Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                 |                                                                                                                    |   |   | - |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |
| Terbangunnya kerjasama antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                               | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                      | 0 | 0 | - | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 | 1  | 10.000.000 |  |
| 2.08.07.2.03.06 - Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota |                                                                                                                    |   |   | - |    | 20.000.000 |    | 20.000.000 |    | 20.000.000 |    | 20.000.000 |  |
| Penguatan Kapasitas SDM penyedia layanan AMPK                                                                                            | Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK                                                      | 0 | 0 | - | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 | 40 | 20.000.000 |  |
| 2.08.07.2.03.07 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah Kabupaten/kota           |                                                                                                                    |   |   | - |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |    | 10.000.000 |  |
| Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                         | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak                                                                                | 0 | 0 | - | 3  | 10.000.000 | 3  | 10.000.000 | 3  | 10.000.000 | 3  | 10.000.000 |  |
| 2.08.07.2.03.08 - Penyediaan Bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                                            |                                                                                                                    |   |   | - |    | 14.050.000 |    | 14.050.000 |    | 14.050.000 |    | 14.050.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |       |       |                |       |                |       |                |       |                |       |                |                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terseleenggaranya penyediaan bantuan kebutuhan khusus bagi AMPK                                                                                                        | Jumlah AMPK yang memperoleh Bantuan Kebutuhan Khusus                                                                                                                     | 0     | 0     | -              | 3     | 14.050.000     | 3     | 14.050.000     | 3     | 14.050.000     | 3     | 14.050.000     |                                                                                                     |
| 2.08.07.2.03.09 - Koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota |                                                                                                                                                                          |       |       | 45.000.000     |       | 45.000.000     |       | 45.000.000     |       | 45.000.000     |       | 45.000.000     |                                                                                                     |
| terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaringantar lembaga penyedia layanananakayang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota       | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaringantar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota | 0     | 0     | 45.000.000     | 1     | 45.000.000     | 1     | 45.000.000     | 1     | 45.000.000     | 1     | 45.000.000     |                                                                                                     |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                         |                                                                                                                                                                          |       |       | 14.217.422.400 |       | 15.895.121.100 |       | 15.905.121.100 |       | 15.915.121.100 |       | 15.925.121.100 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                                  |                                                                                                                                                                          |       |       | -              |       | -              |       | -              |       | -              |       | -              | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |
| 2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                                |                                                                                                                                                                          |       |       | 1.590.051.300  |       | 2.210.400.000  |       | 2.210.400.000  |       | 2.210.400.000  |       | 2.210.400.000  |                                                                                                     |
| Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana                                                                                                                            | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)                                                                                                                         | 1,95  | 1,95  | 1.590.051.300  | 1,95  | 2.210.400.000  | 1,95  | 2.210.400.000  | 1,95  | 2.210.400.000  | 1,95  | 2.210.400.000  |                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                        | Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 (Age Specific Fertility Rate / ASFR (15-19)                                                                                          | 14,80 | 14,78 |                | 14,77 |                | 14,76 |                | 14,75 |                | 14,74 |                |                                                                                                     |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                               |     |     |            |     |             |     |             |     |             |     |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|--|
| 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |                                                                                                               |     |     | 72.682.500 |     | 430.000.000 |     | 430.000.000 |     | 430.000.000 |     | 430.000.000 |  |
| Tersedianya Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana                                                           | Jumlah Petugas Bangga kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana           | 100 | 100 |            | 100 |             | 100 |             | 100 |             | 100 |             |  |
| 2.14.02.2.01.002 - Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                               |     |     | -          |     | 100.000.000 |     | 100.000.000 |     | 100.000.000 |     | 100.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota | 1   | 0   | -          | 1   | 100.000.000 | 1   | 100.000.000 | 1   | 100.000.000 | 1   | 100.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.004 - Pelaksanaan Survei / Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                               |                                                                                                               |     |     | -          |     | 26.000.000  |     | 26.000.000  |     | 26.000.000  |     | 26.000.000  |  |
| Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                                                  | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                    | 0   | 0   | -          | 1   | 26.000.000  | 1   | 26.000.000  | 1   | 26.000.000  | 1   | 26.000.000  |  |
| 2.14.02.2.01.007 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                              |                                                                                                               |     |     | -          |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |     | 20.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |   |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                             | 0 | 0 | -          | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.008 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                |                                                                                                                                                                                                               |   |   | -          |    | 20.000.000 |    | 20.000.000 |    | 20.000.000 |    | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Non formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                    | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                          | 0 | 0 | -          | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 | 1  | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.009 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non formal dan Informal |                                                                                                                                                                                                               |   |   | 64.000.000 |    | 64.000.000 |    | 64.000.000 |    | 64.000.000 |    | 64.000.000 |  |
| Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal diSatuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal        | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal | 0 | 0 | 64.000.000 | 18 | 64.000.000 | 18 | 64.000.000 | 18 | 64.000.000 | 18 | 64.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |   |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| 2.14.02.2.01.012 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan    |                                                                                                                                                                                                    |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan         | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan    | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.013 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan |                                                                                                                                                                                                    |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan      | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                |                                                                                                  |   |   |           |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                    | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan | 0 | 0 | -         | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                      |                                                                                                  |   |   | -         |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                       | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                    | 0 | 0 | -         | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.018 - Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal                                                         |                                                                                                  |   |   | -         |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal                                                              | Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal         | 0 | 0 | -         | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.019 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                  |                                                                                                  |   |   | 8.682.500 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                                                                                    | Jumlah Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal                 | 1 | 1 | 8.682.500 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.01.20 - Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) |                                                                                                  |   |   | -         |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| Terlaksananya Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah DokumenHasil Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | 0     | 0     | -             | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    |  |
| 2.14.02 .2.01.21 - Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal                                                                           |                                                                                                                                                                 |       |       | -             |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |  |
| Terlaksananya Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal                                                                                | Jumlah Kerjasama Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal yang dilaksanakan                                                                              | 0     | 0     | -             | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    |  |
| 2.14.02 .2.01.22 - Pelaksanaan penyediaan data dan sosialisasi Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                                   |                                                                                                                                                                 |       |       | -             |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |  |
| Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                          | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan                                                                                              | 0     | 0     | -             | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    |  |
| 2.14.02 .2.01.23 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana                                                                                           |                                                                                                                                                                 |       |       | -             |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |       | 20.000.000    |  |
| Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                               | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                           | 0     | 0     | -             | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    |  |
| 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                              |                                                                                                                                                                 |       |       | 1.517.368.800 |       | 1.780.400.000 |       | 1.780.400.000 |       | 1.780.400.000 |       | 1.780.400.000 |  |
| Tersedianya Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri.                                                                                                             | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri.                                                                                                           | 42,80 | 52,80 |               | 57,80 |               | 62,80 |               | 67,80 |               | 72,80 |               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                        |                                                                                     |   |   |            |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| 2.14.02.2.02.02 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                          |                                                                                     |   |   | -          |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                              | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan                          | 0 | 0 | -          | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.02.05 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                |                                                                                     |   |   | -          |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                    | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan                                                   | 0 | 0 | -          | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.02.06 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan |                                                                                     |   |   | -          |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya PengembanganModel Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan      | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan | 0 | 0 | -          | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02.2.02.09 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   |                                                                                     |   |   | 60.000.000 |   | 60.000.000 |   | 60.000.000 |   | 60.000.000 |   | 60.000.000 |  |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga       | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   | 1 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 | 1 | 60.000.000 |  |
| 2.14.02.2.02.10 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                    |                                                                                     |   |   | -          |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                        | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan                      | 0 | 0 | -          | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |  |
| 2.14.02.2.02.11 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                               |                                                                                     |   |   | -          |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Tersedianya Data dan Informasi Keluarga                                                                                                                                                    | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya                                                                                                                                                 | 0  | 0  | -             | 1  | 50.000.000    | 1  | 50.000.000    | 1  | 50.000.000    | 1  | 50.000.000    |  |
| 2.14.02.2.02.12 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                     |    |    | 242.400.000   |    | 242.400.000   |    | 242.400.000   |    | 242.400.000   |    | 242.400.000   |  |
| Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                                                                                                                             | 1  | 1  | 242.400.000   | 1  | 242.400.000   | 1  | 242.400.000   | 1  | 242.400.000   | 1  | 242.400.000   |  |
| 2.14.02.2.02.13 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                     |    |    | 1.188.000.000 |    | 1.188.000.000 |    | 1.188.000.000 |    | 1.188.000.000 |    | 1.188.000.000 |  |
| Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                         | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                                                                 | 1  | 1  | 1.188.000.000 | 1  | 1.188.000.000 | 1  | 1.188.000.000 | 1  | 1.188.000.000 | 1  | 1.188.000.000 |  |
| 2.14.02.2.02.15 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                                  |                                                                                                                                                                                                     |    |    | 26.968.800    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |  |
| Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk | 10 | 10 | 26.968.800    | 10 | 30.000.000    | 10 | 30.000.000    | 10 | 30.000.000    | 10 | 30.000.000    |  |
| 2.14.02.2.02.16 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |    |    | -             |    | 20.000.000    |    | 20.000.000    |    | 20.000.000    |    | 20.000.000    |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                     |                                                                                                             |   |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota                                                    | Terlaksananyasistemperingatan dini pengendalian penduduk                                                    | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02 .2.02.17 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB                                                                                 |                                                                                                             |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB                                                                         | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan                                       | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02 .2.02.18 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana                                                         |                                                                                                             |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana                            | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02 .2.02.19 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                     |                                                                                                             |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |
| Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                          | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) | 0 | 0 | - | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 | 1 | 20.000.000 |  |
| 2.14.02 .2.02.20 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                            |                                                                                                             |   |   | - |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |   | 20.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                |                                                                                 |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB) | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga | 0     | 0     | -             | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    | 1     | 20.000.000    |  |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                            |                                                                                 |       |       | 6.463.655.000 |       | 6.519.200.000 |       | 6.519.200.000 |       | 6.519.200.000 |       | 6.519.200.000 |  |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                   | Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/modern contraceptive (mCPR)                 | 80,06 | 80,08 | 6.463.655.000 | 80,09 | 6.519.200.000 | 80,10 | 6.519.200.000 | 80,11 | 6.519.200.000 | 80,12 | 6.519.200.000 |  |
|                                                                                                                                                                                | Prevalensi Kebutuhan ber KB tidak terpenuhi (Unmed Need)                        | 6,99  | 6,90  | -             | 6,85  | -             | 6,80  | -             | 6,75  | -             | 6,70  |               |  |
| 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal                                         |                                                                                 |       |       | 1.621.455.000 |       | 1.632.000.000 |       | 1.632.000.000 |       | 1.632.000.000 |       | 1.632.000.000 |  |
| Tersedianya masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)                                                                                                | Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)  | 42,80 | 52,80 |               | 57,80 |               | 62,80 |               | 67,80 |               | 72,80 |               |  |
| 2.14.03.2.01.08 -Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                    |                                                                                 |       |       | 4.455.000     |       | 5.000.000     |       | 5.000.000     |       | 5.000.000     |       | 5.000.000     |  |
| TerlaksananyaPengendalianProgr am KKBPK                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK                                 | 1     | 1     | 4.455.000     | 1     | 5.000.000     | 1     | 5.000.000     | 1     | 5.000.000     | 1     | 5.000.000     |  |
| 2.14.03.2.01.09 -Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana                                                                                                   |                                                                                 |       |       | -             |       | 5.000.000     |       | 5.000.000     |       | 5.000.000     |       | 5.000.000     |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                             | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                              | 0  | 0  | -           | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   |  |
| 2.14.03.2.01.10 -Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    | 882.000.000 |    | 882.000.000 |    | 882.000.000 |    | 882.000.000 |    | 882.000.000 |  |
| Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                | 18 | 18 | 882.000.000 | 18 | 882.000.000 | 18 | 882.000.000 | 18 | 882.000.000 | 18 | 882.000.000 |  |
| 2.14.03.2.01.11 -Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)                                            |                                                                                                                                                                                                                                        |    |    | 360.000.000 |    | 360.000.000 |    | 360.000.000 |    | 360.000.000 |    | 360.000.000 |  |
| Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)Melalui RapatKoordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), danMini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | 10 | 10 | 360.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 360.000.000 | 10 | 360.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                    |   |   |               |   |               |   |               |   |               |   |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|
| 2.14.03.2.01.12 -Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                           |                                                                                                                                                                                    |   |   | 125.000.000   |   | 125.000.000   |   | 125.000.000   |   | 125.000.000   |   | 125.000.000   |  |
| Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | 1 | 1 | 125.000.000   | 1 | 125.000.000   | 1 | 125.000.000   | 1 | 125.000.000   | 1 | 125.000.000   |  |
| 2.14.03.2.01.13 -Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                      |                                                                                                                                                                                    |   |   | -             |   | 5.000.000     |   | 5.000.000     |   | 5.000.000     |   | 5.000.000     |  |
| Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal            | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan  | 0 | 0 | -             | 1 | 5.000.000     | 1 | 5.000.000     | 1 | 5.000.000     | 1 | 5.000.000     |  |
| 2.14.03.2.01.14 -Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                          |                                                                                                                                                                                    |   |   | 250.000.000   |   | 250.000.000   |   | 250.000.000   |   | 250.000.000   |   | 250.000.000   |  |
| Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                | 1 | 1 | 250.000.000   | 1 | 250.000.000   | 1 | 250.000.000   | 1 | 250.000.000   | 1 | 250.000.000   |  |
| 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                    |   |   | 2.280.550.000 |   | 2.255.550.000 |   | 2.255.550.000 |   | 2.255.550.000 |   | 2.255.550.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                       |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| Terlaksananya PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK                                                                                                                                            | Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK                                                                                                                     | 60  | 54  |               | 54  |               | 54  |               | 54  |               | 54  |               |  |
| 2.14.03.2.02.02 -Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                       |     |     | -             |     | 5.000.000     |     | 5.000.000     |     | 5.000.000     |     | 5.000.000     |  |
| Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                                   | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia                                                                                                            | 18  | 0   | -             | 1   | 5.000.000     | 1   | 5.000.000     | 1   | 5.000.000     | 1   | 5.000.000     |  |
| 2.14.03.2.02.04 -Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                              |                                                                                                                                                                       |     |     | 1.070.650.000 |     | 1.070.650.000 |     | 1.070.650.000 |     | 1.070.650.000 |     | 1.070.650.000 |  |
| Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                 | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                     | 304 | 304 | 1.070.650.000 | 304 | 1.070.650.000 | 304 | 1.070.650.000 | 304 | 1.070.650.000 | 304 | 1.070.650.000 |  |
| 2.14.03.2.02.05 -Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                            |                                                                                                                                                                       |     |     | 1.047.900.000 |     | 1.047.900.000 |     | 1.047.900.000 |     | 1.047.900.000 |     | 1.047.900.000 |  |
| Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB | 1   | 1   | 1.047.900.000 | 1   | 1.047.900.000 | 1   | 1.047.900.000 | 1   | 1.047.900.000 | 1   | 1.047.900.000 |  |
| 2.14.03.2.02.06 -Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                                                                                                                                                                       |     |     | 162.000.000   |     | 162.000.000   |     | 162.000.000   |     | 162.000.000   |     | 162.000.000   |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    |               |    |               |    |               |    |               |    |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|----|---------------|--|
| Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | 1  | 1  | 162.000.000   | 1  | 162.000.000   | 1  | 162.000.000   | 1  | 162.000.000   | 1  | 162.000.000   |  |
| 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | 2.024.050.000 |    | 2.074.050.000 |    | 2.074.050.000 |    | 2.074.050.000 |    | 2.074.050.000 |  |
| Tersedianya Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP                                                                                                                                                                                           | Persentase Fasilitas kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP                                                                                                                                                                                                   | 98 | 98 |               | 98 |               | 98 |               | 98 |               | 98 |               |  |
| 2.14.03.02.03.01 -Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |    | 30.000.000    |  |
| Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                               | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya                                                                                                     | 1  | 1  | 30.000.000    | 1  | 30.000.000    | 1  | 30.000.000    | 1  | 30.000.000    | 1  | 30.000.000    |  |
| 2.14.03.02.03.03 -Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |    | 1.943.050.000 |    | 1.943.050.000 |    | 1.943.050.000 |    | 1.943.050.000 |    | 1.943.050.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                    |                                                                                                                  |      |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|
| Terwujudnya PeningkatanKesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                               | Jumlah Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                 | 5432 | 5432 | 1.943.050.000 | 5432 | 1.943.050.000 | 5432 | 1.943.050.000 | 5432 | 1.943.050.000 | 5432 | 1.943.050.000 |  |
| 2.14.03.02.03.04 -Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                        |                                                                                                                  |      |      | -             |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |  |
| Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                         | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                    | 0    | 0    | -             | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     |  |
| 2.14.03.02.03.05 -Penyusunan Rencana KebutuhanAlat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB |                                                                                                                  |      |      | -             |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |  |
| Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB    | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB | 0    | 0    | -             | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     |  |
| 2.14.03.02.03.06 -Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                         |                                                                                                                  |      |      | -             |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |  |
| Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                          | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                        | 0    | 0    | -             | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     | 1    | 5.000.000     |  |
| 2.14.03.02.03.07 -Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                        |                                                                                                                  |      |      | -             |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |      | 5.000.000     |  |
| Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                            | 0    | 0    | -             | 50   | 5.000.000     | 50   | 5.000.000     | 50   | 5.000.000     | 50   | 5.000.000     |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                            |                                                                                                                                               |   |   |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| 2.14.03.02.03.08 -Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                                                                                                                                               |   |   | 51.000.000 |    | 51.000.000 |    | 51.000.000 |    | 51.000.000 |    | 51.000.000 |  |
| Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya     | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya | 2 | 2 | 51.000.000 | 2  | 51.000.000 | 2  | 51.000.000 | 2  | 51.000.000 | 2  | 51.000.000 |  |
| 2.14.03.02.03.10 -Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      |                                                                                                                                               |   |   | -          |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |
| Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                          | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                    | 0 | 0 | -          | 40 | 5.000.000  | 40 | 5.000.000  | 40 | 5.000.000  | 40 | 5.000.000  |  |
| 2.14.03.02.03.11 -Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                               |                                                                                                                                               |   |   | -          |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |
| Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                   | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                     | 0 | 0 | -          | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  |  |
| 2.14.03.02.03.13 -Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                            |                                                                                                                                               |   |   | -          |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |
| Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                                  | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria                                                                                  | 0 | 0 | -          | 5  | 5.000.000  | 5  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  | 1  | 5.000.000  |  |
| 2.14.03.02.03.14 -Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Fasilitasi dan Pembinaan PendampinganIbuHamil dan Ibu Pasca Persalinan                |                                                                                                                                               |   |   | -          |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |    | 5.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                  |    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| Terfasilitasinya Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                                                | Jumlah Pemerintah Daerah yang Melakukan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                                                | 0  | 0  | -           | 2  | 5.000.000   | 2  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   |  |
| 2.14.03.02.03.15 -Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                      |                                                                                                                                                                  |    |    | -           |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |  |
| Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB                                          | Jumlah Pengeloladan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB   | 0  | 0  | -           | 10 | 5.000.000   | 10 | 5.000.000   | 10 | 5.000.000   | 1  | 5.000.000   |  |
| 2.14.03.02.03.16 -Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                |                                                                                                                                                                  |    |    | -           |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |    | 5.000.000   |  |
| Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                                                    | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                            | 0  | 0  | -           | 10 | 5.000.000   | 10 | 5.000.000   | 10 | 5.000.000   | 10 | 5.000.000   |  |
| 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                                                                                                                                  |    |    | 537.600.000 |    | 557.600.000 |    | 557.600.000 |    | 557.600.000 |    | 557.600.000 |  |
| Tersedianya stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi memasyarakatkan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana      | Jumlah stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi memasyarakatkan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana | 55 | 55 |             | 55 |             | 55 |             | 55 |             | 55 |             |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |   |   |             |   |             |   |             |   |             |   |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|---|-------------|--|
| 2.14..3.02.04.01 -Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                                                                                                                                       |   |   | -           |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |  |
| Terlaksananya Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB     | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB | 0 | 0 | -           | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   |  |
| 2.14.3.02.04.02 -Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                   |                                                                                                                                                                       |   |   | -           |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |  |
| Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                | 0 | 0 | -           | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   |  |
| 2.14.3.02.04.04 -Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                        |                                                                                                                                                                       |   |   | -           |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |  |
| Terlaksananya Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                           | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB                                                                                                                     | 0 | 0 | -           | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   |  |
| 2.14.3.02.04.05 -Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT)diKampung Keluarga Berkualitas                                            |                                                                                                                                                                       |   |   | -           |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |   | 5.000.000   |  |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                             | Jumlah DASHAT di Kampung KB                                                                                                                                           | 0 | 0 | -           | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   | 1 | 5.000.000   |  |
| 2.14.3.02.04.06 -Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                  |                                                                                                                                                                       |   |   | 537.600.000 |   | 537.600.000 |   | 537.600.000 |   | 537.600.000 |   | 537.600.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |       |       |               |       |               |       |               |       |               |       |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--|
| Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas                                 | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                 | 96    | 96    | 537.600.000   | 96    | 537.600.000   | 96    | 537.600.000   | 96    | 537.600.000   | 96    | 537.600.000   |  |
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |       |       | 6.163.716.100 |       | 7.165.521.100 |       | 7.175.521.100 |       | 7.185.521.100 |       | 7.195.521.100 |  |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)                                                                                               | Prosentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga                                                                                                                            | 97,91 | 97,93 | 6.163.716.100 | 97,94 | 7.165.521.100 | 97,95 | 7.175.521.100 | 97,96 | 7.185.521.100 | 97,97 | 7.195.521.100 |  |
| 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |       |       | 474.516.100   |       | 1.126.321.100 |       | 1.136.321.100 |       | 1.146.321.100 |       | 1.156.321.100 |  |
| Terbentuknya Kelompok Bangga Kencana yang Efektif                                                                                                                                           | Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif                                                                                                                                                        | 4357  | 4357  |               | 4357  |               | 4357  |               | 4357  |               | 4357  |               |  |
| 2.14.04.2.01.08 -Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |       | -             |       | 50.000.000    |       | 50.000.000    |       | 50.000.000    |       | 50.000.000    |  |
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrangTuaHebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (MenjadiOrangTuaHebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) | 0     | 0     | -             | 1     | 50.000.000    | 1     | 50.000.000    | 1     | 50.000.000    | 1     | 50.000.000    |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                   |   |   |             |    |             |    |             |    |             |    |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| 2.14.04.2.01.14 -Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                     |                                                                                                                                                   |   |   | -           |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas                                                        | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas | 0 | 0 | -           | 10 | 50.000.000  | 10 | 50.000.000  | 10 | 50.000.000  | 10 | 50.000.000  |  |
| 2.14.04.2.01.15 -Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                                                                             |                                                                                                                                                   |   |   | -           |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |  |
| Terlaksananya aktifitas lansiasesuai tujuh dimensi lansia tangguhdalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif                                                       | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia                                                                      | 0 | 0 | -           | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  |  |
| 2.14.04.2.01.16 -Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                       |                                                                                                                                                   |   |   | 308.195.000 |    | 310.000.000 |    | 320.000.000 |    | 330.000.000 |    | 340.000.000 |  |
| Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                          | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                             | 1 | 1 | 308.195.000 | 1  | 310.000.000 | 1  | 320.000.000 | 1  | 330.000.000 | 1  | 340.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.17 -Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |                                                                                                                                                   |   |   | -           |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |    | 50.000.000  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                |    |    |             |    |             |    |             |    |             |    |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|----|-------------|--|
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                       | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)      | 0  | 0  | -           | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  | 1  | 50.000.000  |  |
| 2.14.04.2.01.18 -Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)          |                                                                                                                                                                                |    |    | 130.000.000 |    | 130.000.000 |    | 130.000.000 |    | 130.000.000 |    | 130.000.000 |  |
| Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)             | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia | 10 | 10 | 130.000.000 | 10 | 130.000.000 | 10 | 130.000.000 | 10 | 130.000.000 | 10 | 130.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.19 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                                                                                                                                                                                |    |    | 36.321.100  |    | 36.321.100  |    | 36.321.100  |    | 36.321.100  |    | 36.321.100  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                              |    |    |            |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,PPKS,PIK-RdanPemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) | 25 | 25 | 36.321.100 | 25 | 36.321.100 | 25 | 36.321.100 | 25 | 36.321.100 | 25 | 36.321.100 |  |
| 2.14.04.2.01.20 -Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                              |    |    | -          |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |  |
| TerlaksananyaAdvokasi danPromosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                     | 0  | 0  | -          | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.21 -Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                              |                                                                                                                                                                                                                              |    |    | -          |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA                                                    | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS ,PIK - R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)                                                    | 1  | 1  | -          | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.22 -Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                              |    |    | -          |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |    |            |    |            |    |            |    |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|----|------------|----|------------|----|------------|----|------------|--|
| Terlaksananya Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                  | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                     | 0 | 0 | - | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 | 50 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.23 -Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                   |   |   | - |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                             | 0 | 0 | - | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 | 1  | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.24 -Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS ,PIK - R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                                                                                                                                                                                                                   |   |   | - |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |  |
| Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)             | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 0 | 0 | - | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 | 10 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.25 -Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                   |   |   | - |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |    | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                               |   |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                               | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                     | 0 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.26 -Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                                                                                                                                                                                               |   |   | - |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |
| Tersedianya biaya operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                 | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan | 0 | 0 | - | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.01.27 -Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                        |                                                                                                                                                                                               |   |   | - |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                           | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                 | 0 | 0 | - | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 | 5 | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |               |      |               |      |               |      |               |      |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|--|
| 2.14.04.2.01.28 -Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB),Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | -             |      | 50.000.000    |      | 50.000.000    |      | 50.000.000    |      | 50.000.000    |  |
| Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina KeluargaBalita (BKB),BinaKeluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) danPemberdayaan Ekonomi Keluarga)                     | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk | 0    | 0    | -             | 10   | 50.000.000    | 10   | 50.000.000    | 10   | 50.000.000    | 10   | 50.000.000    |  |
| 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      | 5.689.200.000 |      | 5.889.200.000 |      | 5.889.200.000 |      | 5.889.200.000 |      | 5.889.200.000 |  |
| Terbentuknya Kelompok Bangga Kencana yang Efektif                                                                                                                                                                                                                                                     | Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif                                                                                                                                                                                                                                                   | 4357 | 4357 |               | 4357 |               | 4357 |               | 4357 |               | 4357 |               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| 2.14.04.2.02.01 -Penguatan KebijakanDaerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | - |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Penguatan Kebijakan Daerah dalamrangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)    | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Penguatan Kebijakan Daerah dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Memasyarakatkan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.02.02 -Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam PenggerakanOperasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |   | - |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |            |   |            |   |            |   |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|------------|---|------------|---|------------|---|------------|--|
| Terlaksananya Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) | 0 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.02.03 -Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)      |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | - |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                     | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)   | 0 | 0 | - | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 | 1 | 50.000.000 |  |
| 2.14.04.2.02.04 -Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                   |   |   | - |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |   | 50.000.000 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                               |     |     |               |     |               |     |               |     |               |     |               |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                                    | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja                                                    | 0   | 0   | -             | 1   | 50.000.000    | 1   | 50.000.000    | 1   | 50.000.000    | 1   | 50.000.000    |  |
| 2.14.04.2.02.05 -Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) |                                                                                                                                                               |     |     | 2.586.000.000 |     | 2.586.000.000 |     | 2.586.000.000 |     | 2.586.000.000 |     | 2.586.000.000 |  |
| Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)    | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | 862 | 862 | 2.586.000.000 | 862 | 2.586.000.000 | 862 | 2.586.000.000 | 862 | 2.586.000.000 | 862 | 2.586.000.000 |  |
| 2.14.04.2.02.06 -Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                  |                                                                                                                                                               |     |     | 3.103.200.000 |     | 3.103.200.000 |     | 3.103.200.000 |     | 3.103.200.000 |     | 3.103.200.000 |  |
| Terlaksananya Tendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/CalonPUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                      | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan     | 1   | 1   | 3.103.200.000 | 1   | 3.103.200.000 | 1   | 3.103.200.000 | 1   | 3.103.200.000 | 1   | 3.103.200.000 |  |
| 2.14.04.2.03 - Pembinaan dan Sosialisasi Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR)                                                                            |                                                                                                                                                               |     |     | -             |     | 150.000.000   |     | 150.000.000   |     | 150.000.000   |     | 150.000.000   |  |
| Terbentuknya Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif                                                                                                                       | Jumlah Kelompok BKR dan PIK - R yang Aktif                                                                                                                    | 417 | 417 |               | 417 |               | 417 |               | 417 |               | 417 |               |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                        |   |   |                |    |                |    |                |    |                |    |                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|
| 2.14.04.2.03.01 -Pembinaan<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja                                                                  |                                                                                                                                                                                        |   |   | -              |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |  |
| Terlaksananya Pembinaan<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja                                                                     | Jumlah Kelompok Kegiatan<br>Remaja yang Mendapatkan<br>Pembinaan Perencanaan<br>menikah (Penyiapan<br>Kehidupan Berkeluarga) Bagi<br>Remaja                                            | 0 | 0 | -              | 50 | 50.000.000     | 50 | 50.000.000     | 50 | 50.000.000     | 50 | 50.000.000     |  |
| 2.14.04.2.03.02 -Penyediaan<br>Saranaedukasi PKBR di<br>kelompok kegiatan                                                                                              |                                                                                                                                                                                        |   |   | -              |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |  |
| Tersedianya sarana edukasi PKBR<br>dikelompok kegiatan                                                                                                                 | Jumlah unit saran aedukasi<br>PKBR di kelompok kegiatan                                                                                                                                | 0 | 0 | -              | 5  | 50.000.000     | 5  | 50.000.000     | 5  | 50.000.000     | 5  | 50.000.000     |  |
| 2.14.04.2.03.03 -Orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja untuk<br>SDMpengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya |                                                                                                                                                                                        |   |   | -              |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |    | 50.000.000     |  |
| Terlaksananyaorientasi<br>Perencanaan menikah (Penyiapan<br>Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja untuk<br>SDM pengelola, pendidik sebaya<br>dan<br>konselor sebaya    | Jumlah Kegiatan Orientasi<br>Perencanaan menikah<br>(Penyiapan Kehidupan<br>Berkeluarga) Bagi Remaja<br>untuk SDM pengelola,<br>pendidik sebaya dan konselor<br>sebaya yang terlaksana | 0 | 0 | -              | 1  | 50.000.000     | 1  | 50.000.000     | 1  | 50.000.000     | 1  | 50.000.000     |  |
| JUMLAH TOTAL                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |   |   | 20.894.860.195 |    | 23.439.121.100 |    | 23.591.121.100 |    | 23.764.121.100 |    | 23.923.121.100 |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/sub Kegiatan dan Pendanaan sesuai SIPD RI

| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT               | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                      | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT<br>DAERAH                                                                                                      | KETERANGAN |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                          |            |
|                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                          |            |
| (01)                                                                                     | (02)                                                                                                                                                                                               | (03)                      | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                                                                                     | (15)       |
| 2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN DAN<br>PERLINDUNGAN ANAK  |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 7.232.535.240,00 |        | 9.114.912.390,00 |        | 9.114.912.390,00 |        | 9.189.912.390,00 |        | 9.134.912.390,00 |                                                                                                                          |            |
| 2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH KABUPATEN/KOTA              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 6.279.423.390,00 |        | 6.279.423.390,00 |        | 6.279.423.390,00 |        | 6.354.423.390,00 |        | 6.299.423.390,00 |                                                                                                                          |            |
| Meningkatnya Tatakelola Birokrasi<br>Pemerintahan yang Efektif, Efisien<br>dan Akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah<br>(Nilai)                                                                                                                                                            | 84,50                     | 84,60                           | 6.279.423.390,00 | 84,65  | 6.279.423.390,00 | 84,70  | 6.279.423.390,00 | 84,75  | 6.354.423.390,00 | 84,80  | 6.299.423.390,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000<br>- DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN |            |
|                                                                                          | Persentase Realisasi Anggaran<br>Perangkat Daerah (%)                                                                                                                                              | 96,50                     | 96,60                           |                  | 96,65  |                  | 96,70  |                  | 96,75  |                  | 96,75  |                  |                                                                                                                          |            |
|                                                                                          | Indeks Profesionalitas ASN<br>Perangkat Daerah (Nilai)                                                                                                                                             | 86,20                     | 86,30                           |                  | 86,35  |                  | 86,40  |                  | 86,45  |                  | 86,50  |                  |                                                                                                                          |            |
|                                                                                          | Jumlah Inovasi yang<br>terinternalisasi dan tersosialisasi<br>serta berkelanjutan (Nilai)                                                                                                          | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                                                                          |            |
| 2.08.01.2.01 - Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                 | 40.000.000,00    |        | 40.000.000,00    |        | 40.000.000,00    |        | 40.000.000,00    |        | 40.000.000,00    |                                                                                                                          |            |
| Persentase dokumen perencanaan,<br>penganggaran dan evaluasi kinerja<br>yang tersusun    | Jumlah Dokumen Perubahan<br>DPA-SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan<br>Dokumen Perubahan DPA-<br>SKPD (Dokumen)                                                                        | 1                         | 1                               | 40.000.000,00    | 1      | 40.000.000,00    | 1      | 40.000.000,00    | 1      | 40.000.000,00    | 1      | 40.000.000,00    |                                                                                                                          |            |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen RKA-SKPD<br>dan Laporan Hasil Koordinasi<br>Penyusunan Dokumen RKA-<br>SKPD (Dokumen)                                                                                               | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                                                                          |            |
|                                                                                          | Jumlah Laporan Capaian Kinerja<br>dan Ikhtisar Realisasi Kinerja<br>SKPD dan Laporan Hasil<br>Koordinasi Penyusunan Laporan<br>Capaian Kinerja dan Ikhtisar<br>Realisasi Kinerja SKPD<br>(Laporan) | 1                         | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                                                                          |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                           |                                                                                                                |                           |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|------------|
|                                                                                                           | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                     | 4                         | 5                               |               | 5      |               | 5      |               | 5      |               | 5      |               |                     |            |
|                                                                                                           | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                     | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                     |            |
|                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                          | 3                         | 2                               |               | 2      |               | 2      |               | 2      |               | 2      |               |                     |            |
|                                                                                                           | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1                         | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                     |            |
| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                  | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                           |                                                                                                                |                           | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                |                           | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |            |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                           | (03)                      | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                | (15)       |
| 2.08.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                       |                                                                                                                |                           |                                 | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |        | 10.000.000,00 |                     |            |
| Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                          | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)                                                          | 3                         | 2                               | 10.000.000,00 | 2      | 10.000.000,00 | 2      | 10.000.000,00 | 2      | 10.000.000,00 | 2      | 10.000.000,00 |                     |            |
| 2.08.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                                            |                                                                                                                |                           |                                 | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)                     | 1                         | 1                               | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                     |            |
| 2.08.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                  |                                                                                                                |                           |                                 | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen) | 1                         | 1                               | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                     |            |
| 2.08.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                                                    |                                                                                                                |                           |                                 | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD                     | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)                     | 1                         | 1                               | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                     |            |
| 2.08.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                                          |                                                                                                                |                           |                                 | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                     |            |
| Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen) | 1                         | 1                               | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |                     |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 2.08.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD                                                                   |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |                  |            |
| Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan) | 1                   | 1                               | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     |                  |            |
| 2.08.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |                  |            |
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                             | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)                                                                                                                       | 4                   | 5                               | 5.000.000,00     | 5      | 5.000.000,00     | 5      | 5.000.000,00     | 5      | 5.000.000,00     | 5      | 5.000.000,00     |                  |            |
| 2.08.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 5.602.494.000,00 |        | 5.505.000.000,00 |        | 5.485.000.000,00 |        | 5.505.000.000,00 |        | 5.505.000.000,00 |                  |            |
| Persentase penyediaan gaji dan tunjangan ASN                                                                                                                                | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1                   | 0                               | 5.602.494.000,00 | 1      | 5.505.000.000,00 | 1      | 5.485.000.000,00 | 1      | 5.505.000.000,00 | 1      | 5.505.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 30                  | 33                              |                  |        |                  | 36     |                  | 39     |                  | 42     |                  |                  | 42         |
| 2.08.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 5.597.494.000,00 |        | 5.500.000.000,00 |        | 5.480.000.000,00 |        | 5.500.000.000,00 |        | 5.500.000.000,00 |                  |            |
| Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                                          | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)                                                                                                                  | 30                  | 33                              | 5.597.494.000,00 | 36     | 5.500.000.000,00 | 39     | 5.480.000.000,00 | 42     | 5.500.000.000,00 | 42     | 5.500.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |        | 5.000.000,00     |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
| Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                                                                                                                              | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)                                                                                                     | 1                   | 0                               | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     | 1      | 5.000.000,00     |                  |            |
| 2.08.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 420.317.320,00   |        | 454.423.390,00   |        | 474.423.390,00   |        | 514.000.000,00   |        | 504.000.000,00   |                  |            |
| Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran                                                                                                                     | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                                                                                                                       | 240                 | 2                               | 420.317.320,00   | 2      | 454.423.390,00   | 2      | 474.423.390,00   | 2      | 514.000.000,00   | 2      | 504.000.000,00   |                  |            |
|                                                                                                                                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                                                                                                                              | 4                   | 5                               |                  |        |                  | 5      |                  | 5      |                  | 5      |                  |                  | 5          |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                              |                                                                                        |     |     |                                        |     |                |     |                |     |                |     |                |                         |                   |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-----|----------------|-------------------------|-------------------|
|                                                                              | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                    | 4   | 2   |                                        | 2   |                | 2   |                | 2   |                | 2   |                |                         |                   |
|                                                                              | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                 | 1   | 2   |                                        | 2   |                | 1   |                | 2   |                | 2   |                |                         |                   |
|                                                                              | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                      | 12  | 5   |                                        | 5   |                | 5   |                | 5   |                | 5   |                |                         |                   |
|                                                                              | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)          | 140 | 100 |                                        | 100 |                | 100 |                | 100 |                | 100 |                |                         |                   |
|                                                                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 6   | 5   |                                        | 5   |                | 5   |                | 5   |                | 5   |                |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor             |                                                                                        |     |     | 130.000.000,00                         |     | 130.000.000,00 |     | 140.423.390,00 |     | 150.000.000,00 |     | 160.000.000,00 |                         |                   |
| Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)                 | 1   | 2   | 130.000.000,00                         | 2   | 130.000.000,00 | 1   | 140.423.390,00 | 2   | 150.000.000,00 | 2   | 160.000.000,00 |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor                         |                                                                                        |     |     | 130.000.000,00                         |     | 130.423.390,00 |     | 140.000.000,00 |     | 150.000.000,00 |     | 160.000.000,00 |                         |                   |
| Tersedianya Bahan Logistik Kantor                                            | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)                             | 240 | 2   | 130.000.000,00                         | 2   | 130.423.390,00 | 2   | 140.000.000,00 | 2   | 150.000.000,00 | 2   | 160.000.000,00 |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                |                                                                                        |     |     | 24.761.100,00                          |     | 30.000.000,00  |     | 30.000.000,00  |     | 30.000.000,00  |     | 30.000.000,00  |                         |                   |
| Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan                                   | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)                    | 4   | 2   | 24.761.100,00                          | 2   | 30.000.000,00  | 2   | 30.000.000,00  | 2   | 30.000.000,00  | 2   | 30.000.000,00  |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan |                                                                                        |     |     | 10.000.000,00                          |     | 10.000.000,00  |     | 10.000.000,00  |     | 10.000.000,00  |     | 10.000.000,00  |                         |                   |
| Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | 6   | 5   | 10.000.000,00                          | 5   | 10.000.000,00  | 5   | 10.000.000,00  | 5   | 10.000.000,00  | 5   | 10.000.000,00  |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material                                |                                                                                        |     |     | 67.708.725,00                          |     | 70.000.000,00  |     | 70.000.000,00  |     | 80.000.000,00  |     | 70.000.000,00  |                         |                   |
| Tersedianya Bahan/Material                                                   | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)                                    | 4   | 5   | 67.708.725,00                          | 5   | 70.000.000,00  | 5   | 70.000.000,00  | 5   | 80.000.000,00  | 5   | 70.000.000,00  |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu                                 |                                                                                        |     |     | 4.000.000,00                           |     | 4.000.000,00   |     | 4.000.000,00   |     | 4.000.000,00   |     | 4.000.000,00   |                         |                   |
| Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu                                       | Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)                                      | 12  | 5   | 4.000.000,00                           | 5   | 4.000.000,00   | 5   | 4.000.000,00   | 5   | 4.000.000,00   | 5   | 4.000.000,00   |                         |                   |
| 2.08.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     |                                                                                        |     |     | 53.847.495,00                          |     | 80.000.000,00  |     | 80.000.000,00  |     | 90.000.000,00  |     | 70.000.000,00  |                         |                   |
| Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)          | 140 | 100 | 53.847.495,00                          | 100 | 80.000.000,00  | 100 | 80.000.000,00  | 100 | 90.000.000,00  | 100 | 70.000.000,00  |                         |                   |
| <b>BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME /</b>                                   | <b>INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT</b>                                                      |     |     | <b>TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN</b> |     |                |     |                |     |                |     |                | <b>PERANGKAT DAERAH</b> | <b>KETERANGAN</b> |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                    |                                                                                                               | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | 2026   |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                     |                                                                                                               |                           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |      |      |
| (01)                                                                                                                                | (02)                                                                                                          | (03)                      | (04)   | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14) | (15) |
| 2.08.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                                 |                                                                                                               |                           |        | 150.697.920,00 |        | 195.000.000,00 |        | 195.000.000,00 |        | 210.423.390,00 |        | 195.000.000,00 |      |      |
| Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Dilakukan Selama 1 Tahun                                       | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                        | 12     | 150.697.920,00 | 12     | 195.000.000,00 | 12     | 195.000.000,00 | 12     | 210.423.390,00 | 12     | 195.000.000,00 |      |      |
|                                                                                                                                     | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                        | 12     |                |        |                | 12     |                |        |                | 12     |                |      |      |
| 2.08.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                         |                                                                                                               |                           |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 75.000.000,00  |      |      |
| Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                                                            | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)              | 12                        | 12     | 75.000.000,00  | 12     | 75.000.000,00  | 12     | 75.000.000,00  | 12     | 80.000.000,00  | 12     | 75.000.000,00  |      |      |
| 2.08.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                           |                                                                                                               |                           |        | 75.697.920,00  |        | 120.000.000,00 |        | 120.000.000,00 |        | 130.423.390,00 |        | 120.000.000,00 |      |      |
| Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor                                                                                              | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)                                | 12                        | 12     | 75.697.920,00  | 12     | 120.000.000,00 | 12     | 120.000.000,00 | 12     | 130.423.390,00 | 12     | 120.000.000,00 |      |      |
| 2.08.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |                                                                                                               |                           |        | 65.914.150,00  |        | 85.000.000,00  |        | 85.000.000,00  |        | 85.000.000,00  |        | 55.423.390,00  |      |      |
| Persentase pemeliharaan barang milik daerah yang dilakukan selama 1 tahun                                                           | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                               | 2                         | 2      | 65.914.150,00  | 2      | 85.000.000,00  | 2      | 85.000.000,00  | 2      | 85.000.000,00  | 2      | 55.423.390,00  |      |      |
|                                                                                                                                     | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)         | 2                         | 70     |                |        |                | 70     |                |        |                | 70     |                |      |      |
|                                                                                                                                     | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 183                       | 12     |                |        |                | 12     |                |        |                | 12     |                |      |      |
| 2.08.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |                                                                                                               |                           |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |      |      |
| Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                    | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | 183                       | 12     | 50.000.000,00  | 12     | 50.000.000,00  | 12     | 50.000.000,00  | 12     | 50.000.000,00  | 12     | 50.000.000,00  |      |      |
| 2.08.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                    |                                                                                                               |                           |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |      |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                                       | 2                   | 2                               | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   | 2      | 5.000.000,00   |                                                                                                     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.08.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya    |                                                                                                                                       |                     |                                 | 10.914.150,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 30.000.000,00  |        | 423.390,00     |                                                                                                     |            |
| Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya          | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)                                 | 2                   | 70                              | 10.914.150,00  | 70     | 30.000.000,00  | 70     | 30.000.000,00  | 70     | 30.000.000,00  | 70     | 423.390,00     |                                                                                                     |            |
| 2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN                                       |                                                                                                                                       |                     |                                 | 147.273.550,00 |        | 900.000.000,00 |        | 900.000.000,00 |        | 900.000.000,00 |        | 900.000.000,00 |                                                                                                     |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                            | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH                                                                                    | KETERANGAN |
|                                                                                                           |                                                                                                                                       |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                                       |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                     |            |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                                                  | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                                | (15)       |
| Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan           | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)                                                                               | 1,43                | 1,45                            | 147.273.550,00 | 1,46   | 900.000.000,00 | 1,47   | 900.000.000,00 | 1,48   | 900.000.000,00 | 1,49   | 900.000.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |            |
|                                                                                                           | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)                                                                               | 66,67               | 66,8                            |                | 66,9   |                | 70     |                | 70,1   |                | 70,2   |                |                                                                                                     |            |
| 2.08.02.2.01 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                       |                     |                                 | 47.869.150,00  |        | 350.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |        | 350.000.000,00 |                                                                                                     |            |
| Presentase ARG pada Belanja Langsung APBD                                                                 | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1                   | 1                               | 47.869.150,00  | 1      | 350.000.000,00 | 1      | 350.000.000,00 | 1      | 350.000.000,00 | 1      | 350.000.000,00 |                                                                                                     |            |
|                                                                                                           | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                  | 1                   | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                           | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)                                                                  | 5                   | 0                               |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                | 5      |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                           | Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)                                                                         | 57                  | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                                                     |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                 | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1                   | 1                               |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               |                  |            |
|                                                                                                                                 | Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                                                     | 57                  | 0                               |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               |               |               |                  |            |
|                                                                                                                                 | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)                                                                 | 1                   | 1                               |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               |               |               |                  |            |
| 2.08.02.2.01.0001 - Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG                                             |                                                                                                                                                |                     | 16.575.000,00                   |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               |                  |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pengarustamaan Gender (PUG) Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)           | 1                   | 1                               | 16.575.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.02.2.01.0007 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                       |                                                                                                                                                |                     |                                 | 2.000.000,00  |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota                                              | Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG (Laporan)                                                                 | 1                   | 1                               | 2.000.000,00  | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.02.2.01.0010 - Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                                |                     |                                 | 2.000.000,00  |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |                  |            |
| Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi                                                                   | Jumlah kebijakan penyelenggaraan PUG di tingkat provinsi (Kebijakan)                                                                           | 5                   | 0                               | 2.000.000,00  | 5             | 50.000.000,00 | 5             | 50.000.000,00 | 5             | 50.000.000,00 | 5             | 50.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                     | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |               |               |               |               |               |               |               |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     | 2026                            |               | 2027          |               | 2028          |               | 2029          |               | 2030          |               |                  |            |
|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                            | (02)                                                                                                                                           | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)          | (07)          | (08)          | (09)          | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.02.2.01.0011 - Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                  |                                                                                                                                                |                     |                                 | 2.000.000,00  |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |                  |            |
| terlaksananya pendampingan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah OPDkab/kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                                                     | 57                  | 0                               | 2.000.000,00  | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.02.2.01.0012 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                           |                                                                                                                                                |                     |                                 | 18.294.150,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |               | 50.000.000,00 |                  |            |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |    |    |               |    |                |    |                |    |                |    |                |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|----|----------------|--|--|
| terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                                                             | 1  | 1  | 18.294.150,00 | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  |  |  |
| 2.08.02.2.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |    |    | 5.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |  |  |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)                                                   | 1  | 1  | 5.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  |  |  |
| 2.08.02.2.01.0014 - Bimbingan Teknis Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |    |    | 2.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |    | 50.000.000,00  |  |  |
| Terlaksananya bimtek penyelenggaraan PUG kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           | Jumlah SDM OPD Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)                                                                                                                                    | 57 | 0  | 2.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  | 1  | 50.000.000,00  |  |  |
| 2.08.02.2.02 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                                                                  |    |    | 63.294.150,00 |    | 250.000.000,00 |    | 250.000.000,00 |    | 250.000.000,00 |    | 250.000.000,00 |  |  |
| Jumlah organisasi/lembaga pemerintah atau non pemerintah kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)                                                                                          |    |    | 63.294.150,00 |    | 250.000.000,00 |    | 250.000.000,00 |    | 250.000.000,00 |    | 250.000.000,00 |  |  |
|                                                                                                                                                              | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)                                                                                              | 1  | 1  |               | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              | Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                                                                                                | 1  | 1  |               | 1  |                | 1  |                | 1  |                | 1  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 3  | 0  |               | 3  |                | 3  |                | 3  |                | 3  |                |  |  |
|                                                                                                                                                              | Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)                                           | 40 | 40 |               | 40 |                | 40 |                | 40 |                | 40 |                |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                 | Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)                                         | 1                   | 1                               |              | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |              |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                     | 2026                            |              | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU         | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                            | (02)                                                                                                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)         | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.02.2.02.0003 - Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dalam Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                                                                              |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 0,00         |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya advokasi kebijakan dan pendampingan bagi organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi kewenangan kab/ kota | Jumlah organisasi kemasyarakatan/ profesi/ dunia usaha/ media yg diadvokasi dan didampingi dalam rangka peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi (Lembaga) | 3                   | 0                               | 0,00         | 3      | 50.000.000,00 | 3      | 50.000.000,00 | 3      | 50.000.000,00 | 3      | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.02.2.02.0005 - Advokasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                           |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 2.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi (Lembaga)                                                                                              | 1                   | 1                               | 2.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.02.2.02.0006 - Pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                               |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 1.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya pendampingan lembaga masyarakat pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                     | Jumlah lembaga masyarakat yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                                                                                                | 1                   | 1                               | 1.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.02.2.02.0007 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 0            |        | 0             |        | 0             |        | 0             |        | 0             |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                                          | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)                                                     |                     |                                 | 0             |        | 0              |        | 0              |        | 0              |        | 0              |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 2.08.02.2.02.0008 - Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                    |                                                                                                                                                             |                     |                                 | 58.294.150,00 |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota                     | Jumlah SDM lembaga masyarakat dan perempuan yang mendapatkan sosialisasi tentang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi (orang)      | 40                  | 40                              | 58.294.150,00 | 40     | 50.000.000,00  | 40     | 50.000.000,00  | 40     | 50.000.000,00  | 40     | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.08.02.2.02.0009 - Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                             |                     |                                 | 2.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah SDM lembaga masyarakat, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimtek atau pelatihan (Orang)    | 1                   | 1                               | 2.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.08.02.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                         |                                                                                                                                                             |                     |                                 | 36.110.250,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |        | 300.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                           | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                        | (02)                                                                                                                                                        | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan yang Mendapat pembinaan                                                                                                 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1                   | 1                               | 36.110.250,00 | 1      | 300.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 | 1      | 300.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                             | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)                                                                            | 1                   | 1                               |               |        |                | 1      |                |        |                | 1      |                |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |   |   |               |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
|                                                                                                                                                            | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                              | 1 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                            | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)                                                                           | 1 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                            | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)                                                                  | 1 | 1 |               | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
| 2.08.02.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                                             |   |   | 5.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |  |  |
| Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                            | Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                              | 1 | 1 | 5.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  |  |  |
| 2.08.02.2.03.0008 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                             |   |   | 18.110.250,00 |   | 100.000.000,00 |   | 100.000.000,00 |   | 100.000.000,00 |   | 100.000.000,00 |  |  |
| Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (dokumen)                                                                            | 1 | 1 | 18.110.250,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 100.000.000,00 |  |  |
| 2.08.02.2.03.0009 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                             |   |   | 5.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |  |  |
| terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota     | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1 | 1 | 5.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  | 1 | 50.000.000,00  |  |  |
| 2.08.02.2.03.0010 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Provinsi                                              |                                                                                                                                                             |   |   | 5.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |   | 50.000.000,00  |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan provinsi                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)      | 1                   | 1                               | 5.000.000,00   | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                                                                                                     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH                                                                                    | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (02)                                                                                            | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                                | (15)       |
| 2.08.02.2.03.0011 - mengamati, menilai, dan melaporkan efektivitas program dan kegiatan lembaga penyedia layanan dalam memberdayakan perempuan, dengan fokus pada pengumpulan data, analisis pencapaian, identifikasi tantangan, serta penyusunan laporan yang memberikan gambaran tentang dampak dan kinerja lembaga dalam meningkatkan kualitas layanan di tingkat kabupaten/kota. |                                                                                                 |                     |                                 | 3.000.000,00   |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                                                                                                     |            |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah LPLPP tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (Lembaga)               | 1                   | 1                               | 3.000.000,00   | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                                                                                                     |            |
| 2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                 |                     |                                 | 181.534.300,00 |        | 530.000.000,00 |        | 530.000.000,00 |        | 530.000.000,00 |        | 530.000.000,00 |                                                                                                     |            |
| Meningkatnya perlindungan Perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Persentase Perempuan Korban Kekerasan yang Mendapatkan Layanan Bantuan (%)                      |                     | 100                             | 181.534.300,00 | 100    | 530.000.000,00 | 100    | 530.000.000,00 | 100    | 530.000.000,00 | 100    | 530.000.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |            |
| 2.08.03.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                     |                                 | 37.500.000,00  |        | 142.500.000,00 |        | 142.500.000,00 |        | 142.500.000,00 |        | 142.500.000,00 |                                                                                                     |            |
| Jumlah lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)       | 10                  | 10                              | 37.500.000,00  | 10     | 142.500.000,00 | 10     | 142.500.000,00 | 10     | 142.500.000,00 | 10     | 142.500.000,00 |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan) | 1                   | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                                                                                                     |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     |                     |                                 |              |      |               |      |               |      |               |      |               |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                    | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)                                                                              | 1                   | 1                               |              | 1    |               | 1    |               | 1    |               | 1    |               |                  |            |
|                                                                                                                                                    | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 1                   | 1                               |              | 1    |               | 1    |               | 1    |               |      |               |                  |            |
|                                                                                                                                                    | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 3                   | 3                               |              | 3    |               | 3    |               | 3    |               |      |               |                  |            |
| 2.08.03.2.01.0003 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                               |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                          | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (laporan)                                                                     | 1                   | 1                               | 7.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 |                  |            |
| 2.08.03.2.01.0004 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |              |      |               |      |               |      |               |      |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | 2026                |                                 | 2027         |      | 2028          |      | 2029          |      | 2030          |      |               |                  |            |
|                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                     | TARGET              | PAGU                            | TARGET       | PAGU | TARGET        | PAGU | TARGET        | PAGU | TARGET        | PAGU |               |                  |            |
| (01)                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                | (03)                | (04)                            | (05)         | (06) | (07)          | (08) | (09)          | (10) | (11)          | (12) | (13)          | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtP Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                | 1                   | 1                               | 7.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 | 1    | 28.500.000,00 |                  |            |
| 2.08.03.2.01.0005 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP Kewenangan Provinsi                                      |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtP                                                                | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtP Kewenangan Provinsi (orang)                                                                           | 10                  | 10                              | 7.500.000,00 | 10   | 28.500.000,00 | 10   | 28.500.000,00 | 10   | 28.500.000,00 | 10   | 28.500.000,00 |                  |            |
| 2.08.03.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP dan TPPO kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |      | 28.500.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat masyarakat, serta Kab/Kota | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtP tingkat provinsi, masyarakat, serta Kab/Kota (Lembaga) | 3                   | 3                               | 7.500.000,00   | 3      | 28.500.000,00  | 3      | 28.500.000,00  | 3      | 28.500.000,00  | 3      | 28.500.000,00  |                  |            |
| 2.08.03.2.01.0007 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00   |        | 28.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |                  |            |
| Penyusunan kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah kebijakan pencegahan KtP dan TPPO (Strada, RAD) Kewenangan Provinsi (Kebijakan)                                                                              | 1                   | 1                               | 7.500.000,00   | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  |                  |            |
| 2.08.03.2.02 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 108.000.000,00 |        | 221.000.000,00 |        | 221.000.000,00 |        | 221.000.000,00 |        | 221.000.000,00 |                  |            |
| Jumlah mitra kerja/jejaring yang bermitra dalam melakukan pendampingan pada korban kekerasan perempuan dan anak                                 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                                               | 1                   | 1                               | 108.000.000,00 | 1      | 221.000.000,00 | 1      | 221.000.000,00 | 1      | 221.000.000,00 | 1      | 221.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                        | 1                   | 1                               |                |        |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                  |            |
|                                                                                                                                                 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                               | 1                   | 1                               |                |        |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                  |            |
|                                                                                                                                                 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                        | 3                   | 3                               |                |        |                | 3      |                | 3      |                |        |                |                  |            |
|                                                                                                                                                 | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota (Orang)                                     | 1                   | 1                               |                |        |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                            | (02)                                                                                                                                                                | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |   |   |              |   |               |   |               |   |               |   |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|--|
|                                                                                                                                                                | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                                            | 1 | 1 |              | 1 |               | 1 |               | 1 |               | 1 |               |  |  |
|                                                                                                                                                                | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                       | 1 | 1 |              | 1 |               | 1 |               | 1 |               | 1 |               |  |  |
| 2.08.03.2.02.0003 - &layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota& |                                                                                                                                              |   |   | 7.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |  |  |
| &Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota&         | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                                            | 1 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 |  |  |
| 2.08.03.2.02.0004 - layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                 |                                                                                                                                              |   |   | 7.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |  |  |
| Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                         | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkataten/Kota. (Orang)             | 1 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 |  |  |
| 2.08.03.2.02.0005 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                              |   |   | 7.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |  |  |
| Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                            | Jumlah Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                       | 1 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 |  |  |
| 2.08.03.2.02.0006 - layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                          |                                                                                                                                              |   |   | 7.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |  |  |
| Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | 1 | 7.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 | 1 | 28.500.000,00 |  |  |
| 2.08.03.2.02.0007 - layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingka Kabupaten/Kota                                                                  |                                                                                                                                              |   |   | 7.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |   | 28.500.000,00 |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                               | 1                   | 1                               | 7.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 2.08.03.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 63.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                  | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                        | 3                   | 3                               | 63.000.000,00 | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  | 3      | 50.000.000,00  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                         |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| 2.08.03.2.02.0009 - Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                  |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |        | 28.500.000,00  |                  |            |
| Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                          | Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (orang)                                                               | 1                   | 1                               | 7.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  | 1      | 28.500.000,00  |                  |            |
| 2.08.03.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 36.034.300,00 |        | 166.500.000,00 |        | 166.500.000,00 |        | 166.500.000,00 |        | 166.500.000,00 |                  |            |
| Jumlah lembaga penyedia layanan jejaring UPTD PPA                                                                       | Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)                                                                          | 1                   | 1                               | 36.034.300,00 | 1      | 166.500.000,00 | 1      | 166.500.000,00 | 1      | 166.500.000,00 | 1      | 166.500.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                         | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)                                                                                    | 1                   | 0                               |               | 3      |                | 3      |                | 3      |                | 3      |                |                  |            |
|                                                                                                                         | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1                   | 1                               |               | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                     |                                 |              |        |               |        |               |        |               |        |               |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                            | Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)                                                                        | 1                   | 1                               |              | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|                                                                                                                                                            | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)               | 1                   | 1                               |              | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
| 2.08.03.2.03.0005 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                | Jumlah Lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1                   | 1                               | 7.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 |                  |            |
| 2.08.03.2.03.0006 - Monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi (Laporan)               | 1                   | 1                               | 7.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 | 1      | 28.500.000,00 |                  |            |
| 2.08.03.2.03.0007 - pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 7.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |        | 28.500.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |              |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                     | 2026                            |              | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                          | PAGU         | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                | (03)                | (04)                            | (05)         | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       |              |       |                |       |                |       |                |       |                |                                                                                                     |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|--------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan pendampingan (Orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | 1     | 7.500.000,00 | 1     | 28.500.000,00  | 1     | 28.500.000,00  | 1     | 28.500.000,00  | 1     | 28.500.000,00  |                                                                                                     |  |
| 2.08.03.2.03.0008 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       | 7.500.000,00 |       | 28.500.000,00  |       | 28.500.000,00  |       | 28.500.000,00  |       | 28.500.000,00  |                                                                                                     |  |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota                   | Jumlah SDM lembaga penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimtek (orang)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 | 1     | 7.500.000,00 | 1     | 28.500.000,00  | 1     | 28.500.000,00  | 1     | 28.500.000,00  | 1     | 28.500.000,00  |                                                                                                     |  |
| 2.08.03.2.03.0009 - Penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       | 6.034.300,00 |       | 52.500.000,00  |       | 52.500.000,00  |       | 52.500.000,00  |       | 52.500.000,00  |                                                                                                     |  |
| Terlaksananya penguatan kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan (Dokumen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 | 0     | 6.034.300,00 | 3     | 52.500.000,00  | 3     | 52.500.000,00  | 3     | 52.500.000,00  | 3     | 52.500.000,00  |                                                                                                     |  |
| 2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       | 0,00         |       | 350.000.000,00 |       | 350.000.000,00 |       | 350.000.000,00 |       | 350.000.000,00 |                                                                                                     |  |
| Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak          | Persentase Kepala Desa yang Mendapatkan Pemahaman tentang Kebijakan Pelaksanaan PUG di Desa (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   | 38,89 | 0,00         | 49,34 | 350.000.000,00 | 65,79 | 350.000.000,00 | 82,23 | 350.000.000,00 | 98,68 | 350.000.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |
| 2.08.04.2.01 - Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |       | 0,00         |       | 100.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |       | 100.000.000,00 |                                                                                                     |  |
| Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa                                                         | Proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) |   | 0     | 0,00         | 1     | 100.000.000,00 | 1     | 100.000.000,00 | 1     | 100.000.000,00 | 1     | 100.000.000,00 |                                                                                                     |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                     |                                 |      |        |               |        |               |        |               |        |               |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)                                                   | 1                   | 0                               |      | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)                                   | 1                   | 0                               |      | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                     | 2026                            |      | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                     | (02)                                                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05) | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                          | Jumlah penerima kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang) | 1                   | 0                               |      | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
| 2.08.04.2.01.0004 - Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota                                                                                                                        | Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota (Lembaga)                                   | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.04.2.01.0005 - Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                                                                                                      | Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Kebijakan)                                                   | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.04.2.01.0006 - Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada penerima kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. |                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentinganKewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota               | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                                                                                                                                                                                                   | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 2.08.04.2.01.0007 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                             | Proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. (Dokumen) |                     | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                  |            |
| 2.08.04.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                                 | 0,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | 2026                            |      | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (03)                | (04)                            | (05) | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sisialisasi peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak                                                         | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                                                                                                                                                                                                                        | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                                                     | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1                   | 0                               |      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                   |   |   |      |   |               |   |               |   |               |   |               |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|--|--|
|                                                                                                                                        | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 0 |      | 1 |               | 1 |               | 1 |               | 1 |               |  |  |
|                                                                                                                                        | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)                                    | 1 | 0 |      | 1 |               | 1 |               | 1 |               | 1 |               |  |  |
|                                                                                                                                        | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                             | 1 | 0 |      | 1 |               | 1 |               | 1 |               | 1 |               |  |  |
| 2.08.04.2.02.0004 - monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                   |   |   | 0,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |  |  |
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 |  |  |
| 2.08.04.2.02.0005 - pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                                   |   |   | 0,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |  |  |
| Terlaksananya pendampingan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                            | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                             | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 |  |  |
| 2.08.04.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                   |   |   | 0,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |  |  |
| Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota               | Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                 | 1 | 0 | 0,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 | 1 | 25.000.000,00 |  |  |
| 2.08.04.2.02.0007 - peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota             |                                                                                                                                                   |   |   | 0,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |   | 25.000.000,00 |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi                             | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas (Lembaga)                                           | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 2.08.04.2.02.0008 - Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                          |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |        | 25.000.000,00  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                     | 2026                            |      | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |                     | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                     | (03)                | (04)                            | (05) | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota       | Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  | 1      | 25.000.000,00  |                  |            |
| 2.08.04.2.03 - Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota         |                                                                                                                                                          |                     |                                 | 0,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |        | 125.000.000,00 |                  |            |
| Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya                                             | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                                                                     | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 | 1      | 125.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                            | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                                                                          | 1                   | 0                               |      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                            | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                                                             | 1                   | 0                               |      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                            | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                                                         | 1                   | 0                               |      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                            | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                                                             | 1                   | 0                               |      | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| 2.08.04.2.03.0002 - layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                  |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                            | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)             | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.04.2.03.0003 - layanan rujukan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Kabupaten/Kota |                                                                                                  |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya layanan rujukan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                                 | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan rujukan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)                  | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.04.2.03.0004 - layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota                           |                                                                                                  |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup                                                   | Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota (Orang) | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.04.2.03.0005 - Layanan penerimaan pengaduan bagi keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                         |                                                                                                  |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                    | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan penerimaan pengaduan Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)     | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                          |                                                                                                  |                     | 2026                            |      | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                          |                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                     | (02)                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05) | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.04.2.03.0006 - Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                              |                                                                                                  |                     |                                 | 0,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |        | 25.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Layanan bimbingan masyarakat keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota                                    | Jumlah keluarga yang mendapatkan Layanan bimbingan masyarakat Lingkup Kabupaten/Kota (Orang)     | 1                   | 0                               | 0,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 | 1      | 25.000.000,00 |                  |            |

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                 |       |       |               |       |                |       |                |       |                |       |                |                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK                                                                                            |                                                                                                                                                                 |       |       | 24.040.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |                                                                                                     |  |
| Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak                                                                                                        | Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah Gender dan Anak (%)                                                                                                  | 96,92 | 97,10 | 24.040.000,00 | 97,20 | 150.000.000,00 | 97,30 | 150.000.000,00 | 97,40 | 150.000.000,00 | 97,50 | 150.000.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |
| 2.08.05.2.01 - Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota           |                                                                                                                                                                 |       |       | 24.040.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |       | 150.000.000,00 |                                                                                                     |  |
| Jumlah Data Gender dan Anak yang tersedia                                                                                                            | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen) | 1     | 1     | 24.040.000,00 | 1     | 150.000.000,00 | 1     | 150.000.000,00 | 1     | 150.000.000,00 | 1     | 150.000.000,00 |                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                      | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)                                                                                      | 1     | 1     |               | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |                                                                                                     |  |
|                                                                                                                                                      | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)                                                           | 1     | 1     |               | 1     |                | 1     |                | 1     |                | 1     |                |                                                                                                     |  |
| 2.08.05.2.01.0003 - Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                                                 |       |       | 8.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |                                                                                                     |  |
| Meningkatnya ketersediaan Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota                                                                                        | Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)                                                                                      | 1     | 1     | 8.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  |                                                                                                     |  |
| 2.08.05.2.01.0004 - Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak                                              |                                                                                                                                                                 |       |       | 8.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |                                                                                                     |  |
| Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak                                                    | Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak (Lembaga)                                                           | 1     | 1     | 8.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  | 1     | 50.000.000,00  |                                                                                                     |  |
| 2.08.05.2.01.0005 - Penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA |                                                                                                                                                                 |       |       | 8.040.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |       | 50.000.000,00  |                                                                                                     |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA | Jumlah dokumen hasil penguatan dan peningkatan kualitas data kekerasan terhadap perempuan dan anak hasil pencatatan dan pelaporan melalui Simfoni PPA (Dokumen)                                                                          | 1                   | 1                               | 8.040.000,00 | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                                                                                                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 | 9.775.000,00 |        | 315.000.000,00 |        | 315.000.000,00 |        | 315.000.000,00 |        | 315.000.000,00 |                                                                                                     |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                              | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |              |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH                                                                                    | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2026                            |              | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                          | PAGU         | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                     |            |
| (01)                                                                                                                                           | (02)                                                                                                                                                                                                                                     | (03)                | (04)                            | (05)         | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                                | (15)       |
| Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif                                                                                       | Persentase Kecamatan Layak Anak (%)                                                                                                                                                                                                      |                     | 33,33                           | 9.775.000,00 | 38,89  | 315.000.000,00 | 44,44  | 315.000.000,00 | 50,00  | 315.000.000,00 | 55,56  | 315.000.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |            |
| 2.08.06.2.01 - Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                               |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 | 4.415.000,00 |        | 155.000.000,00 |        | 155.000.000,00 |        | 155.000.000,00 |        | 155.000.000,00 |                                                                                                     |            |
| Jumlah PD yang memahami PHA                                                                                                                    | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1                   | 1                               | 4.415.000,00 | 1      | 155.000.000,00 | 1      | 155.000.000,00 | 1      | 155.000.000,00 | 1      | 155.000.000,00 |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                | Jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                | 1                   | 1                               |              | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                                                 | 1                   | 1                               |              | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                                                                                                     |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                    | Jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga)                                            | 1                         | 1                               |              | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                     |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|--------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|---------------------|------------|
| 2.08.06.2.01.0003 - Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota     |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 | 55.000,00    |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota           | Jumlah pemangku kepentingan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1                         | 1                               | 55.000,00    | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 |                     |            |
| BIDANG URUSAN /<br>PROGRAM / OUTCOME /<br>KEGIATAN / SUBKEGIATAN<br>OUTPUT                                                                                                         | INDIKATOR OUTCOME /<br>OUTPUT                                                                                                                                                                                                            | BASELINE<br>TAHUN<br>2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |              |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT<br>DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | 2026                            |              | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                     |            |
|                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                          |                           | TARGET                          | PAGU         | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                     |            |
| (01)                                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                                                                                     | (03)                      | (04)                            | (05)         | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)                | (15)       |
| 2.08.06.2.01.0004 - Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota             |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 | 55.000,00    |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |                     |            |
| Terlaksananya Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota                   | jumlah SDM OPD kab/kota yang mendapatkan bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)                                                | 1                         | 1                               | 55.000,00    | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 |                     |            |
| 2.08.06.2.01.0005 - Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                          |                           |                                 | 4.250.000,00 |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |                     |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     |                                 |              |      |                |      |                |      |                |      |                |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------|----------------|------------------|------------|
| Terlaksananya Pendampingan Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota              | jumlah OPD kab/kota yang mendapatkan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaga) | 1                   | 1                               | 4.250.000,00 | 1    | 5.000.000,00   | 1    | 5.000.000,00   | 1    | 5.000.000,00   | 1    | 5.000.000,00   |                  |            |
| 2.08.06.2.01.0006 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                               |                     |                                 | 55.000,00    |      | 50.000.000,00  |      | 50.000.000,00  |      | 50.000.000,00  |      | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota       | jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)      | 1                   | 1                               | 55.000,00    | 1    | 50.000.000,00  | 1    | 50.000.000,00  | 1    | 50.000.000,00  | 1    | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.08.06.2.02 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              |                                                                                                                                                                                               |                     |                                 | 5.360.000,00 |      | 160.000.000,00 |      | 160.000.000,00 |      | 160.000.000,00 |      | 160.000.000,00 |                  |            |
| &Jumlah lembaga penyedia layanan yang mendapatkan sosialisasi PHA                                                                                                                         | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga)                  | 1                   | 1                               | 5.360.000,00 | 1    | 160.000.000,00 | 1    | 160.000.000,00 | 1    | 160.000.000,00 | 1    | 160.000.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                                                           | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan)                          | 1                   | 1                               |              | 1    |                | 1    |                | 1    |                |      |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                           | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                           | 1                   | 0                               |              | 1    |                | 1    |                | 1    |                | 1    |                |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |              |      |                |      |                |      |                |      |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                     | 2026                            |              | 2027 |                | 2028 |                | 2029 |                | 2030 |                |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |      | TARGET | PAGU      | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------|------|
| (01)                                                                                                                                                                | (02)                                                                                                                                                                         | (03) | (04)   | (05)      | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14) | (15) |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                            | 1    | 1      |           | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |      |      |
|                                                                                                                                                                     | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)                                                | 50   | 0      |           | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |      |      |
| 2.08.06.2.02.0005 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                        |                                                                                                                                                                              |      |        | 0,00      |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |        | 5.000.000,00  |      |      |
| Terlaksananya Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                              | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)                                                | 50   | 0      | 0,00      | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  | 1      | 5.000.000,00  |      |      |
| 2.08.06.2.02.0006 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                    |                                                                                                                                                                              |      |        | 0,00      |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |      |      |
| Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                                          | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                          | 1    | 0      | 0,00      | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 |      |      |
| 2.08.06.2.02.0007 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                              |      |        | 55.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |      |      |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1    | 1      | 55.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 |      |      |
| 2.08.06.2.02.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                              |      |        | 55.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |      |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                     |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                                                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota (Laporan) | 1                   | 1                               | 55.000,00      | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                                                                                                     |            |
| 2.08.06.2.02.0009 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                |                                                                                                                                                                      |                     |                                 | 5.250.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |        | 5.000.000,00   |                                                                                                     |            |
| Terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota                      | Jumlah lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                    | 1                   | 1                               | 5.250.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   | 1      | 5.000.000,00   |                                                                                                     |            |
| 2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK                                                                                                                    |                                                                                                                                                                      |                     |                                 | 590.489.000,00 |        | 590.489.000,00 |        | 590.489.000,00 |        | 590.489.000,00 |        | 590.489.000,00 |                                                                                                     |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                           | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH                                                                                    | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                      |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                                                                                                     |            |
| (01)                                                                                                                                                          | (02)                                                                                                                                                                 | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)                                                                                                | (15)       |
| Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak                      | Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)                                                                    | 100                 | 100                             | 590.489.000,00 | 100    | 590.489.000,00 | 100    | 590.489.000,00 | 100    | 590.489.000,00 | 100    | 590.489.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |            |
| 2.08.07.2.01 - Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota                                                    |                                                                                                                                                                      |                     |                                 | 140.489.000,00 |        | 175.739.000,00 |        | 173.489.000,00 |        | 173.489.000,00 |        | 173.489.000,00 |                                                                                                     |            |
| Jumlah Lembaga/lintas sektor yang melakukan pencegahan kekerasan terhadap Anak                                                                                | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KtA tingkatKab/Kota (Kegiatan)                              | 8                   | 8                               | 140.489.000,00 | 8      | 175.739.000,00 | 8      | 173.489.000,00 | 8      | 173.489.000,00 | 8      | 173.489.000,00 |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                               | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)                                              | 1                   | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                                                                                                     |            |
|                                                                                                                                                               | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)                                                                            | 1                   | 1                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |        |                |                                                                                                     |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                     |                                 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                           | Jumlah kebijakan pencegahan KIA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)                                                           | 1                   | 1                               |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               |                  |            |
|                                                                                                                                           | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)                                               | 1                   | 1                               |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               |               |               |                  |            |
|                                                                                                                                           | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)                                                          | 1                   | 1                               |               | 1             |               | 1             |               | 1             |               |               |               |                  |            |
| 2.08.07.2.01.0006 - koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                              |                                                                                                                                         |                     | 7.950.000,00                    | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 |               |               |               |               |               |                  |            |
| terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota                                    | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota (Dokumen)                 | 1                   | 1                               | 7.950.000,00  | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 | 1             | 50.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.01.0007 - Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kabupaten/Kota |                                                                                                                                         |                     | 12.000.000,00                   | 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |               |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota             | Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi pencegahan KIA tingkatKab/Kota (Kegiatan) | 8                   | 8                               | 12.000.000,00 | 8             | 15.000.000,00 | 8             | 12.000.000,00 | 8             | 12.000.000,00 | 8             | 12.000.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.01.0008 - monitoring evaluasi dan pelaporan dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota                                      |                                                                                                                                         |                     | 30.000.000,00                   | 27.650.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 | 27.800.000,00 |               |                  |            |
| Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                                 | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi pencegahan KIA Kewenangan Kab/Kota (Laporan)                                               | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1             | 27.650.000,00 | 1             | 27.800.000,00 | 1             | 27.800.000,00 | 1             | 27.800.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |               |               |               |               |               |               |               |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                     | 2026                            |               | 2027          |               | 2028          |               | 2029          |               | 2030          |               |                  |            |
|                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          | TARGET        | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                      | (02)                                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)          | (07)          | (08)          | (09)          | (10)          | (11)          | (12)          | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.07.2.01.0009 - Kerjasama para pihak dalam pencegahan KIA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                   |                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |               | 27.650.000,00 |               | 27.800.000,00 |               | 27.800.000,00 |               | 27.800.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                         |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| Terlaksananya Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                                                        | Jumlah Kerjasama para pihak dalam pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Dokumen)                                                          | 1 | 1 | 30.000.000,00  | 1 | 27.650.000,00  | 1 | 27.800.000,00  | 1 | 27.800.000,00  | 1 | 27.800.000,00  |  |  |
| 2.08.07.2.01.0010 - Peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA Kewenangan Kabupaten/Kota                      |                                                                                                                                         |   |   | 30.000.000,00  |   | 27.650.000,00  |   | 27.800.000,00  |   | 27.800.000,00  |   | 27.800.000,00  |  |  |
| Terlaksananya peningkatan kapasitas kepada SDM yang terkait langsung pencegahan KtA                                                      | Jumlah SDM yang mendapat Peningkatan kapasitas pencegahan KtA Kewenangan Kab/Kota (Orang)                                               | 1 | 1 | 30.000.000,00  | 1 | 27.650.000,00  | 1 | 27.800.000,00  | 1 | 27.800.000,00  | 1 | 27.800.000,00  |  |  |
| 2.08.07.2.01.0011 - Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                          |                                                                                                                                         |   |   | 30.539.000,00  |   | 27.789.000,00  |   | 28.089.000,00  |   | 28.089.000,00  |   | 28.089.000,00  |  |  |
| Penyusunan kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kabupaten/Kota                                                              | Jumlah kebijakan pencegahan KtA (Strada, RAD) Kewenangan Kab/kota (Kebijakan)                                                           | 1 | 1 | 30.539.000,00  | 1 | 27.789.000,00  | 1 | 28.089.000,00  | 1 | 28.089.000,00  | 1 | 28.089.000,00  |  |  |
| 2.08.07.2.02 - Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                         |   |   | 240.000.000,00 |   | 221.200.000,00 |   | 222.400.000,00 |   | 222.400.000,00 |   | 222.400.000,00 |  |  |
| Jumlah Lembaga Layanan Anak yang telah memiliki Standard Pelayanan Minimal                                                               | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                             | 1 | 1 | 240.000.000,00 | 1 | 221.200.000,00 | 1 | 222.400.000,00 | 1 | 222.400.000,00 | 1 | 222.400.000,00 |  |  |
|                                                                                                                                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                        | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                 | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                          | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)        | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                           |                                                                                                                         |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                           | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)           | 1                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|                                                                                                           | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)    | 1                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |        |               |                  |            |
|                                                                                                           | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                        | 1                   | 1                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |        |               |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                           |                                                                                                                         |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                           |                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                      | (02)                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.07.2.02.0008 - Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota         | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.02.0009 - layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota    |                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota            | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)             | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.02.0010 - layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                         | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)        | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.02.0011 - layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                 |                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                   | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)        | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| 2.08.07.2.02.0012 - layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                        |                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                                | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota (Orang) | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.02.0013 - Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                       |                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                               | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                                        | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.02.0014 - layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota |                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota         | Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Orang)                           | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.07.2.02.0015 - layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                           |                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Tersedianya layanan spesifik untuk pemulihan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota                                                   | Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan spesifik untuk pemulihan korban Tingkat Kabupaten/Kota (Orang)                    | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |   |   |                |   |                |   |                |   |                |   |                |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|--|--|
| 2.08.07.2.03 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 210.000.000,00 |   | 193.550.000,00 |   | 194.600.000,00 |   | 194.600.000,00 |   | 194.600.000,00 |  |  |
| Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Bagi Anak yang mendapatkan pelatihan pemenuhan Hak Anak                                                        | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)                                            | 1 | 1 | 210.000.000,00 | 1 | 193.550.000,00 | 1 | 194.600.000,00 | 1 | 194.600.000,00 | 1 | 194.600.000,00 |  |  |
|                                                                                                                                                | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)                                                                                | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga)                                                                            | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)                                                                                                                                                                                  | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                          | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
|                                                                                                                                                | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)                                                 | 1 | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                | 1 |                |  |  |
| 2.08.07.2.03.0007 - Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota               |                                                                                                                                                                                                                                |   |   | 30.000.000,00  |   | 27.650.000,00  |   | 27.800.000,00  |   | 27.800.000,00  |   | 27.800.000,00  |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terselenggaranya KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah kabupaten/kota                                                                      | Jumlah KIE Perlindungan khusus anak (Dokumen)                                                                                                                                                           | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.08.07.2.03.0009 - koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota              |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota                    | Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kabupaten/kota (Dokumen)                     | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.03.0010 - monitoring evaluasi dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)                          | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |
| 2.08.07.2.03.0011 - Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota          |                                                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 30.000.000,00 |        | 27.650.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |        | 27.800.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | Jumlah Lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) (Lembaga) | 1                   | 1                               | 30.000.000,00 | 1      | 27.650.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 | 1      | 27.800.000,00 |                  |            |

| 2.08.07.2.03.0012 - penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota               |                                                                                                                                                     |                     |                                 | 30.000.000,00     |        | 27.650.000,00     |        | 27.800.000,00     |        | 27.800.000,00     |        | 27.800.000,00     |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|------------------|------------|
| terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                     | Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)               | 1                   | 1                               | 30.000.000,00     | 1      | 27.650.000,00     | 1      | 27.800.000,00     | 1      | 27.800.000,00     | 1      | 27.800.000,00     |                  |            |
| 2.08.07.2.03.0013 - Peningkatan Kapasitas lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kotai                  |                                                                                                                                                     |                     |                                 | 30.000.000,00     |        | 27.650.000,00     |        | 27.800.000,00     |        | 27.800.000,00     |        | 27.800.000,00     |                  |            |
| terlaksananya bimtek penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota             | Jumlah SDM lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan bimtek (Orang)     | 1                   | 1                               | 30.000.000,00     | 1      | 27.650.000,00     | 1      | 27.800.000,00     | 1      | 27.800.000,00     | 1      | 27.800.000,00     |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                   |        |                   |        |                   |        |                   |        |                   | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                     | 2026                            |                   | 2027   |                   | 2028   |                   | 2029   |                   | 2030   |                   |                  |            |
|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                     |                     | TARGET                          | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              | TARGET | PAGU              |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                             | (02)                                                                                                                                                | (03)                | (04)                            | (05)              | (06)   | (07)              | (08)   | (09)              | (10)   | (11)              | (12)   | (13)              | (14)             | (15)       |
| 2.08.07.2.03.0014 - pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |                                                                                                                                                     |                     |                                 | 30.000.000,00     |        | 27.650.000,00     |        | 27.800.000,00     |        | 27.800.000,00     |        | 27.800.000,00     |                  |            |
| terlaksananya pendampingan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pendampingan (Lembaga) | 1                   | 1                               | 30.000.000,00     | 1      | 27.650.000,00     | 1      | 27.800.000,00     | 1      | 27.800.000,00     | 1      | 27.800.000,00     |                  |            |
| 2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA                                                                                   |                                                                                                                                                     |                     |                                 | 13.119.878.800,00 |        | 14.432.910.000,00 |        | 14.442.910.000,00 |        | 14.727.310.000,00 |        | 14.837.310.000,00 |                  |            |
| 2.14.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                                                                                            |                                                                                                                                                     |                     |                                 | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |        | 0                 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                                                                                                                          |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel                                                                                 |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                | 2.14.2.08.0.00.05.0000<br>- DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN |            |
| Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah                                                                            |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |                                                                                                                          |            |
| 2.14.02 - PROGRAM<br>PENGENDALIAN PENDUDUK                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 1.567.368.800,00 |        | 2.880.400.000,00 |        | 2.890.400.000,00 |        | 2.930.400.000,00 |        | 2.940.400.000,00 |                                                                                                                          |            |
| Meningkatnya Kepesertaan Keluarga Berencana                                                                                                                        | Angka Kelahiran Remaja Umur 15 - 19 / ASFR (15-19) (%)                                                                                                                                                       | 14,8                | 14,78                           | 1.567.368.800,00 | 14,77  | 2.880.400.000,00 | 14,76  | 2.890.400.000,00 | 14,75  | 2.930.400.000,00 | 14,74  | 2.940.400.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000<br>- DINAS<br>PENGENDALIAN<br>PENDUDUK,<br>KELUARGA<br>BERENCANA DAN<br>PEMBERDAYAAN<br>PEREMPUAN |            |
|                                                                                                                                                                    | TFR (Angka Kelahiran Total) (Jiwa)                                                                                                                                                                           | 1,95                | 1,95                            |                  | 1,95   |                  | 1,95   |                  | 1,95   |                  | 1,95   |                  |                                                                                                                          |            |
| 2.14.02.2.01 - Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 121.768.800,00   |        | 769.400.000,00   |        | 779.400.000,00   |        | 819.400.000,00   |        | 829.400.000,00   |                                                                                                                          |            |
| Jumlah Petugas Bangsa kencana dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangsa Kencana                                                                | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)                                                                                                                         | 1                   | 0                               | 121.768.800,00   | 1      | 769.400.000,00   | 1      | 779.400.000,00   | 1      | 819.400.000,00   | 1      | 829.400.000,00   |                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                              | 1                   | 1                               |                  |        |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                    | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) | 18                  | 18                              |                  |        |                  | 18     |                  | 18     |                  | 18     |                  |                                                                                                                          | 18         |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                  | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH                                                                                                         | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                                                                                                                          |            |
|                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                                                                                                                          |            |
| (01)                                                                                                                                                               | (02)                                                                                                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)                                                                                                                     | (15)       |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |  |   |  |   |  |   |  |   |  |  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
|  | Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)                                                                                                                                                            | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                         | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)                                                                                                                                       | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)                                                              | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)                                                           | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)                                                                                                                                                            | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)                                                                                                                                                                                               | 1 | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  | Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                               | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen) | 1                   | 1                               |               | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 2.14.02.2.01.0016 - Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                                |                                                                                                                                             |                     |                                 | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan                                                                                                   | Jumlah pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan (Kegiatan)                                 | 1                   | 1                               | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0017 - Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                     |                                 | 0,00          |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                             | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                  | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                     | 2026                            |               | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                          | (02)                                                                                                                                        | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                                                                                                                                      | Jumlah pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga (Kegiatan)                                                                    | 1                   | 0                               | 0,00          | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0023 - Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                     |                                 | 0,00          |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                          | Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)            | 1                   | 0                               | 0,00          | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0025 - Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                            |                                                                                                                                             |                     |                                 | 0,00          |        | 70.000.000,00  |        | 70.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |        | 100.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota                                                                                                  | Jumlah Dokumen GDPK 5 Pilar yang telah disusun Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                             | 1                   | 1                               | 0,00          |        | 70.000.000,00  | 1      | 70.000.000,00  | 1      | 100.000.000,00 | 1      | 100.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0027 - Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal |                                                                                                                                             |                     |                                 | 50.000.000,00 |        | 70.000.000,00  |        | 80.000.000,00  |        | 90.000.000,00  |        | 100.000.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |                |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|------------------|------------|
| Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal | Jumlah dokumen advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, serta Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan) | 18                  | 18                              | 50.000.000,00 | 18     | 70.000.000,00 | 18     | 80.000.000,00 | 18     | 90.000.000,00 | 18     | 100.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0028 - Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0,00          |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan            | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Advokasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan)    | 1                   | 0                               | 0,00          | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0029 - Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0,00          |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Sinergitas Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                            | Jumlah Daerah Kabupaten/Kota yang menetapkan Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Kabupaten/Kota)                                                                                                  | 1                   | 0                               | 0,00          | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.14.02.2.01.0030 - Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan   |                                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 0,00          |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00 |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| Terlaksananya Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan         | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan (Laporan) | 1                   | 1                               | 0,00          | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00 | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |   |                  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|---|------------------|--|--|
| 2.14.02.2.01.0031 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | 0,00             |   | 50.000.000,00    |   | 50.000.000,00    |   | 50.000.000,00    |   | 50.000.000,00    |  |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                  | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                            | 1 | 1 | 0,00             | 1 | 50.000.000,00    | 1 | 50.000.000,00    | 1 | 50.000.000,00    | 1 | 50.000.000,00    |  |  |
| 2.14.02.2.01.0032 - Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Kepedulian Terhadap Isu Kependudukan (IKIK)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | 0,00             |   | 50.000.000,00    |   | 50.000.000,00    |   | 50.000.000,00    |   | 50.000.000,00    |  |  |
| Terlaksananya Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan                                                                                                                                                 | Jumlah Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan (Dokumen)                                                                                                                                                                                   | 1 | 0 | 0,00             | 1 | 50.000.000,00    | 1 | 50.000.000,00    | 1 | 50.000.000,00    | 1 | 50.000.000,00    |  |  |
| 2.14.02.2.01.0033 - Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | 10.800.000,00    |   | 89.650.000,00    |   | 89.650.000,00    |   | 89.650.000,00    |   | 89.650.000,00    |  |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal dan informal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota                                                                                  | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota (Dokumen)                                                                                                                         | 1 | 1 | 10.800.000,00    | 1 | 89.650.000,00    | 1 | 89.650.000,00    | 1 | 89.650.000,00    | 1 | 89.650.000,00    |  |  |
| 2.14.02.2.01.0034 - Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | 10.968.800,00    |   | 89.750.000,00    |   | 89.750.000,00    |   | 89.750.000,00    |   | 89.750.000,00    |  |  |
| Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah       | Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah (Perangkat Daerah) | 1 | 1 | 10.968.800,00    | 1 | 89.750.000,00    | 1 | 89.750.000,00    | 1 | 89.750.000,00    | 1 | 89.750.000,00    |  |  |
| 2.14.02.2.02 - Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |   | 1.445.600.000,00 |   | 2.111.000.000,00 |   | 2.111.000.000,00 |   | 2.111.000.000,00 |   | 2.111.000.000,00 |  |  |

| Jumlah Penduduk Kabupaten Mojokerto                               | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)                                                                                                                                          | 1                   | 1                               | 1.445.600.000,00 | 1      | 2.111.000.000,00 | 1      | 2.111.000.000,00 | 1      | 2.111.000.000,00 | 1      | 2.111.000.000,00 |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                 | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                                            |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                              | (02)                                                                                                                                                                                                       | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
|                                                                   | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)                                                                                                                                       | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)                                                                                                                | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)                                                                                                                 | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)                                                                                                                                                                | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)                                                                                                                  | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellai Sistem Informasi Keluarga (Dokumen)                                        | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)                                                                                                              | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)                                                                                                              | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                          |                                                                                                                       |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                  |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
|                                                                                          | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen) | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                                          | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)                                       | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |
|                                                                                          | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)                                              | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |
|                                                                                          | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)                                                         | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0009 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga   |                                                                                                                       |                     |                                 | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |        | 60.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga         | Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga (Laporan)                           | 1                   | 1                               | 60.000.000,00    | 1      | 60.000.000,00    | 1      | 60.000.000,00    | 1      | 60.000.000,00    | 1      | 60.000.000,00    |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                        | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                            | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                          |                                                                                                                       |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                          |                                                                                                                       |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                     | (02)                                                                                                                  | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
| 2.14.02.2.02.0010 - Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                    |                                                                                                                       |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga                          | Jumlah Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga yang Dimanfaatkan (Dokumen)                                              | 1                   | 0                               | 0,00             |        | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0011 - Penyediaan Data dan Informasi Keluarga                               |                                                                                                                       |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Tersedianya Data dan Informasi Keluarga                                                  | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya (Dokumen)                                                         | 1                   | 0                               | 0,00             | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0012 - Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                             |                                                                                                                       |                     |                                 | 242.400.000,00   |        | 242.400.000,00   |        | 242.400.000,00   |        | 242.400.000,00   |        | 242.400.000,00   |                  |            |
| Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga                                   | Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga (Laporan)                                                     | 1                   | 1                               | 242.400.000,00   | 1      | 242.400.000,00   | 1      | 242.400.000,00   | 1      | 242.400.000,00   | 1      | 242.400.000,00   |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0013 - Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB |                                                                                                                       |                     |                                 | 1.100.000.000,00 |        | 1.100.000.000,00 |        | 1.100.000.000,00 |        | 1.100.000.000,00 |        | 1.100.000.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| Terlaksananya Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB                                                                              | Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB (Dokumen)                                                                       | 1                   | 1                               | 1.100.000.000,00 | 1      | 1.100.000.000,00 | 1      | 1.100.000.000,00 | 1      | 1.100.000.000,00 | 1      | 1.100.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0016 - Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk di tingkat kabupaten/kota                                                          |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk oleh pemerintah daerah kabupaten/kota                                                                | Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)                                                                                                | 1                   | 0                               | 0,00             | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0018 - Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana                                                                    |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)             | Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)                                                                          | 1                   | 0                               | 0,00             | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0022 - Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan                                                                                                             | Jumlah Kajian Dampak Kependudukan (Dokumen)                                                                                                                         | 1                   | 0                               | 0,00             | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0023 - Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) melalui Sistem Informasi Keluarga |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mealui Sistem Informasi Keluarga        | Jumlah Dokumen Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan, Kleuarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Bangga Kencana) mellai Sistem Informasi Keluarga (Dokumen) | 1                   | 0                               | 0,00             | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| 2.14.02.2.02.0024 - Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                        |                                                                                                                                                                     |                     |                                 | 0,00             |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |        | 50.000.000,00    |                  |            |
| Terlaksananya Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan                                                                              | Jumlah Dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan (Dokumen)                                                                       | 1                   | 0                               | 0,00             | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    | 1      | 50.000.000,00    |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                               | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                          | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                     |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| (01)                                                                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                                                       | (03) | (04)  | (05)             | (06)  | (07)             | (08)  | (09)             | (10)  | (11)             | (12)  | (13)             | (14)                                                                                                | (15) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.14.02.2.02.0025 - Perumusan Parameter pengendalian penduduk dan KB                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 10.800.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| Terlaksananya Perumusan dan Evaluasi Parameter Pengendalian penduduk dan KB                                                                                                                | Jumlah Dokumen Parameter Pengendalian penduduk dan KB yang dirumuskan (Dokumen)                                                                                                                            | 1    | 1     | 10.800.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| 2.14.02.2.02.0026 - Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain                                |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 10.800.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain | Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit) | 1    | 1     | 10.800.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| 2.14.02.2.02.0027 - Penyusunan Profil program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                  |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 10.800.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| Terlaksananya Penyusunan profil program Bangga Kencana tingkat Kabupaten/Kota provinsi (Termasuk diseminasi dan evaluasi hasil penyusunan profil Pengendalian Penduduk dan KB)             | Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Dokumen)                                                                                                                  | 1    | 1     | 10.800.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| 2.14.02.2.02.0028 - Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                           |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 10.800.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |       | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| Terlaksananya Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)                                                                                 | Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)                                                                                      | 1    | 1     | 10.800.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    | 1     | 89.650.000,00    |                                                                                                     |      |
| 2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                            |      |       | 9.089.510.000,00 |       | 9.089.510.000,00 |       | 9.089.510.000,00 |       | 9.189.510.000,00 |       | 9.189.510.000,00 |                                                                                                     |      |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)                                                                                               | Persentase PUS yang Mendapat Pelayanan Keluarga Berencana (%)                                                                                                                                              |      | 80,56 | 9.089.510.000,00 | 80,57 | 9.089.510.000,00 | 80,58 | 9.089.510.000,00 | 80,59 | 9.189.510.000,00 | 80,60 | 9.189.510.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000 - DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 2.14.03.2.01 - Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 1.818.550.000,00 |        | 2.051.000.000,00 |        | 2.051.000.000,00 |        | 2.051.000.000,00 |        | 2.051.000.000,00 |                  |            |
| Persentase masyarakat yang terpapar isi pesan Program KKBPK (Advokasi dan KIE)                                                         | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 10                  | 10                              | 1.818.550.000,00 | 10     | 2.051.000.000,00 | 10     | 2.051.000.000,00 | 10     | 2.051.000.000,00 | 10     | 2.051.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
|                                                                                                                                        | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)                                                                                                 | 18                  | 0                               |                  | 18     |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)                                                                 | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)                                                      | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)                                                     | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)                                                                                                                                                                                        | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |        |                  |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)                                                                                | 18                  | 18                              |                | 18     |                | 18     |                | 18     |                | 18     |                |                  |            |
| 2.14.03.2.01.0008 - Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 190.150.000,00 |        | 118.000.000,00 |        | 118.000.000,00 |        | 118.000.000,00 |        | 118.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Pengendalian Program KKBPK                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK (Laporan)                                                                                                                                                                                        | 1                   | 1                               | 190.150.000,00 | 1      | 118.000.000,00 | 1      | 118.000.000,00 | 1      | 118.000.000,00 | 1      | 118.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.03.2.01.0009 - Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 185.700.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                | Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan Pendistribusian KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Unit)                                                                                                 | 18                  | 0                               | 185.700.000,00 | 18     | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.03.2.01.0010 - Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 882.000.000,00 |        | 882.000.000,00 |        | 882.000.000,00 |        | 882.000.000,00 |        | 882.000.000,00 |                  |            |
| Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)                                                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)                                                                                | 18                  | 18                              | 882.000.000,00 | 18     | 882.000.000,00 | 18     | 882.000.000,00 | 18     | 882.000.000,00 | 18     | 882.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                       | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                                                                                             | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| 2.14.03.2.01.0011 - Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 | 0,00           |        | 360.000.000,00 |        | 360.000.000,00 |        | 360.000.000,00 |        | 360.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) | Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) (Laporan) | 10                  | 10                              | 0,00           | 10     | 360.000.000,00 | 10     | 360.000.000,00 | 10     | 360.000.000,00 | 10     | 360.000.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 2.14.03.2.01.0012 - Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang                                                        |                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |        | 125.000.000,00   |                  |            |
| Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang | Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen) | 1                   | 1                               | 125.000.000,00   | 1      | 125.000.000,00   | 1      | 125.000.000,00   | 1      | 125.000.000,00   | 1      | 125.000.000,00   |                  |            |
| 2.14.03.2.01.0013 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 185.700.000,00   |        | 158.000.000,00   |        | 158.000.000,00   |        | 158.000.000,00   |        | 158.000.000,00   |                  |            |
| Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal            | Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan (Dokumen)  | 1                   | 0                               | 185.700.000,00   | 1      | 158.000.000,00   | 1      | 158.000.000,00   | 1      | 158.000.000,00   | 1      | 158.000.000,00   |                  |            |
| 2.14.03.2.01.0014 - Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                                                       |                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |        | 250.000.000,00   |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja                                    | Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)             | 1                   | 1                               | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   | 1      | 250.000.000,00   |                  |            |
| 2.14.03.2.02 - Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 2.666.250.000,00 |        | 2.638.550.000,00 |        | 2.638.550.000,00 |        | 2.638.550.000,00 |        | 2.638.550.000,00 |                  |            |
| Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK                                                                                                                                 | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)                                                                                                                            | 10                  | 0                               | 2.666.250.000,00 | 10     | 2.638.550.000,00 | 10     | 2.638.550.000,00 | 10     | 2.638.550.000,00 | 10     | 2.638.550.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                                                   | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)           | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     |                  |     |                  |    |                  |     |                  |     |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|------------------|----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 1   | 1   |                  | 1   |                  | 1  |                  | 1   |                  | 1   |                  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                         | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)                                                                                                                                                                                      | 304 | 304 |                  | 304 |                  |    |                  | 304 |                  | 304 |                  |  |  |
| 2.14.03.2.02.0002 - Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | 185.700.000,00   |     | 158.000.000,00   |    | 158.000.000,00   |     | 158.000.000,00   |     | 158.000.000,00   |  |  |
| Tersedianya Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB                                                                                                                                                       | Jumlah Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB yang Tersedia (Unit)                                                                                                                                                                                                              | 10  | 0   | 185.700.000,00   | 10  | 158.000.000,00   | 10 | 158.000.000,00   | 10  | 158.000.000,00   | 10  | 158.000.000,00   |  |  |
| 2.14.03.2.02.0004 - Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | 1.070.650.000,00 |     | 1.070.650.000,00 |    | 1.070.650.000,00 |     | 1.070.650.000,00 |     | 1.070.650.000,00 |  |  |
| Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)                                                                                                                                     | Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)                                                                                                                                                                                      | 304 | 304 | 1.070.650.000,00 | 304 | 1.070.650.000,00 |    | 1.070.650.000,00 | 304 | 1.070.650.000,00 | 304 | 1.070.650.000,00 |  |  |
| 2.14.03.2.02.0005 - Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | 1.247.900.000,00 |     | 1.247.900.000,00 |    | 1.247.900.000,00 |     | 1.247.900.000,00 |     | 1.247.900.000,00 |  |  |
| Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB                                                      | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB (Organisasi)                                                                                             | 1   | 1   | 1.247.900.000,00 | 1   | 1.247.900.000,00 | 1  | 1.247.900.000,00 | 1   | 1.247.900.000,00 | 1   | 1.247.900.000,00 |  |  |
| 2.14.03.2.02.0007 - Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |     | 162.000.000,00   |     | 162.000.000,00   |    | 162.000.000,00   |     | 162.000.000,00   |     | 162.000.000,00   |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) | Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) (Laporan) | 1                   | 1                               | 162.000.000,00   | 1      | 162.000.000,00   | 1      | 162.000.000,00   | 1      | 162.000.000,00   | 1      | 162.000.000,00   |                  |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| 2.14.03.2.03 - Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                                 | 3.695.350.000,00 |        | 3.496.050.000,00 |        | 3.496.050.000,00 |        | 3.496.050.000,00 |        | 3.496.050.000,00 |                  |            |
| Persentase Fasilitasi kesehatan (faskes) yang siap melayani KB MKJP                                                                                                                                                                                          | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)                                                                                                                                                    | 1                   | 0                               | 3.695.350.000,00 | 1      | 3.496.050.000,00 | 1      | 3.496.050.000,00 | 1      | 3.496.050.000,00 | 1      | 3.496.050.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                            | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                    | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                         | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                          | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)                                                                                                                                                                             | 5.432               | 5.432                           |                  | 5.432  |                  | 5.432  |                  | 5.432  |                  | 5.432  |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)                                                                                                    | 1                   | 1                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)                                                                                                                       | 2                   | 2                               |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  | 2      |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)                                                                                                                                                                                                           | 2                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                              | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)                                                                                                                                                                                       | 1                   | 0                               |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  | 1      |                  |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                     |                                 |                |        |                |        |                |        |                |        |                |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                                                       | Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)                                               | 1                   | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)                                                                                                       | 1                   | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)                                                                                                                           | 18                  | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)                                         | 1                   | 0                               |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                | 1      |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang)    | 50                  | 0                               |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)                                                                                              | 50                  | 0                               |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)                                                                                              | 50                  | 1                               |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                | 50     |                |                  |            |
| 2.14.03.2.03.0001 - Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                                                                                                                                                                            |                     |                                 | 215.700.000,00 |        | 138.000.000,00 |        | 138.000.000,00 |        | 138.000.000,00 |        | 138.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya       | Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 1                   | 1                               | 215.700.000,00 | 1      | 138.000.000,00 | 1      | 138.000.000,00 | 1      | 138.000.000,00 | 1      | 138.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                     | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                 | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                  | (02)                                                                                                                                                                       | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                              |                                                                                                                                                         |       |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--|--|
| 2.14.03.2.03.0003 - Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                |                                                                                                                                                         |       |       | 1.943.050.000,00 |       | 1.943.050.000,00 |       | 1.943.050.000,00 |       | 1.943.050.000,00 |       | 1.943.050.000,00 |  |  |
| Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)                                                        | Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)                                                       | 5.432 | 5.432 | 1.943.050.000,00 | 5.432 | 1.943.050.000,00 | 5.432 | 1.943.050.000,00 | 5.432 | 1.943.050.000,00 | 5.432 | 1.943.050.000,00 |  |  |
| 2.14.03.2.03.0004 - Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                |                                                                                                                                                         |       |       | 185.700.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |  |  |
| Tersedianya Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP                                                                   | Jumlah Laporan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP (Laporan)                                                                 | 1     | 0     | 185.700.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   |  |  |
| 2.14.03.2.03.0005 - Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                        |                                                                                                                                                         |       |       | 185.700.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |  |  |
| Terlaksananya Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB                              | Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB (Dokumen)                              | 1     | 0     | 185.700.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   |  |  |
| 2.14.03.2.03.0006 - Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                 |                                                                                                                                                         |       |       | 185.700.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |  |  |
| Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB                                                                                                    | Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)                                                                                                        | 18    | 0     | 185.700.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   | 1     | 158.000.000,00   |  |  |
| 2.14.03.2.03.0007 - Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                |                                                                                                                                                         |       |       | 185.700.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |  |  |
| Terlaksananya Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB                                                                                      | Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB (Orang)                                                                           | 50    | 1     | 185.700.000,00   | 50    | 158.000.000,00   | 50    | 158.000.000,00   | 50    | 158.000.000,00   | 50    | 158.000.000,00   |  |  |
| 2.14.03.2.03.0008 - Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya |                                                                                                                                                         |       |       | 236.700.000,00   |       | 159.000.000,00   |       | 159.000.000,00   |       | 159.000.000,00   |       | 159.000.000,00   |  |  |
| Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya       | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan) | 2     | 2     | 236.700.000,00   | 2     | 159.000.000,00   | 2     | 159.000.000,00   | 2     | 159.000.000,00   | 2     | 159.000.000,00   |  |  |
| 2.14.03.2.03.0010 - Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                      |                                                                                                                                                         |       |       | 185.700.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |       | 158.000.000,00   |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi                                       | Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (Orang)                                      | 1                   | 0                               | 185.700.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 |                  |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|------------------|------------|
| 2.14.03.2.03.0011 - Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                          |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 185.700.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak                                                                                | Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak (Laporan)                                                                                                     | 2                   | 0                               | 185.700.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.03.2.03.0013 - Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                       |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 185.700.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |        | 158.000.000,00 |                  |            |
| Terwujudnya Peningkatan Kesertaan KB Pria                                                                                               | Jumlah Akseptor yang Mendapat Peningkatan Kesetaraan KB Pria (Orang)                                                                                                    | 1                   | 0                               | 185.700.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 | 1      | 158.000.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                       | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                |        |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                | 2030   |                |                  |            |
|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |                  |            |
| (01)                                                                                                                                    | (02)                                                                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14)             | (15)       |
| 2.14.03.2.03.0015 - Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 0,00           |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB       | Jumlah Pengelola dan Petugas yang mengikuti Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB (Orang) | 50                  | 0                               | 0,00           | 50     | 50.000.000,00  | 50     | 50.000.000,00  | 50     | 50.000.000,00  | 50     | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.14.03.2.03.0016 - Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                           |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 0,00           |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan                                                                                 | Jumlah orang yang mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan (Orang)                                                                                           | 50                  | 0                               | 0,00           | 50     | 50.000.000,00  | 50     | 50.000.000,00  | 50     | 50.000.000,00  | 50     | 50.000.000,00  |                  |            |
| 2.14.03.2.03.0017 - Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                            |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 0,00           |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |        | 50.000.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan                                         | Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan (Kegiatan)                                            | 1                   | 0                               | 0,00           | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  | 1      | 50.000.000,00  |                  |            |

| 2.14.03.2.04 - Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB |                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 909.360.000,00 |        | 903.910.000,00 |        | 903.910.000,00 |        | 1.003.910.000,00 |        | 1.003.910.000,00 |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|
| Jumlah stakeholder pemangku kepentingan dan mitra kerja (termasuk organisasi kemasyarakatan) yang berperan serta aktif dalam pengelolaan program Bangga Kencana            | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)                                                                                             | 1                   | 0                               | 909.360.000,00 | 1      | 903.910.000,00 | 1      | 903.910.000,00 | 1      | 1.003.910.000,00 | 1      | 1.003.910.000,00 |                  |            |
|                                                                                                                                                                            | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)                                                                                                                                           | 18                  | 0                               |                | 18     |                | 18     |                | 18     |                  | 18     |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                            | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 96                  | 96                              |                | 96     |                | 96     |                | 96     |                  | 96     |                  |                  |            |
| 2.14.03.2.04.0005 - Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                             |                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 185.700.000,00 |        | 208.000.000,00 |        | 208.000.000,00 |        | 208.000.000,00   |        | 208.000.000,00   |                  |            |
| Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                   | Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)                                                                                                                                           | 18                  | 0                               | 185.700.000,00 | 18     | 208.000.000,00 | 18     | 208.000.000,00 | 18     | 208.000.000,00   | 18     | 208.000.000,00   |                  |            |
| 2.14.03.2.04.0006 - Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas                                                                     |                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 537.600.000,00 |        | 537.600.000,00 |        | 537.600.000,00 |        | 537.600.000,00   |        | 537.600.000,00   |                  |            |
| Terwujudnya Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung Keluarga Berkualitas                | Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung) | 96                  | 96                              | 537.600.000,00 | 96     | 537.600.000,00 | 96     | 537.600.000,00 | 96     | 537.600.000,00   | 96     | 537.600.000,00   |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                          | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                   | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |        |                |        |                |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                     | 2026                            |                | 2027   |                | 2028   |                | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                              |                     | TARGET                          | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |
| (01)                                                                                                                                                                       | (02)                                                                                                                                                                         | (03)                | (04)                            | (05)           | (06)   | (07)           | (08)   | (09)           | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |
| 2.14.03.2.04.0007 - Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                     |                                 | 186.060.000,00 |        | 158.310.000,00 |        | 158.310.000,00 |        | 258.310.000,00   |        | 258.310.000,00   |                  |            |
| Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)                                                                                             | 1                   | 0                               | 186.060.000,00 | 1      | 158.310.000,00 | 1      | 158.310.000,00 | 1      | 258.310.000,00   | 1      | 258.310.000,00   |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 2.463.000.000,00 |       | 2.463.000.000,00 |       | 2.463.000.000,00 |       | 2.607.400.000,00 |       | 2.707.400.000,00 |                                                                                                        |  |
| Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)          | Persentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif (%)                                                                                                                                                                                                                         |    | 97,81 | 2.463.000.000,00 | 97,86 | 2.463.000.000,00 | 97,91 | 2.463.000.000,00 | 97,97 | 2.607.400.000,00 | 98,02 | 2.707.400.000,00 | 2.14.2.08.0.00.05.0000<br>- DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN |  |
| 2.14.04.2.01 - Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |       | 765.900.000,00   |       | 768.900.000,00   |       | 768.900.000,00   |       | 913.300.000,00   |       | 1.013.300.000,00 |                                                                                                        |  |
| Jumlah Kelompok Bangsa Kencana yang Efektif                                                            | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang)                                                                                | 10 | 0     | 765.900.000,00   | 10    | 768.900.000,00   | 10    | 768.900.000,00   | 10    | 913.300.000,00   | 10    | 1.013.300.000,00 |                                                                                                        |  |
|                                                                                                        | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang)                                                                 | 25 | 30    |                  | 30    |                  | 30    |                  | 30    |                  |       |                  |                                                                                                        |  |
|                                                                                                        | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)                                                                                                 |    |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |                                                                                                        |  |
|                                                                                                        | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) |    |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |       |                  |                                                                                                        |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                   | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)                          | 10                  | 0                               |      | 10     |      | 10     |      | 10     |      | 10     |      |                  |            |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|------------|
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                            | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                     | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                  |            |
|                                                                   |                                                                                                                                                                                       |                     | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                  |            |
| (01)                                                              | (02)                                                                                                                                                                                  | (03)                | (04)                            | (05) | (06)   | (07) | (08)   | (09) | (10)   | (11) | (12)   | (13) | (14)             | (15)       |
|                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)                                                                                   |                     |                                 |      |        |      |        |      |        |      |        |      |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)                                                                               |                     |                                 |      |        |      |        |      |        |      |        |      |                  |            |
|                                                                   | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)                                                             | 1                   | 1                               |      | 1      |      | 1      |      | 1      |      | 1      |      |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)   | 1                   | 0                               |      | 1      |      | 1      |      | 1      |      | 1      |      |                  |            |
|                                                                   | Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)                                                                                |                     |                                 |      |        |      |        |      |        |      |        |      |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)                                                                                      | 50                  | 0                               |      | 50     |      | 50     |      | 50     |      | 50     |      |                  |            |
|                                                                   | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit) | 10                  | 10                              |      | 10     |      | 10     |      | 10     |      | 10     |      |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                     |                                 |               |        |               |        |               |        |               |        |               |                  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|------------------|------------|
|                                                                                                                                        | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)                                                                                           | 1                   | 0                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan) | 1                   | 0                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
|                                                                                                                                        | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)                                   | 1                   | 0                               |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               | 1      |               |                  |            |
| 2.14.04.2.01.0014 - Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas |                                                                                                                                                                                   |                     |                                 | 65.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas       | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas (Keluarga)                      | 10                  | 0                               | 65.700.000,00 | 10     | 74.700.000,00 | 10     | 74.700.000,00 | 10     | 74.700.000,00 | 10     | 74.700.000,00 |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                      | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                        | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |               |        |               |        |               |        |               |        |               | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                     | 2026                            |               | 2027   |               | 2028   |               | 2029   |               | 2030   |               |                  |            |
|                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |                     | TARGET                          | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          |                  |            |
| (01)                                                                                                                                   | (02)                                                                                                                                                                              | (03)                | (04)                            | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)          | (12)   | (13)          | (14)             | (15)       |
| 2.14.04.2.01.0015 - Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL                                                         |                                                                                                                                                                                   |                     |                                 | 65.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif    | Persentase sekolah lansia yang dilaksanakan di kelompok Bina Keluarga Lansia (Kegiatan)                                                                                           | 1                   | 0                               | 65.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 |                  |            |
| 2.14.04.2.01.0016 - Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                   |                                                                                                                                                                                   |                     |                                 | 73.900.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                         | Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)                                                         | 1                   | 1                               | 73.900.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

| 2.14.04.2.01.0017 - Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                          |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 | 65.700.000,00  |      | 74.700.000,00  |      | 74.700.000,00  |    | 74.700.000,00  |    | 74.700.000,00  |                  |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|------|----------------|------|----------------|----|----------------|----|----------------|------------------|------------|
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)                                                  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)                                                      | 1                   | 0                               | 65.700.000,00  | 1    | 74.700.000,00  | 1    | 74.700.000,00  | 1  | 74.700.000,00  | 1  | 74.700.000,00  |                  |            |
| 2.14.04.2.01.0018 - Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                 |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 | 130.000.000,00 |      | 130.000.000,00 |      | 130.000.000,00 |    | 130.000.000,00 |    | 130.000.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga(BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                                        | Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)                                                    | 10                  | 10                              | 130.000.000,00 | 10   | 130.000.000,00 | 10   | 130.000.000,00 | 10 | 130.000.000,00 | 10 | 130.000.000,00 |                  |            |
| 2.14.04.2.01.0019 - Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 | 106.321.000,00 |      | 36.321.000,00  |      | 36.321.000,00  |    | 136.321.000,00 |    | 156.321.000,00 |                  |            |
| Terlaksananya Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) | Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) (Orang) | 25                  | 30                              | 106.321.000,00 | 30   | 36.321.000,00  | 30   | 36.321.000,00  | 30 | 136.321.000,00 | 30 | 156.321.000,00 |                  |            |
| 2.14.04.2.01.0020 - Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 | 65.700.000,00  |      | 74.700.000,00  |      | 74.700.000,00  |    | 74.700.000,00  |    | 74.700.000,00  |                  |            |
| Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                             | Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Orang)                                                                                                                                         | 50                  | 0                               | 65.700.000,00  | 50   | 74.700.000,00  | 50   | 74.700.000,00  | 50 | 74.700.000,00  | 50 | 74.700.000,00  |                  |            |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                   | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                |      |                |      |                |    |                |    |                | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |
|                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2026                            | 2027           | 2028 | 2029           | 2030 |                |    |                |    |                |                  |            |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                           |      | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU          | TARGET | PAGU           | TARGET | PAGU           |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|----------------|--------|----------------|------|------|
| (01)                                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                                                                      | (03) | (04)   | (05)          | (06)   | (07)          | (08)   | (09)          | (10)   | (11)           | (12)   | (13)           | (14) | (15) |
| 2.14.04.2.01.0021 - Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                          |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 65.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00  |        | 74.700.000,00  |      |      |
| Terlaksananya Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)                                                  | Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA) (Laporan)                                         | 1    | 0      | 65.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00  | 1      | 74.700.000,00  |      |      |
| 2.14.04.2.01.0023 - Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 65.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00 |        | 74.700.000,00  |        | 74.700.000,00  |      |      |
| Terlaksananya Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)                                                                           | 1    | 0      | 65.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00 | 1      | 74.700.000,00  | 1      | 74.700.000,00  |      |      |
| 2.14.04.2.01.0024 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 61.479.000,00 |        | 79.679.000,00 |        | 79.679.000,00 |        | 124.079.000,00 |        | 204.079.000,00 |      |      |
| Tersedianya biaya operasional bagi kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)              | Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Orang) | 10   | 0      | 61.479.000,00 | 10     | 79.679.000,00 | 10     | 79.679.000,00 | 10     | 124.079.000,00 | 10     | 204.079.000,00 |      |      |
| 2.14.04.2.01.0025 - Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                           |      |        | 0             |        | 0             |        | 0             |        | 0              |        | 0              |      |      |
| Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)                                                                                                                       |      |        | 0             |        | 0             |        | 0             |        | 0              |        | 0              |      |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |      |        |      |        |      |        |      |        |      |                  |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|------------------|------------|--|
| 2.14.04.2.01.0026 - Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0                |            |  |
| Tersedianya biaya operasional bagi bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)                                                                                                                     | Jumlah Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang mendapat biaya operasional kegiatan (Kelompok)                                                                                                 |                     |                                 |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0                |            |  |
| 2.14.04.2.01.0027 - Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0                |            |  |
| Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)                                                                                                                                                                                                                    | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Dokumen)                                                                                                                                                                                                  |                     |                                 |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0                |            |  |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                         | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                                                                                                                                                               | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |      |        |      |        |      |        |      |        |      | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 2026                            |      | 2027   |      | 2028   |      | 2029   |      | 2030   |      |                  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | TARGET                          | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU |                  |            |  |
| (01)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | (03)                | (04)                            | (05) | (06)   | (07) | (08)   | (09) | (10)   | (11) | (12)   | (13) | (14)             | (15)       |  |
| 2.14.04.2.01.0028 - Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                                 |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0                |            |  |
| Dibentuknya Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)                     | Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk (Kelompok) |                     |                                 |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0      |      | 0                |            |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                     |                                 |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  |                  |            |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|------------------|------------|--|--|
| 2.14.04.2.01.0029 - Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                 |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |                  |            |  |  |
| Terlaksananya Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)                                                                                                       | Jumlah laporan Penyusunan Strategi Peningkatan Capaian Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) (Laporan)                                                                  |                     |                                 | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |        | 0                |                  |            |  |  |
| 2.14.04.2.02 - Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 1.697.100.000,00 |        | 1.694.100.000,00 |        | 1.694.100.000,00 |        | 1.694.100.000,00 |        | 1.694.100.000,00 |                  |            |  |  |
| Jumlah Kelompok Bangga Kencana yang Efektif                                                                                                                                                       | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)                                                                                     | 1                   | 0                               | 1.697.100.000,00 | 1      | 1.694.100.000,00 | 1      | 1.694.100.000,00 | 1      | 1.694.100.000,00 | 1      | 1.694.100.000,00 |                  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)                     | 1                   | 0                               |                  |        |                  | 1      |                  |        |                  | 1      |                  |                  | 1          |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) | 862                 | 862                             |                  |        |                  | 862    |                  |        |                  | 862    |                  |                  | 862        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)     | 1                   | 1                               |                  |        |                  | 1      |                  |        |                  | 1      |                  |                  | 1          |  |  |
| 2.14.04.2.02.0005 - Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                         |                                                                                                                                                                         |                     |                                 | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |        | 1.500.000.000,00 |                  |            |  |  |
| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT                                                                                                                                 | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT                                                                                                                                              | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN |                  |        |                  |        |                  |        |                  |        |                  | PERANGKAT DAERAH | KETERANGAN |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                     | 2026                            |                  | 2027   |                  | 2028   |                  | 2029   |                  | 2030   |                  |                  |            |  |  |
|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                         |                     | TARGET                          | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             | TARGET | PAGU             |                  |            |  |  |
| (01)                                                                                                                                                                                              | (02)                                                                                                                                                                    | (03)                | (04)                            | (05)             | (06)   | (07)             | (08)   | (09)             | (10)   | (11)             | (12)   | (13)             | (14)             | (15)       |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                         |     |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |     |                  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|------------------|--|--|
| Terlaksananya Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) | Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) (laporan) | 862 | 862 | 1.500.000.000,00 | 862 | 1.500.000.000,00 | 862 | 1.500.000.000,00 | 862 | 1.500.000.000,00 | 862 | 1.500.000.000,00 |  |  |
| 2.14.04.2.02.0006 - Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)            |                                                                                                                                                                         |     |     | 65.700.000,00    |     | 24.700.000,00    |     | 24.700.000,00    |     | 24.700.000,00    |     | 24.700.000,00    |  |  |
| Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)                  | Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan (laporan)     | 1   | 1   | 65.700.000,00    | 1   | 24.700.000,00    | 1   | 24.700.000,00    | 1   | 24.700.000,00    | 1   | 24.700.000,00    |  |  |
| 2.14.04.2.02.0007 - Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Program Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                          |                                                                                                                                                                         |     |     | 65.700.000,00    |     | 94.700.000,00    |     | 94.700.000,00    |     | 94.700.000,00    |     | 94.700.000,00    |  |  |
| Meningkatnya Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga                             | Jumlah Laporan Partisipasi Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Pembangunan Keluarga (Laporan)                     | 1   | 0   | 65.700.000,00    | 1   | 94.700.000,00    | 1   | 94.700.000,00    | 1   | 94.700.000,00    | 1   | 94.700.000,00    |  |  |
| 2.14.04.2.02.0008 - Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga                                                                                            |                                                                                                                                                                         |     |     | 65.700.000,00    |     | 74.700.000,00    |     | 74.700.000,00    |     | 74.700.000,00    |     | 74.700.000,00    |  |  |
| Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga                                                                                                  | Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga (Laporan)                                                                                     | 1   | 0   | 65.700.000,00    | 1   | 74.700.000,00    | 1   | 74.700.000,00    | 1   | 74.700.000,00    | 1   | 74.700.000,00    |  |  |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Table 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Daerah

| NO  | PROGRAM PRIORITAS                                                                                    | OUTCOME                                                                                                                               | KEGIATAN/SUB KEGIATAN                                                                                                                                                               | KET. |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| (1) | (2)                                                                                                  | (3)                                                                                                                                   | (4)                                                                                                                                                                                 | (5)  |
| 1   | Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)                                      | Lomba Duta Genre                                                                                                                      | Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga                                                                                    |      |
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                       | Sub Kegiatan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) |      |
| 2   |                                                                                                      | Program gercep stunting melalui edukasi dan demonstrasi pembuatan menu gizi seimbang DASHAT (Dapur Sehat Atasi Stunting ) di posyandu | Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)                                                                                                    |      |
| 3   |                                                                                                      | Pembinaan PIK Remaja dan Duta Genre Desa untuk pencegahan stunting                                                                    | Kegiatan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal                                                    |      |
|     |                                                                                                      |                                                                                                                                       | Sub Kegiatan Pengelolaan Operasional dan Sarana di balai penyuluhan bangga kencana                                                                                                  |      |
| 4   | Perempuan berkarya (Pemberdayaan perempuan dengan memberikan kesempatan usaha industri rumah tangga) | Pelatihan wirausaha bagi perempuan ojek online, perempuan kepala keluarga, dan perempuan penyintas (korban) kekerasan untuk 40 orang  | Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota                                                 |      |

Catatan :  
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.  
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

|  |  |  |                                                                                                                                                      |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota |  |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Penetapan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, melalui IKU (Indikator Kinerja Utama) yang menjadi prioritas Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING) melalui lomba duta genre dan Pembinaan PIK Remaja dan Duta Genre Desa untuk pencegahan stunting, dan fasilitasi usaha perempuan perempuan yang mendapatkan fasilitasi mampu untuk mandiri dan mengembangkan potensi diri sesuai yang di milikinya.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

| NO  | INDIKATOR                                                        | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN |           |           |           |           |           | KET. |
|-----|------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
|     |                                                                  |        |                  | 2025         | 2026      | 2027      | 2028      | 2029      | 2030      |      |
| (1) | (2)                                                              | (3)    | (4)              | (5)          | (6)       | (7)       | (8)       | (9)       | (10)      | (11) |
| 1   | Prosentase Kepesertaan KB                                        | Persen | 80,06%           | 80,07%       | 80,08%    | 80,09%    | 80,10%    | 80,11%    | 80,12%    |      |
| 2   | Prosentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi           | Persen | 88,15%           | 88,15%       | 89,00%    | 89,10%    | 89,20%    | 89,30%    | 89,40%    |      |
| 3   | Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan | Persen | 100%             | 100%         | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |      |
| 4   | Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang terselesaikan      | Persen | 100%             | 100%         | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      | 100%      |      |
| 5   | Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG           | Persen | 11,50%           | 11,80%       | 11,85%    | 11,90%    | 11,95%    | 12,00%    | 12,05%    |      |
| 6   | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                                     | Nilai  | 84,50 (A)        | 84,60 (A)    | 84,61 (A) | 84,62 (A) | 84,63 (A) | 84,64 (A) | 84,65 (A) |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ada 6 indikator :

- 1. Prosentase Kepesertaan Keluarga Berencana dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ yang\ Ikut\ KB/PA\ (Peserta\ Aktif)}{Jumlah\ Pasangan\ Usia\ Subur\ (PUS)} \times 100\%$$

Berdasarkan data di atas di harapkan prosentase kepesertaan KB naik dari besline tahun 2024 sebesar 80,06 %, sampai dengan tahun 2030 naik menjadi 80,12 %.

- 2. Prosentase Keluarga Beresiko Stunting yang di dampingi dengan formulasi perhitungan :

$$\frac{Jumlah\ Keluarga\ Resiko\ Stunting\ yang\ di\ dampingi}{Jumlah\ Keluarga\ Resiko\ Stunting} \times 100\%$$

Berdasarkan data di atas Prosentase Keluarga Beresiko Stunting tahun 2024 sebesar 88,15 %, dari sasaran keluarga resiko stunting 18.825 keluarga sedangkan keluarga yang telah di dampingi sebesar 16.596 keluarga, di harapkan sampai dengan tahun 2030 keluarga yang di dampingi di Kabupaten Mojokerto naik menjadi 89,40 %.

- 3. Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang terselesaikan  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang melapor ke UPTD sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 dan telah di tangani sebanyak 12 Kasus, kekerasan fisik 7 orang, psikis 4 orang, dan eksploitasi 1 orang.  
Metode perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Terselesaikan adalah :

$$\frac{Jumlah\ Korban\ yang\ terselesaikan}{Jumlah\ Korban} \times 100\%$$

- 4. Prosentase Kasus Kekerasan terhadap Anak yang Terselesaikan  
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang melapor ke UPTD sampai dengan bulan Juni Tahun 2025 dan telah di tangani sebanyak 18 Kasus, kekerasan fisik 3 anak, psikis 2 anak, seksual 11 anak dan kekerasan lainnya 2 orang.  
Metode perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Kasus Kekerasan Terhadap Anak yang Terselesaikan adalah :

$$\frac{Jumlah\ Korban\ yang\ terselesaikan}{Jumlah\ Korban} \times 100\%$$

- 5. Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG  
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan satu rangkaian strategi untuk mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) secara terpadu baik secara lintas sektoral pemerintah maupun dengan melibatkan kerjasama dengan pihak

eksternal Pemerintah. Pembangunan Responsif Gender (PPRG) di daerah yang meliputi 5 (lima) aspek yaitu : Aspek Komitmen dan Kebijakan, Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya, Aspek Profil Gender dan Data Terpilah, serta Aspek Partisipasi Masyarakat. Dalam hal ini Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan perempuan, telah meningkatkan pembinaan pelaksanaan Anggaran Responsif Gender, arah kebijakan yang di lakukan, Melakukan pelatihan, monitoring dan evaluasi terkait PPRG (Perencanaan Penggaran Responsif Gender)

Metode perhitungan untuk Indikator Kinerja Utama Prosentase Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan PUG adalah :

$$\frac{\text{Jumlah ARG Pada Belanja Operasional dan Modal APBD}}{\text{Jumlah Seluruh Belanja Operasional dan Modal APBD}} \times 100\%$$

6. Nilai SAKIP Perangkat Daerah di dapat dari hasil evaluasi inspektorat :
  1. Komponen Perencanaan Kinerja 30,00
  2. Pengukuran Kinerja 30,00
  3. Pelaporan Kinerja 15,00
  4. Evaluasi Internal 25,00

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci

| NO  | INDIKATOR                                                                           | SATUAN | BASELINE<br>2024 | TARGET TAHUN   |                |                |                |                |                | KET. |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------|
|     |                                                                                     |        |                  | 2025           | 2026           | 2027           | 2028           | 2029           | 2030           |      |
| (1) | (2)                                                                                 | (3)    | (4)              | (5)            | (6)            | (7)            | (8)            | (9)            | (10)           | (11) |
| 1   | Persentase ARG pada belanja langsung APBD                                           | Persen | 11.77%           | 11.80%         | 11,85%         | 11,90%         | 11,95%         | 12%            | 12,05%         |      |
| 2   | Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota     | Persen | 100%             | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           | 100%           |      |
| 3   | Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)  | Rasio  | Rasio = 2.0899   | Rasio = 2.0899 | Rasio = 2.0899 | Rasio = 2.0899 | Rasio = 2.0899 | Rasio = 2.0899 | Rasio = 2.0899 |      |
| 4   | TFR (Angka Kelahiran Total)                                                         | -      | 1.95             | 1.95           | 1.95           | 1.95           | 1.95           | 1.95           | 1.95           |      |
| 5   | Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) | Persen | 80.06%           | 80.01%         | 80.02%         | 80.03%         | 80.04%         | 80.05%         | 80.06%         |      |
| 6   | Persentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)                        | Persen | 6.99%            | 6.99%          | 6.99%          | 6.99%          | 6.99%          | 6.99%          | 6.99%          |      |
| 7   | Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)                                   | Persen | 67.4%            | 66.4%          | 65.4%          | 64.4%          | 63.4%          | 62.4%          | 61.4%          |      |
| 8   | Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern                    | Persen | 92.6%            | 93.6%          | 94.6%          | 95.6%          | 96.6%          | 97.6%          | 98.6%          |      |
| 9   | Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)                                       | Persen | 12.6%            | 11.6%          | 10.6%          | 9.6%           | 8.6%           | 7.6%           | 6.6%           |      |
| 10  | Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja                                                   | Persen | 86.90%           | 86.91%         | 86.92%         | 86.93%         | 86.94%         | 86.95%         | 86.96%         |      |
| 11  | Indeks Lansia Berdaya                                                               | Persen | 57.20%           | 57.21%         | 57.22%         | 57.23%         | 57.24%         | 57.25%         | 57.26%         |      |
| 12  | Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri.                               | Persen | 42,87 %          | 47,80 %        | 52,80 %        | 57,80 %        | 62,80 %        | 67,80 %        | 72,80 %        |      |
| 13  | Nilai Inovasi IGA PD                                                                | Nilai  | N/a              | 85             | 86             | 87             | 88             | 89             | 90             |      |

Catatan :

1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.

2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".

Indikator Kinerja Kunci Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan pemberdayaan Perempuan dari dua urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ada 6 indikator yaitu :

**a. Presentase ARG pada belanja langsung APBD**

Mengukur persentase anggaran responsive gender pada belanja APD

**Rumus :**

$$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasional dan modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh belanja operasional dan modal APBD}} \times 100\%$$

**Definisi Operasional**

**Pembilang :**

Jumlah keseluruhan anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD di seluruh perangkat daerah kabupaten/kota.

**Penyebut :**

Jumlah keseluruhan belanja operasi dan belanja modal APBD.

**Regulasi :**

- ✓ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.
- ✓ Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah.

**b. Presentase anak korban kekerasan yang di tangani instansi terkait Kabupaten/ Kota**

Mengukur persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kabupaten/Kota

**Rumus :**

$$\frac{\text{Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang di tangani instansi tingkat kabupaten kota yang di dampingi}}{\text{Jumlah anak korban kekerasan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kota (Penduduk usia kurang dari 18 tahun)}} \times 100\%$$

**Definisi Operasional**

**Pembilang :**

Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap anak, pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, rehabilitasi sosial bagi anak korban kekerasan, penegakan dan bantuan hukum bagi anak korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi anak korban kekerasan.

**Penyebut :**

Jumlah penduduk di Kabupaten/Kota berusia kurang dari 18 tahun yang mengalami tindakan kekerasan.

**Regulasi :**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

**c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)**

Mengukur rasio kekerasan terhadap perempuan (per 100.000 perempuan)

**Rumus :**

$$\frac{Jumlah\ Perempuan\ yang\ mengalami\ kekerasan}{Jumlah\ penduduk\ perempuan} \times 100\%$$

**Definisi Operasional**

**Pembilang :**

Jumlah perempuan korban kekerasan yang berusia diatas 18 tahun dan/atau sudah menikah yang ditangani dan mendapatkan pendampingan meliputi layanan penanganan pengaduan/laporan korban, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan korban kekerasan dan pemulangan dan reintegrasi sosial.

**Penyebut :**

Jumlah keseluruhan Perempuan yang berusia lebih dari 18 tahun dan/atau sudah menikah di kabupaten/kota.

**Regulasi :**

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak No. 2 Tahun 2022 tentang standar Layanan Perlindungan Perempuan dan Anak.

**d. TFR (angka kelahiran total)**

Mengukur angka kelahiran total (Total Fertility Rate)

**Rumus :**

$$FR = 5 \sum_{i = 1}^7 ASFR_i$$

$$TFR = \frac{\sum b_i}{\sum p_i} \times k$$

- TFR = Angka Kelahiran Total
- ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur
- $b_i$  = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur  $i$  pada tahun tertentu
- $p_i$  = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur  $i$  pada pertengahan tahun yang sama
- $I$  = kelompok umur
- $i$  = untuk kelompok umur 15-19
- $i$  = untuk kelompok umur 20-24, ..... s.d
- $i$  = untuk kelompok Umur 45-49 k Bilangan Konstanta biasanya 1000

Angka kelahiran total (Total Fertility Rate) adalah hasil perhitungan rata - rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa produksinya (15-49 tahun).

**Regulasi :**

Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 108/KEP/B1/2020 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024.

**e. Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)**

Mengukur tingkat pemakaian kontrasepsi modern

**Rumus :**

$$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif Modern}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

**Definisi Operasional**

**Pembilang :**

Seluruh jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat kontrasepsi terus-menerus dengan metode modern seperti kondom, suntik, pil, AKDR, MOW, MOP, Implan dan MAL untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau mengakhiri kesuburan.

**Penyebut :**

Jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan

sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah kabupaten/kota.

**Regulasi :**

Perka BKKBN RI No. 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

**f. Presentase kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi (unmet need)**

Mengukur persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

**Rumus :**

$$\frac{\text{Jumlah PUS yang ingin ber – KB tetapi tidak terlayani}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$$

**Definisi Operasional**

**Pembilang :**

Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) yang tidak menggunakan alat kontrasepsi karena ingin anak ditunda atau tidak ingin anak lagi diwilayah kabupaten/kota.

**Penyebut :**

Seluruh jumlah pasangan suami istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun atau pasangan suami istri yang istri berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan) diwilayah kabupaten/kota.

**Regulasi :**

Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Bagi Pasangan Usia Subur Dalam Pelayanan Keluarga Berencana.

**g. Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah yang harus di masukkan ke dokumen perencanaan.**

**a. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)**

**b. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern**

**c. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)**

**d. Indeks Pengasuhan Keluarga Remaja**

**e. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri.**

**f. Indeks Lansia Berdaya**

Merupakan 6 (enam) indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana untuk mendapatkan dukungan pemerintah daerah melalui

sub kegiatan terkait sesuai Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang harus di masukkan. Ada beberapa indicator yang sudah menjadi indicator program sesuai inmen nomor 2 tahun 2025.

Indikator lain yang akan diterbitkan Peraturan Presiden tentang Desain Pembangunan Kependudukan pengganti Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah berbasis kependudukan, berdasarkan surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 400.9.3/3745/Bangda perihal : Indikator Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Daerah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2025–2029 merupakan penerjemah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021–2026, khususnya yang berkenaan dengan Misi DUA yaitu “Mewujudkan SDM yang tangguh, cerdas, terampil, produktif dan berkarakter melalui peningkatan kualitas pendidikan serta meningkatkan kesejahteraan pendidik, serta Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat guna mewujudkan keluarga yang Sejahtera “. Hal ini terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto di susun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025–2029 yang telah direview dan tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.

Dikemudian hari apabila ada perubahan-perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah di susun memerlukan penyesuaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Ranwal Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada DP2KBP2 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya dimasa yang akan datang.

Mojokerto, 16 September 2025

KEPALA DP2KBP2  
KABUPATEN MOJOKERTO



**Dr. Bambang Wahyuadi, M.H**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196710201989031009



**Balai Besar  
Sertifikasi  
Elektronik**